

LAPORAN SERIAL TAHUNAN
PUSAT DATA DAN ANALISIS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA

ANALISIS KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
2020**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Patut kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Penyertaan-Nya sehingga Laporan Analisis Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan Serial Tahunan Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas yang berkesinambungan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Papua. Selain menyajikan analisis statistik secara historis mengenai hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah Provinsi Papua, laporan ini juga memuat tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah dimasa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penyusunan rencana kerja tahunan daerah Provinsi Papua

Tersusunnya laporam ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yaitu seluruh OPD lingkup Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, serta Tim Tenaga Ahli Pusat KEUDA UNCEN, yang telah banyak memberi dukungan dan masukan terkait dengan data dan informasi untuk analisis kerangka pembangunan daerah Provinsi Papua yang diperlukan. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersebut.

Walaupun laporan ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya namun sangat disadari masih terdapat kekurangan didalamnya, sehingga kontribusi pemikiran yang edukatif dan konstruktif untuk perbaikan kedepan sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan dampak positif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Jayapura, Desember 2020
Kepala Bappeda Provinsi Papua,

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700728 199712 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II METODE KAJIAN	
2.1. Ruang Lingkup Kegiatan	6
2.2.1. Ruang Lingkup Wilayah Pelaksanaan Kegiatan	6
2.2.2. Ruang Lingkup Obyek Kegiatan	6
2.2.3. Ruang Lingkup Tahapan Kegiatan.....	6
2.2. Jenis dan Sumber data.....	6
2.3. Teknik Pengumpulan Data	7
2.4. Metode Analisis	8
BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	9
3.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	9
3.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	35
3.1.2.1. Potensi Hutan.....	35
3.1.2.2. Potensi Perikanan	40
3.1.2.3. Pertambangan.....	42
3.1.2.4. Pariwisata	44
3.1.3. Aspek Demografi.....	45
3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	48
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	48

3.2.2. Indeks Harga Konsumen (IDHK) dan Laju Inflasi ...	50
3.2.3. Pendapatan Per Kapita	51
3.2.4. Ratio Gini	52
3.2.5. Kemiskinan.....	53
3.2.6. Kualitas Pembangunan Manusia	55
3.2.7. Ketenagakerjaan	59
3.2.8. Kesejahteraan Keluarga.....	61
3.2.9. Potensi Sektor Ekonomi.....	62
3.3. Daya Saing	63
3.3.1. Daya Beli Petani.....	63
3.3.2. Kemandirian Daerah	64
3.3.3. Tingkat ketergantungan Penduduk	64
3.3.4. Angkatan Kerja Yang Berpendidikan Tinggi	65
3.3.5. Bank dan Lembaga Keuangan.....	66
3.3.6. Tingkat Keamanan	67
3.3.7. Daya Saing Investasi	68
3.4. Pelayanan Umum	69
3.4.1. Pendidikan	70
3.4.2. Kesehatan	76
3.4.3. Pekerjaan Umum	84
3.4.4. Perumahan Rakyat	89
3.4.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	89
3.4.6. Sosial	90
3.4.7. Tenaga Kerja.....	92
3.4.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93
3.4.9. Pangan.....	97
3.4.10 Pertanahan.....	98
3.4.11 Lingkungan Hidup.	99
3.4.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100
3.4.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.....	102
3.4.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	106

3.4.15. Perhubungan	110
3.4.16. Komunikasi dan Informatika.....	112
3.4.17. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	112
3.4.18. Penanaman Modal.....	113
3.4.19. Kepemudaan dan Olah Raga	114
3.4.20. Statistik	119
3.4.21. Kebudayaan.....	120
3.4.22. Perpustakaan.....	122
3.4.23. Kearsipan.....	123
3.4.24. Pariwisata	124
3.4.25. Pertanian.....	125
3.4.26. Kehutanan.....	128
3.4.27. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	129
3.4.28. Perdagangan	133
3.4.29. Perindustrian.....	135
3.4.30. Kelautan dan Perikanan.....	136

BAB IV KERANGKA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

4.1. Kerangka Pembangunan Sosial Ekonomi Makro Daerah.	141
4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi dan Pendapatan PerKapita	141
4.1.2. Tingkat Inflasi Dan Kemahalan Kontruksi	147
4.1.3. Nilai Kurs Rupiah Terhadap US Dolar	149
4.1.4. Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran	150
4.1.5. Pertumbuhan Dan Produktifitas Investasi Regional	152
4.1.6. Ekspor Impor Nonmigas Dan Migas	153
4.1.7. Kemiskinan Dan Ketimpangan.....	155
4.1.8. Pembangunan Manusia	159
4.1.9. Tantangan Dan Prospek Pembangunan Sosial Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020 dan 2021	162
4.1.9.1. Faktor-Faktor Eksternal.....	162
4.1.9.2. Faktor-Faktor Domestik.....	172
4.1.9.3. Target 2020 Dan Proyeksi 2021	183

4.2. Kerangka Keuangan Daerah	186
4.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	186
4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	192
4.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	199
BAB V TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah ...	202
5.2. Prioritas Pembangunan	209
5.3. Arah Pembangunan Dan Kerangka Pengembangan Wilayah	223
5.3.1. Arah Pembangunan Wilayah	223
5.3.2. Kerangka Pengembangan Kewilayahan	224
BAB IV PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	226
6.2. Saran/Rekomendasi	229
DAFTAR PUSTAKA	231

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2019	11
Tabel 3.2. Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua.....	16
Tabel 3.3. Kawasan Terluar di Provinsi Papua	17
Tabel 3.4. Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019	18
Tabel 3.5. Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2018	20
Tabel 3.6. Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013	22
Tabel 3.7. Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua.....	28
Tabel 3.8. Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023	36
Tabel 3.9. Potensi Mineral Logam dan Non Logam	42
Tabel 3.10. Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2019	46
Tabel 3.11. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2015-2019	59
Tabel 3.12. Kontribusi Sector Ekonomi Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2015-2019	62
Tabel 3.13. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Pada Bank Umum dan BPR di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	66
Tabel 3.14. Angka Partisipasi Kasar Provinsi Papua Tahun 2015-2019	70
Tabel 3.15. Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Tahun 2015-2019	70
Tabel 3.16. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2019	71
Tabel 3.17. Angka Putus Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2019	72
Tabel 3.18. Angka Mengulang Provinsi Papua Tahun 2015-2019	72
Tabel 3.19. Angka Kelulusan Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	73
Tabel 3.20. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua	73

Tabel 3.21.	Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	74
Tabel 3.22.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017..	75
Tabel 3.23.	Sekolah dalam Kondisi Baik Provinsi Papua Tahun 2015-2019	76
Tabel 3.24.	Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk Tahun 2015-2019	88
Tabel 3.25.	Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017	98
Tabel 3.26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua	99
Tabel 3.27.	Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2019	100
Tabel 3.28.	Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berdasarkan NIK Tahun 2019	101
Tabel 3.29.	Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua	105
Tabel 3.30.	Rasio Akseptor KB	109
Tabel 3.31.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) .	114
Tabel 3.32.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN.....	114
Tabel 3.33.	Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2015-2019	116
Tabel 3.34.	Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2015-2019	117
Tabel 3.35.	Peringkat Provinsi Papua Dalam Pekan Olah Raga Nasional Periode 1973-2016	117
Tabel 3.36.	Perolehan Medali Kontingen Provinsi Papua Pada PON XIX Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.....	118
Tabel 3.37.	Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua	121
Tabel 3.38.	Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019.	125
Tabel 3.39.	Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas KomoditasUtama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	126
Tabel 3.40.	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua	129
Tabel 3.41.	Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan	129
Tabel 3.42.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017	132
Tabel 3.43.	Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan.....	133
Tabel 3.44.	Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan.....	134

Tabel 3.45.	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2015 – 2019	135
Tabel 3.46.	Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2013-2019	135
Tabel 3.47.	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan	137
Tabel 3.48.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	139
Tabel 3.49.	Produksi Perikanan Tangkap	140
Tabel 4.1.	PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Triwulan I 2015 – Triwulan IV 2019	141
Tabel 4.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Papua YoY Triwulan I 2015 – Triwulan IV 2019.....	142
Tabel 4.3.	Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Triwulan I 2015 – Triwulan I 2019.....	145
Tabel 4.4.	Tingkat Inflasi Bulanan Provinsi Papua Januari 2015 – Juli 2019	147
Tabel 4.5.	Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2015 – 2019.....	150
Tabel 4.6.	Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi Papua Maret 2015 – Maret 2019	155
Tabel 4.7.	Distribusi Pendapatan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua Maret 2016 – Maret 2019.....	158
Tabel 4.8.	Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua 2015 – 2019	159
Tabel 4.9.	Target Dan Proyeksi Makroekonomi Provinsi Papua 2020 – 2022.....	185
Tabel 4.10.	Ringkasan Pendapatan Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018	188
Tabel 4.11.	Ringkasan Belanja Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018...	195
Tabel 4.12.	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah Dan Perubahannya Di Provinsi Papua Tahun 2016-2018	200
Tabel 5.1.	Keselerasan Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023 Dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	216
Tabel 5.2.	Program-Program Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Periode 2019-2023.....	218

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Peta Batas Administrasi Provinsi Papua	10
Gambar 3.2. Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua	14
Gambar 3.3. Peta Kemiringan Lereng.....	15
Gambar 3.4. Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018	17
Gambar 3.5. Kejahatan yang Sering Terjadi di Provinsi Papua Tahun 2018	21
Gambar 3.6. Peta Rawan Bencana Alam	25
Gambar 3.7. Peta Intensitas Curah Hujan	26
Gambar 3.8. Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua	31
Gambar 3.9. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012.....	34
Gambar 3.10. Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2017.....	36
Gambar 3.11. Peta Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015.....	38
Gambar 3.12. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2019	45
Gambar 3.13. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex	46
Gambar 3.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan dan Tanpa Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	49
Gambar 3.15. PDRB Dengan Harga Konstan 2010 Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	50
Gambar 3.16. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	51
Gambar 3.17. Pendapatan Per Kapita Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Provinsi Papua Tahun 2015-2019	52
Gambar 3.18. Gini Ratio Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	53

Gambar 3.19.	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	53
Gambar 3.20.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	54
Gambar 3.21.	Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2015-2019	55
Gambar 3.22.	Angka Melek Huruf Provinsi Papua Tahun 2015-2019	56
Gambar 3.23.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2019	56
Gambar 3.24.	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2019	57
Gambar 3.25.	Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2019	57
Gambar 3.26.	Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019	58
Gambar 3.27.	Pengeluaran Per Kapita Provinsi Papua Tahun 2015-2019	59
Gambar 3.28.	Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Papua Tahun 2016-2019	61
Gambar 3.29.	Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2015-2019	63
Gambar 3.30.	Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2015-2019	64
Gambar 3.31.	Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2015-2019	65
Gambar 3.32.	Persentase Angkatan Kerja Yang Berpendidikan Tinggi (SMA/Diploma/PT) Provinsi Papua Tahun 2015-2019	65
Gambar 3.33.	Ketersediaan Lembaga Keuangan Bank Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	66
Gambar 3.34.	Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	67
Gambar 3.35.	Rasio Tindak Pidana Per 10.000 penduduk menurut Kepolisian Resort Tahun 2015-2019.....	68
Gambar 3.36.	Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2015-2019	69

Gambar 3.37.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019	76
Gambar 3.38.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019	77
Gambar 3.39.	Rasio Puskesmas Per 10.000 penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019	78
Gambar 3.40.	Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019	78
Gambar 3.41.	Rasio Tenaga Medis Per 100 Ribu Penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019	79
Gambar 3.42.	Rata Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Provinsi Papua Tahun 2015-2019	79
Gambar 3.43.	Rata Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari Provinsi Papua Tahun 2015-2019	80
Gambar 3.44.	Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2015-2019	80
Gambar 3.45.	Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017	81
Gambar 3.46.	HIV/AIDS di Provinsi Papua	81
Gambar 3.47.	HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	82
Gambar 3.48.	Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua	83
Gambar 3.49.	Cakupan Kunjungan K4 Kabupaten Kota di Provinsi Papua Tahun 2017	83
Gambar 3.50.	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak Provinsi Papua Tahun 2015-2019	83
Gambar 3.51.	Proporsi Jaringan Jalan dalam kondisi baik Provinsi Papua Tahun 2015-2019	84
Gambar 3.52.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua Tahun 2015-2019	85
Gambar 3.53.	Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	85
Gambar 3.54.	Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat Tahun 2018	86
Gambar 3.55.	Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua	87

Gambar 3.56.	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua Tahun 2015-2019	89
Gambar 3.57.	Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2015-2017	90
Gambar 3.58.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017.....	91
Gambar 3.59.	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun 2015-2017	92
Gambar 3.60.	Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja.....	92
Gambar 3.61.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	93
Gambar 3.62.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua Tahun 2019	94
Gambar 3.63.	Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2015-2016	96
Gambar 3.64.	Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum	97
Gambar 3.65.	Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ..	102
Gambar 3.66.	Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2017	103
Gambar 3.67.	Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK.....	104
Gambar 3.68.	Perkembangan APBK, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017	105
Gambar 3.69.	Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBK di Provinsi Papua Tahun 2015-2017	106
Gambar 3.70.	Persentase APBK terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017	106
Gambar 3.71.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	107
Gambar 3.72.	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	108
Gambar 3.73.	Pasangan Usia Subur Ber-KB Aktif dan Tidak Aktif ..	110

Gambar 3.74.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	111
Gambar 3.75.	Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet	112
Gambar 3.76.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015-2019.....	113
Gambar 3.77.	Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	115
Gambar 3.78.	Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta....	122
Gambar 3.79.	Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua	123
Gambar 3.80.	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku	124
Gambar 3.81.	Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua	124
Gambar 3.82	Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016	125
Gambar 3.83.	Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2019.....	128
Gambar 3.84.	Jumlah Cadangan (Reserve) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua	130
Gambar 3.85.	Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui	130
Gambar 3.86.	Total Produksi Tembaga dan Emas	131
Gambar 3.87.	Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua	136
Gambar 4.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2019	142
Gambar 4.2.	Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha Triwulan I 2017 – Triwulan IV 2019	143
Gambar 4.3.	Pendapatan Per Kapita Provinsi Papua Triwulan I 2015 – Triwulan I 2019	147
Gambar 4.4.	Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi Papua 2014-2019..	148
Gambar 4.5.	Indeks Kemahalan Kontruksi Provinsi Papua Tahun 2015-2018	149
Gambar 4.6.	Nilai Kurs Rupiah Terhadap US\$ Periode Januari 2018 – Juli 2019	150
Gambar 4.7.	Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Papua 2015-2019.....	151

Gambar 4.8.	Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....	152
Gambar 4.9.	Ekspor Dan Impor Provinsi Papua Januari 2018 – Juli 2019	154
Gambar 4.10.	Neraca Perdagangan Provinsi Papua Januari 2018 – Juli 2019	154
Gambar 4.11.	Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua Maret 2018 – Maret 2019.....	157
Gambar 4.12.	Tingkat Ketimpangan Menurut Angka Gini Ratio Di Provinsi Papua Maret 2015 – Maret 2019	157
Gambar 4.13.	IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2018	161
Gambar 5.1.	Kerangka Pengembangan Kewilayahan Papua.....	224

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun immaterial.

Adapun pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara: (1) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (2) merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah; (3) menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah atau solusi; dan (4) melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Semua ini terangkum dalam satu kesatuan yang sistematis, integratif dan holistik yang disebut dengan perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu

dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Ada beberapa implikasi pokok dari perencanaan pembangunan daerah: *Pertama*, perencanaan pembangunan daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. *Kedua*, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Dan *ketiga*, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas yang biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Hal ini menandakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga dalam tahapan ini harus dijalankan secara optimal. Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten dan data-data statistik yang akurat. Keberadaan data-data statistik yang akurat akan membantu perencana dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala serta pemikiran ideal yang harus diapresiasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pembangunan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah. Melalui sistem informasi ini diharapkan arah pembangunan daerah lebih terarah pada kebutuhan riil masyarakat secara obyektif, dan bukan hanya bersifat normatif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan analisis kerangka pembangunan daerah, yaitu suatu analisis outline pembangunan yang berisikan uraian singkat mengenai kondisi dan analisis statistik sosial ekonomi daerah dan keuangan daerah, sebagai gambaran umum dalam situasi historis dan *on time* hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah. Selain itu juga memberikan tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah di masa mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pada penyusunan dokumen ini adalah memberikan analisis statistik sosial ekonomi daerah secara historis mengenai hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah Provinsi Papua, dan juga memberikan tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah dimasa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penyusunan rencana kerja tahunan daerah Provinsi Papua. Adapun tujuan dari pada kegiatan ini secara khusus adalah :

1. Mengidentifikasi dan menetapkan indikator-indikator kerangka analisis pembangunan di Papua periode 2015-2019;

2. Mengukur dan menganalisis capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing;
3. Merumuskan peluang dan tantangan, atau stimulus dan distorsi dalam pembangunan daerah Provinsi Papua dimasa mendatang, khususnya tahun 2021 dan 2022.
4. Melakukan proyeksi capaian kinerja pembangunan sosial ekonomi makro daerah Provinsi Papua pada tahun 2020 dan 2021.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penyusunan dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2018 adalah:

1. Teridentifikasinya indikator-indikator kerangka analisis pembangunan di Papua periode 2015-2019;
2. Terukurnya capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing;
3. Tersusunnya dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen ini disusun berdasarkan kebutuhan data perencanaan pembangunan daerah yang dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyajiannya secara garis besar sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II METODE KAJIAN

2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

2.2. Jenis Dan Sumber Data

2.3. Teknik Pengumpulan Data

2.1. Metode Analisis

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Aspek Geografi dan Demografi

3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.3. Aspek Daya Saing Daerah

3.4. Aspek Pelayanan Umum

**BAB IV KERANGKA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI
MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH**

4.1. Kerangka Pembangunan Sosial Ekonomi Makro
Daerah

4.2. Kerangka Keuangan Daerah

**BAB V TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH**

5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka
Menengah

5.2. Prioritas Pembangunan

5.3. Arah Pembangunan Dan Kerangka Pengembangan
Wilayah

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2. Rekomendasi

BAB II METODE KAJIAN

2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

2.1.1. Ruang Lingkup Wilayah Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan penyusunan dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2020 adalah UPTD Pusat Data Dan Analisis Pembangunan BAPPEDA Provinsi Papua dan Tenaga ahli yang direkrut dari pihak akademisi. Ruang lingkup wilayah dalam pengukuran Analisis Kerangka Pembangunan ini adalah tingkat provinsi.

2.1.2. Ruang Lingkup Obyek Kegiatan

Obyek yang diamati dalam studi ini mencakup indikator-indikator dalam mengukur kinerja pembangunan daerah yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Papua.

2.1.3. Ruang Lingkup Tahapan Kegiatan

Penyusunan Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal dalam bentuk time liner yaitu: (1) Penyusunan TOR dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2020; (2) Penyediaan data pendukung berkaitan dengan capaian-capaian indikator kinerja Pembangunan Provinsi Papua selama periode 2015-2019; (3) Proses Penyusunan dan Pengolahan data (Analisis) akan dilakukan oleh pihak akademisi; (4) Kegiatan FGD akan dilakukan pihak akademisi yang difasilitasi Oleh BAPPEDA Provisi Papua jika diperlukan.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan analisis kerangka pembangunan daerah adalah berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang diperoleh, diput dan dikumpulkan dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh sebuah institusi sebelumnya. Sedangkan data primer merupakan *raw data* atau

data dasar yang langsung diliput pada obyek yang diamati melalui suatu observasi langsung ke lapangan.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, data yang dikumpulkan dapat juga dibagi menjadi dua jenis pengukuran yakni data kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran data kualitatif menggunakan skala ordinal yang dapat menunjukkan adanya perbedaan derajat antara penilaian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan data-data kuantitatif dapat berbentuk skala interval atau rasio.

Menurut sumbernya data yang dihimpun dalam studi ini dapat dibagi menjadi beberapa sumber yang berasal dari BPS Provinsi Papua dan Kabupaten/kota, SKPD (Dinas, Badan, Kantor), BPS RI, Kementerian dan Ditjen.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar ada 3 (tiga) teknik yang digunakan dalam meliputi data-data dan informasi yang dibutuhkan. Yaitu :

1. Riviui Dokumen. Riviui dokumen atau tinjauan dokumen merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan kembali dokumen yang ada. Dalam hal ini, peninjauan dokumen dilakukan pada dokumen-dokumen yang bersifat internal dan eksternal terhadap suatu program atau organisasi.
2. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan analisis dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
3. *Focus Group Discussion*. *Focus Group Discussion* disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Atau sederhananya FGD dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu suatu metode analisis yang lebih menekankan pada aspek

pengukuran secara obyektif terhadap berbagai fenomena masalah. Adapun analisis kuantitatif yang digunakan antara lain meliputi : (1) statistik deskriptif; (2) rasio-rasio pertumbuhan, proporsi, dan cakupan; (3) analisis COR dan ICOR; (4) model-model proyeksi *time series*.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Aspek Geografi Dan Demografi

3.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

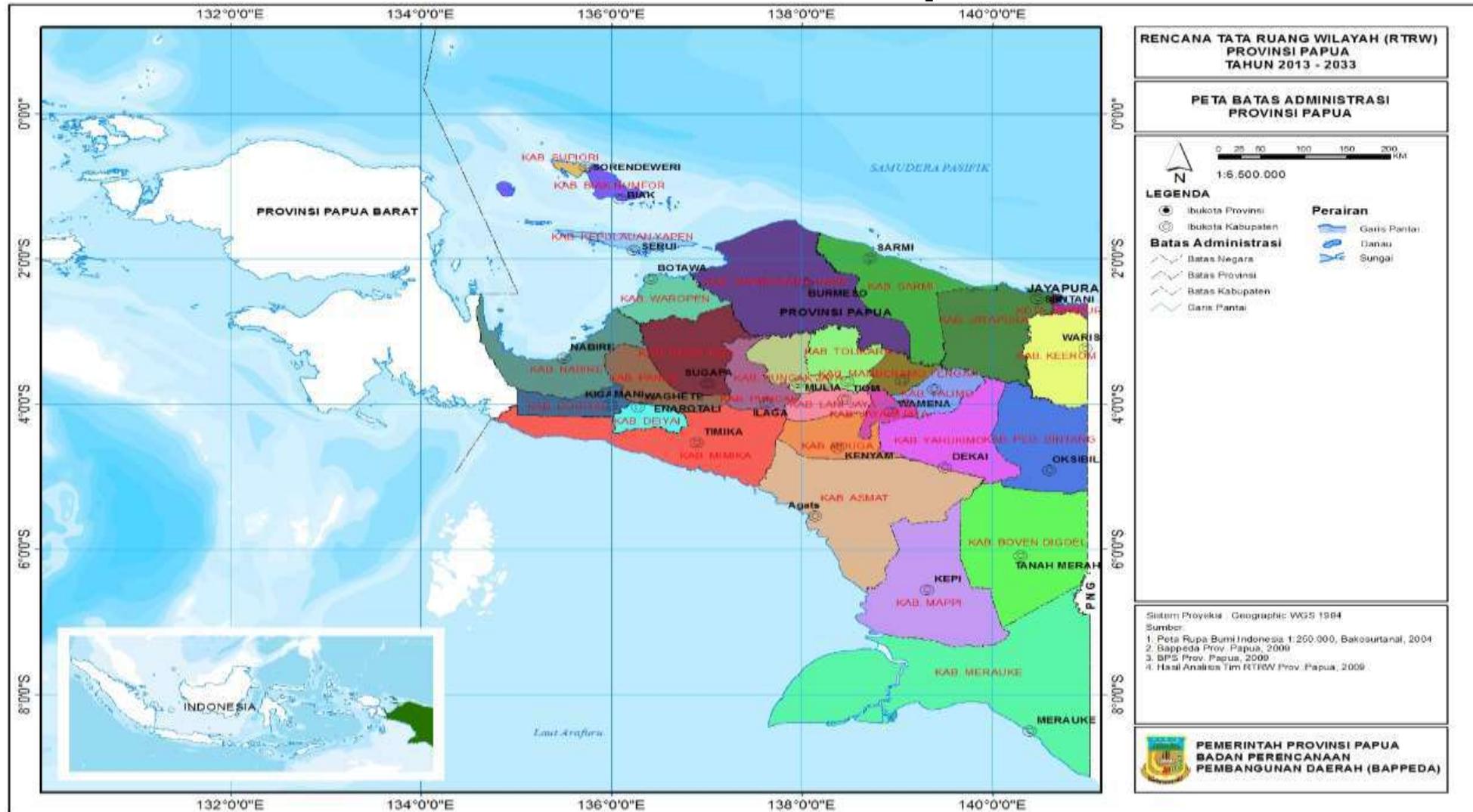
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00' LU - 9°10' LS dan 134°00' BT - 141°05' BT dengan luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 distrik dan 4.378 kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Samudra Pasifik
- b. sebelah selatan : Laut Arafuru
- c. sebelah barat : Papua Barat
- d. sebelah timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudia Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 hektar.

Gambar 3.1.
Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Tabel 3.1.
Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2019

Wilayah Adat	Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (km ²)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	46.075	Merauke	20	176	14	Dataran Mudah Akses
	Asmat	26.118	Agats	23	217	4	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	23.622	Tanah Merah	20	111	5	
	Mappi	22.979	Keppi	15	162	2	
La Pago	Jayawijaya	2.743	Wamena	40	316	15	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	2.852	Tiom	39	356	-	
	Mamberamo Tengah	4.069	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	5.329	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	15.043	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	7.548	Ilaga	25	206	-	
	Puncak Jaya	5.020	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	3.674	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	15.979	Dekai	51	517	1	
Yalimo	3.660	Elelim	5	300	-		
Mee Pago	Nabire	12.011	Nabira	15	80	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	18.676	Timika	18	123	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	3.064	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	4.681	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	5.713	Sugapa	8	97	-	
	Paniai	4.891	Enarotali	24	216	-	
Saireri	Biak Numfor	2.229	Biak	19	239	23	Dataran Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	2.407	Serui	16	147	18	
	Supiori	690	Sorendiweri	5	37	1	Dataran Sulit Akses
	Waropen	10.592	Waren	12	116	1	
Mamta	Jayapura	14.048	Sentani	19	127	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	8.476	Arso	11	91	-	
	Sarmi	12.961	Sarmi	19	109	2	
	Mamberamo Raya	29.124	Burmeso	9	59	-	Dataran Sulit Akses
	Kota Jayapura	817	Jayapura	5	16	23	
Total		315.092		576	5379	136	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2020 (diolah)

Keterangan: (*) Luas wilayah berdasarkan undang-undang pemekaran

Berdasarkan 0 dan 0, terdapat 19 kabupaten di wilayah Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan.

Dari 5.163 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2017, sekitar 79,68% atau sebanyak 4.114 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 70% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaan kondisi geografi wilayah kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi selama ini dalam memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antarwilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang.

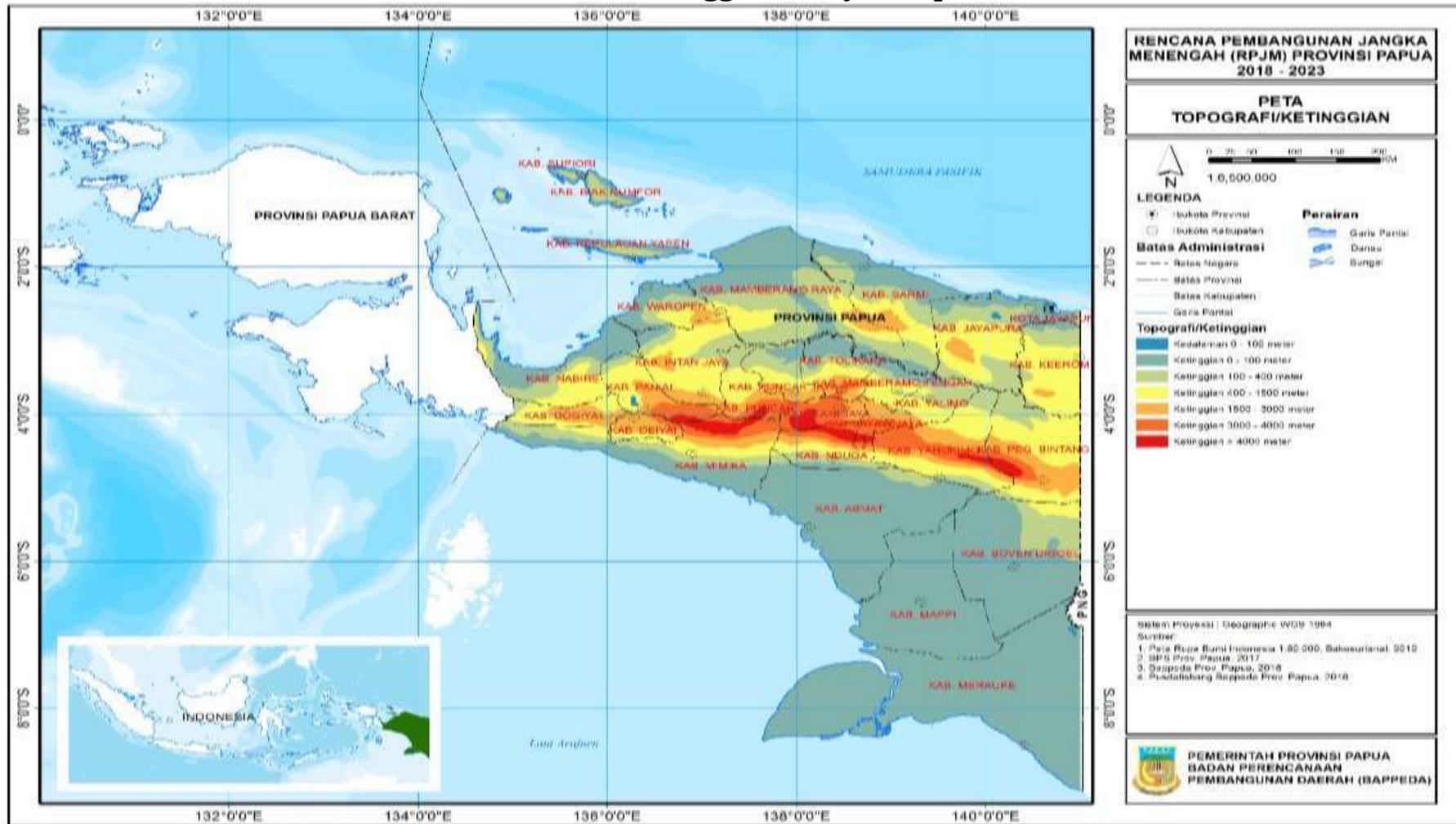
b. Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu: 1) Pegunungan Utara di lingkaran luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkaran dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl.

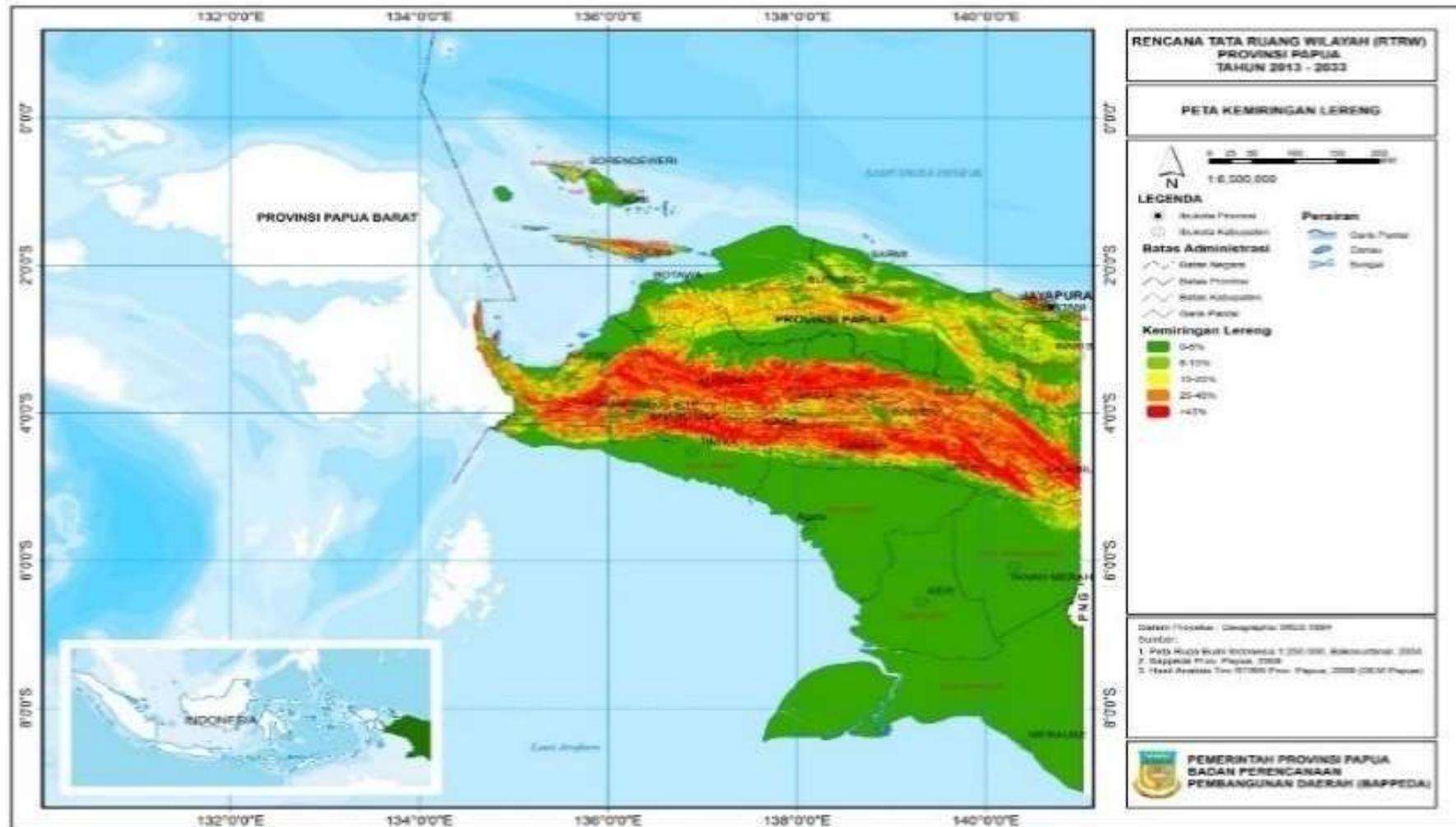
Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi Papua adalah lereng landai (0 – 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago. Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim (lihat 0 dan 3.3) menyebabkan pembangunan jaringan

transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan selama ini.

Gambar 3.2.
Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua



Gambar 3.3
Peta Kemiringan Lereng



c. Kondisi Kawasan

Selain terhampar daratan yang sangat luas, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik, sehingga wilayah Papua memiliki potensi di bidang perikanan laut tangkap. Adapun luas wilayah laut di Provinsi Papua sebesar 12.151,61 km² dan panjang garis pantai sebesar 5.878,11 km (lihat c).

Tabel 3.2.
Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)	Panjang Garis Pantai (km)
1	Merauke	3.179,51	1.497,01
2	Jayapura	1,35	148,33
3	Nabire	234,97	641,16
4	Kepulauan Yapen	40,03	897,72
5	Biak Numfor	47,85	537,17
6	Mimika	2.832,30	464,80
7	Mappi	582,14	151,47
8	Asmat	2.845,91	275,97
9	Sarmi	31,85	302,20
10	Waropen	666,69	222,58
11	Supiori	35,83	340,80
12	Mamberamo Raya	1.650,37	291,45
Provinsi Papua		12.151,61	5.878,11

Sumber: BPS, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008, Bakorsutanal, dan hasil pengukuran GIS Tahun 2009, Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat 2 daerah terluar di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke (lihat 0).

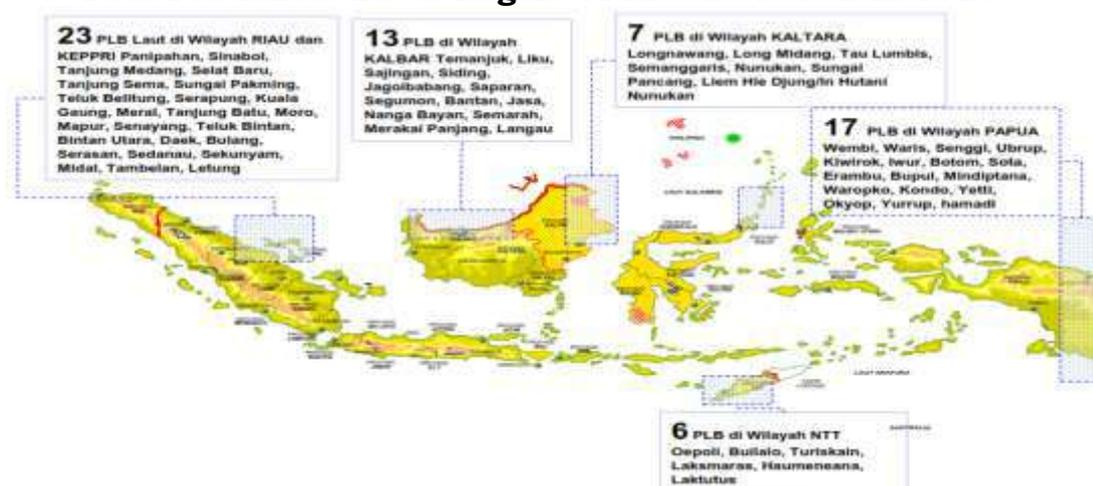
Tabel 3.3.
Kawasan Terluar di Provinsi Papua

No	Nama Pulau	Kabupaten/ Kota	Negara yang berbatasan	Keterangan
1	P. Fanildo	Supiori	Palau	Tidak berpenduduk
2	P. Brass	Supiori	Palau	Berpenduduk
3	P. Bepondi	Supiori	Palau	Berpenduduk
4	P. Liki	Sarmi	Palau	Berpenduduk
5	P. Kolepon/P. Dolok	Merauke	Australia	Berpenduduk

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 2008 dalam RPJPD 2005-2025

Provinsi Papua juga merupakan salah satu kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota sebagai *daerah terdepan* di Provinsi Papua yang posisinya berbatasan langsung dengan PNG yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke. Dinamika perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas tersebut, Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah membangun 17 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Papua (lihat 03.4).

Gambar 3.4.
Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018



Sumber: Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI (2018)

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, pemerintah pusat telah membangun PLBN Skouw di Kota Jayapura. PLBN Skouw berdiri megah di atas lahan

dengan luas total mencapai 10,7 hektar, dengan luas bangunan mencapai 7.619 m² yang terbagi dalam beberapa zona. Desain Gedung PLBN Skouw ini mengusung budaya lokal Papua yang mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (*green building*). Direncanakan pada tahun 2018, PLBN Sota di Kabupaten Merauke akan direnovasi dan dibangun lebih besar, namun tidak semegah seperti PLBN Skouw, karena aktifitas ekonomi dan lintas batas antar 2 (dua) negara RI-PNG pada PLBN Sota tidak seintensif PLBN Skouw.

Kondisi topografi yang begitu ekstrim yang tersebar di hampir sebagian wilayah Papua menyebabkan banyak daerah yang terisolasi dan belum tersentuh oleh pelayanan publik dari pemerintah secara memadai, sehingga jumlah daerah di Papua yang terkategori sebagai *daerah tertinggal* paling banyak di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 disebutkan jumlah daerah tertinggal di Papua sebanyak 26 Kabupaten, yang mana lebih jauh lagi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dikatakan penyebab utama ke-26 tersebut menjadi daerah tertinggal ada 6 faktor yakni : (1) aksesibilitas, (2) Sumber Daya Manusia, (3) Ekonomi, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Karakteristik Daerah, dan (6) Kemampuan Keuangan Daerah. Urutan faktor-faktor penyebab utama ketertinggalan suatu daerah di wilayah di Papua dapat dilihat dalam 0 berikut.

Tabel 3.4.
Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan
Wilayah Papua Tahun 2015-2019

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
Anim Ha	Merauke	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Boven Digul	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi			
	Mappi	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Asmat	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	
Mamta	Sarmi	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi			

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Keteringgalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	SDM		
	Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM			
La Pago	Jaywijaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesibilitas		
	Puncak Jaya	Aksesibilitas	Sarana dan Prsarana	Ekonomi	SDM		
	Yahukimo	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana		
	Pegunungan Bintang	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Tolikara	Aksesibilitas	Sarana dan Prsarana	SDM	Ekonomi		
	Nduga	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Lanny Jaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesibilitas		
	Mamberamo Tengah	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesibilitas		
	Yalimo	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah		
	Puncak	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesibilitas		
	Mee Pago	Nabire	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
Paniai		Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
Dogiyai		Ekonomi	SDM	Aksesibilitas	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
Intan Jaya		SDM	Ekonomi	Aksesibilitas	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	
Deyiai		Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Kemampuan Keuangan Daerah		
Saireri	Kepulauan Yapen	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas			
	Biak Numfor	Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah			
	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	SDM	

Sumber: Perpres No. 21 Tahun 2018 (diolah)

Dalam 0 terlihat bahwa permasalahan yang paling utama (nomor 1) penyebab keteringgalan suatu daerah kabupaten di wilayah Papua menurut perspektif pemerintah pusat adalah aksesibilitas, ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Merujuk kepada indikasi yang tercantum dalam Tabel 3.4 tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa penyebab utama ketertinggalan wilayah Anim Ha dan Mamta adalah faktor aksesibilitas. Penyebab utama ketertinggalan di La Pago dan Mee Pago adalah faktor aksesibilitas, ekonomi, dan Sumber Daya Manusia. Adapun penyebab ketertinggalan Saireri adalah ekonomi, terkecuali untuk Waropen penyebab utamanya adalah aksesibilitas.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh jumlah desa tertinggal di Provinsi Papua tergolong masih sangat tinggi. Pada tahun 2018 tercatat desa tertinggal sebanyak 4,753 desa atau sebesar 87,12 persen dari total 5,456 desa di Papua. Sebaran desas tertinggal paling banyak terdapat diwilayah La Pago yaitu sebanyak 3,046 desa yang tersebar di 10 daerah. Selanjutnya, terdapat juga desa dengan status berkembang yaitu sebanyak 693 atau sebesar 12,70 persen. Adapun desa berkembang paling banyak tersebar di wilayah Saireri yaitu sebanyak 2017 desa. Perkembangan desa mandiri di Papua tergolong masih sangat rendah, terdapat 10 desa yang masuk dalam kriteria mandiri dan tersebar di 6 kabupaten/kota diantaranya adalah Kabupaten Mappi, Mimika, Nabire, Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura.

Tabel 3.5.
Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2018

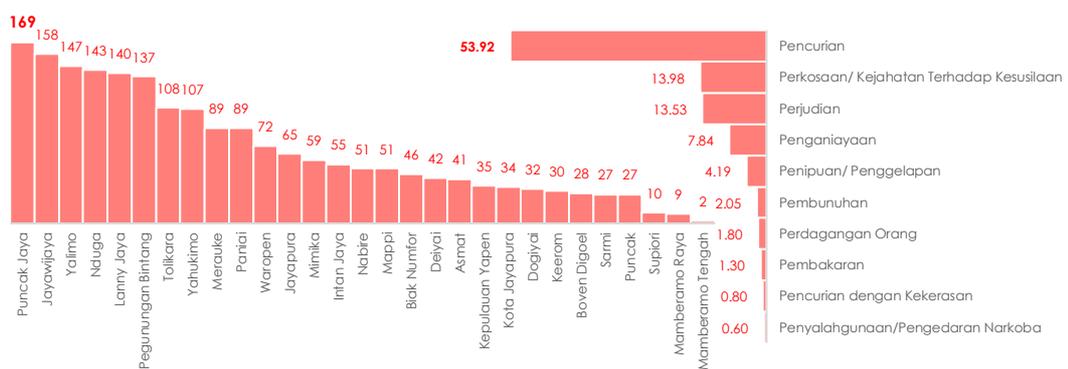
Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	Total
Anim Ha	553	118	1	672
Asmat	218	3	-	221
Merauke	84	95	-	179
Boven Digoel	100	10	-	110
Mappi	151	10	1	162
La Pago	3046	86	0	3132
Jayawijaya	274	53	-	327
Puncak	204	2	-	206
Puncak Jaya	300	2	-	302
Tolikara	540	1	-	541
Yahukimo	514	3	-	517
Lanny Jaya	347	8	-	355
Mamberamo Tengah	53	6	-	59
Nduga	247	1	-	248
Pegunungan Bintang	274	3	-	277
Yalimo	293	7	-	300
Mee Pago	560	109	3	672

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	Total
Deiyai	46	21	-	67
Intan Jaya	96	1	-	97
Mimika	101	31	1	133
Nabire	42	36	2	80
Paniai	198	18	-	216
Dogiyai	77	2	-	79
Saireri	352	217	0	569
Biak Numfor	137	117	-	254
Kepulauan Yapen	106	54	-	160
Supiori	15	23	-	38
Waropen	94	23	-	117
Mamta	242	163	6	411
Jayapura	62	76	1	139
Keerom	59	28	4	91
Mamberamo Raya	52	7	-	59
Sarmi	69	39	-	108
Kota Jayapura	-	13	1	14
Provinsi Papua	4753	693	10	5456

Sumber: BPS Papua (2020)

Selain terdapat daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal, Provinsi Papua juga teridentifikasi memiliki *Daerah Tertentu*, khususnya daerah rawan konflik dan bencana. Berdasarkan *data base* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI) tahun 2018, terekam sebanyak 2.003 kasus kejadian konflik di Papua, yang sebagian besar (53,92%) disebabkan karena maraknya kasus pencurian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.5.
Kejahatan yang Sering Terjadi di Provinsi Papua Tahun 2018



Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua berdasarkan akumulasi kasus kejadian tertinggi yaitu terdapat pada kabupaten Puncak Jaya yaitu sebanyak 169 kasus. Selanjutnya, terdapat beberapa daerah lain yang tergolong sangat tinggi didominasi pada wilayah La Pago diantaranya kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara dan Yahukimo. Sedangkan terdapat juga daerah dengan kasus paling sedikit yaitu kabupaten Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya dan Supiori. Selanjutnya, kawasan daerah tertentu lainnya yang patut diperhatikan adalah kawasan bencana. Berdasarkan *data base* yang dikeluarkan Kemendes PDTT RI tahun 2013, terdapat tiga bencana yang sangat rawan terjadi di Provinsi Papua yaitu banjir, tanah longsor dan kebakaran (lihat tabel 3.6).

Tabel 3.6.
Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	RB Banjir	RB Gempa Bumi	RB Tsunami	RB Tanah Longsor	RB Gelombang Ekstrim & Abrasi	RB Kebakaran	RB Cuaca Ekstrim	RB Kekeringan
Merauke	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Jayawijaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Nabire	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	-
Kep. Yapen	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Biak Numfor	-	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Puncak Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Tinggi
Paniai	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Mimika	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Sarmi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Keerom	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
Peg. Bintang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Yahukimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tolikara	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
Waropen	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Boven Digoel	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Mappi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Asmat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Supiori	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	-
Mamb. Raya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Mamb. Tengah	Sedang	Tinggi	-	Sedang	-	Sedang	Rendah	-
Yalimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Lanny Jaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-

Kabupaten/Kota	RB Banjir	RB Gempa Bumi	RB Tsunami	RB Tanah Longsor	RB Gelombang Ekstrim & Abrasi	RB Kebakaran	RB Cuaca Ekstrim	RB Kekeringan
Nduga	Tinggi	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	-
Puncak	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Dogiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Intan Jaya	-	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Deiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Kota Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Tinggi

Sumber: Kemendes PDPT RI (2017)

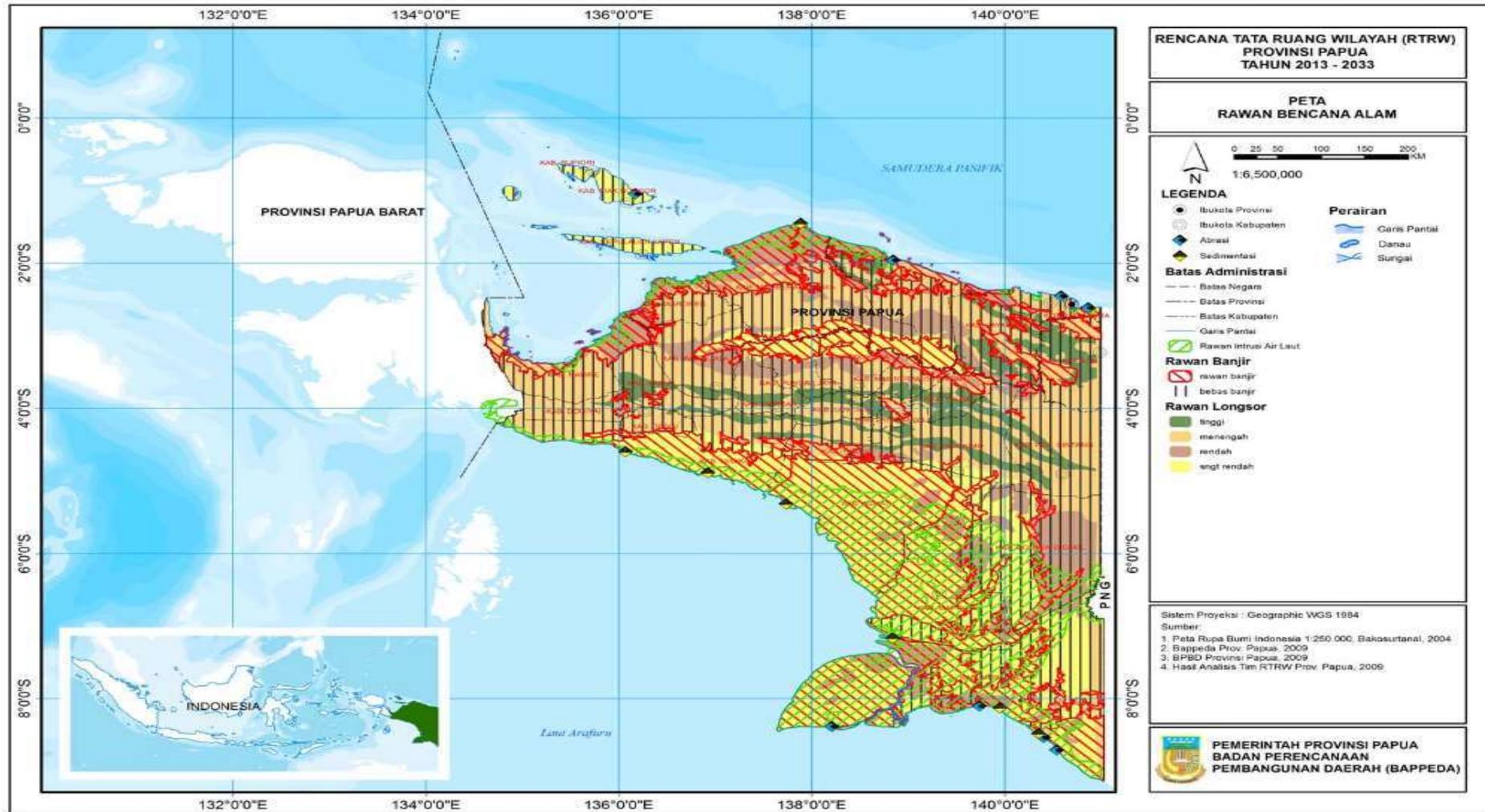
Dalam 0 tergambarakan bahwa tingkat kerawanan bencana banjir pada hampir setiap kabupaten/kota termasuk dalam kelas yang tinggi. Hanya 6 daerah tertentu saja yang diindikasikan tidak memiliki kerawanan banjir yakni Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Sedangkan untuk kerawanan tanah longsor sebagian besar daerah di Papua berpotensi tinggi, terkecuali untuk Kabupaten Merauke, Nabire, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah dan Nduga yang mempunyai kelas sedang. Selanjutnya untuk rawan kebakaran, oleh karena Papua memiliki hutan yang sangat luas dan menyebar diseluruh daerah, akhirnya hampir seluruh daerah di Papua terindikasi rawan kebakaran, kecuali Kota Jayapura saja yang dianggap tidak berpotensi rawan kebakaran. Untuk daerah lain potensi kerawanan kebakarannya bervariasi antara kelas yang tinggi dan sedang, dengan yang terbanyak pada kerawanan tinggi seperti di Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Paniai, Mimika, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Tolikara. Daerah yang potensi rawan kebakarannya dalam kelas sedang hanya ada 7 (tujuh) yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Puncak dan Intan Jaya. Secara visual, kondisi penyebaran rawan bencana alam di Provinsi Papua dapat diperhatikan pada Gambar 3.6.

d. Klimatologi

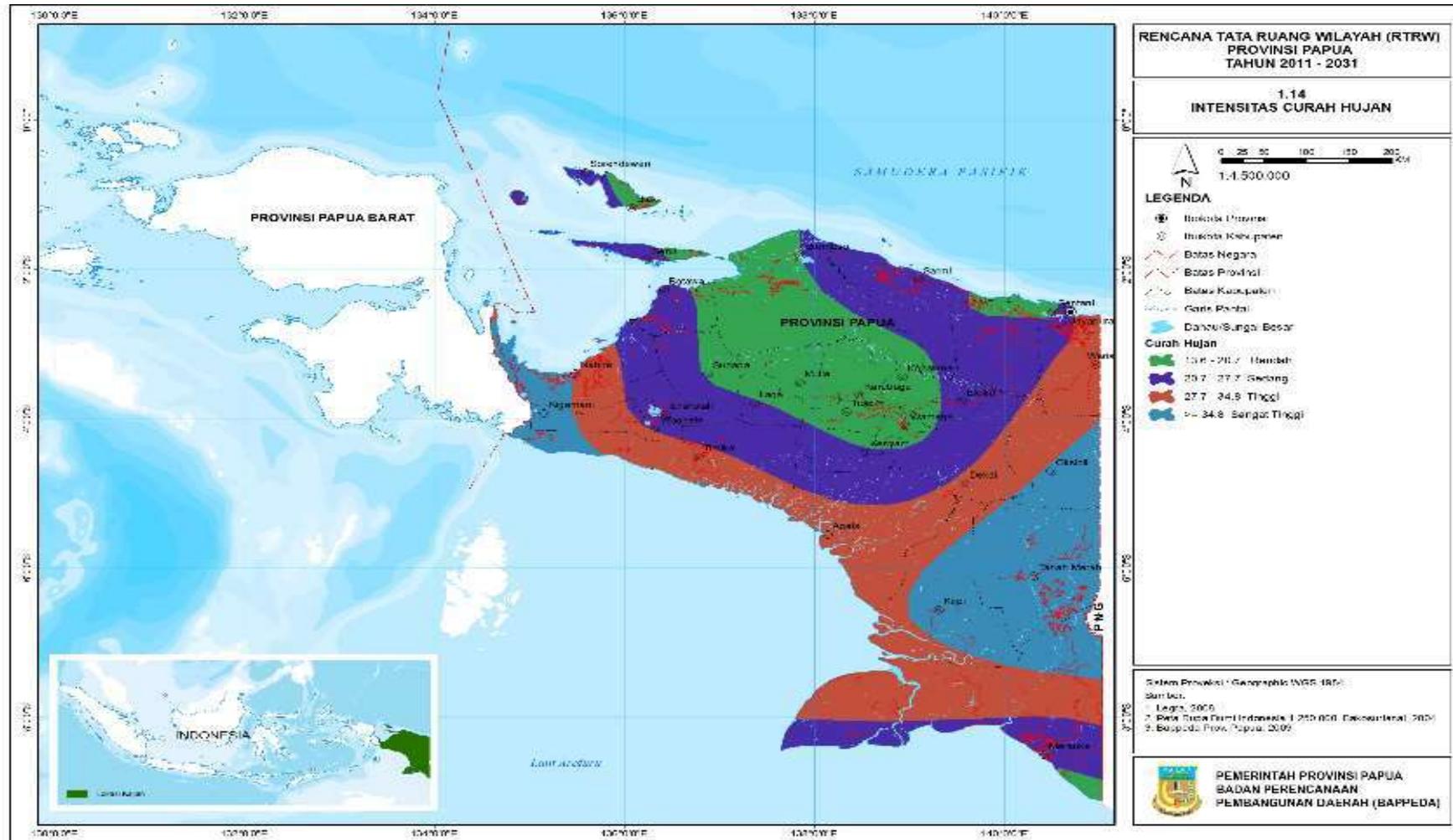
Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan

fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat. Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi.

Gambar 3.6.
Peta Rawan Bencana Alam



Gambar 3.7.
Peta Intensitas Curah Hujan



Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (lihat Gambar 2.7).

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pegunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi Papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

e. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km² (lihat 0). Banyaknya jumlah DAS

menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 3.7.
Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km ²)
Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
Turiku Hilir	930.094	34.912,40
Apauwer	252.59	2.998,00
Wiru	155.114	2.494,80
Verkume	155.798	1.845,50
Biri	116.087	2.173,00
Sermo	151.866	1.599,20
Tor	244.29	3.153,60
Van Dallen	513.64	8.585,15
Wediman	875.27	11.492,30
Digul Kanan	420.912	7.253,70
Digul Hilir	1,178.81	33.698,04
Digul Kiri	615.753	6.162,50
Digul Timur	196.058	3.189,91
Digul Barat	196.01	2.489,90
Ein Hilir	1,956.46	65.315,43
Ein Hulu	509.886	5.337,72
Wapoga	574.393	10.637,14
Sobger	1.262.169	35.174,80
Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
Bigadu	315.5	9.103,53
Sirowo	150.915	4.013,00
Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61
Maro	559.804	9.909,00
Tami	320.328	7.015,40
Omba	157.253	3.427,60
Yawe	147.289	4.170,30
Lorentz	747.383	8.717,65
Kumbe	262.015	3.282,00
Wanggar	361.35	4.776,20
Kapiraya	121.26	2.860,90
Peter	682.955	10.992,30
Otokwa	187.337	3.395,30
Sentani	35.04	968,60
Grime	110.725	1.050,00
Bunga	397.783	3.457,07
Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
Bian	640.218	12.080,12
Kamura	118.525	2.187,60

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km ²)
Rombak	346.119	1.971,20
Nadubuai	222.608	1.971,20
Brazza	990.666	10.088,02
Parongga	31.33	593,20
Yawe	61.296	1.272,00
Akimuga	288.925	2.660,10
Mimika	477,71	4.670,01
Aidoma	306.834	3.184.599,00
Minajerwi	447.597	5.054,70
Cemara	280.4	2.556,40
Otokwa	181.007	1.662,00
Nordwest	624.39	7.832,82
Odamun	264.36	6.808
Dolok	224.573	3.119,20
Bulaka	331.26	6.418,01
Siriwo	155.759	1.187,60
Kumbe	38.4	483,90
Paranggo	94.882	774,90
Kamura	270.438	2.243,20
Mappi	524.98	7.596,00
Biak	84.27	467,15
Supiori	83.457	245.917,00
Yapen	298.986	1.266.089,00
Gesa	457.979	5.551,02

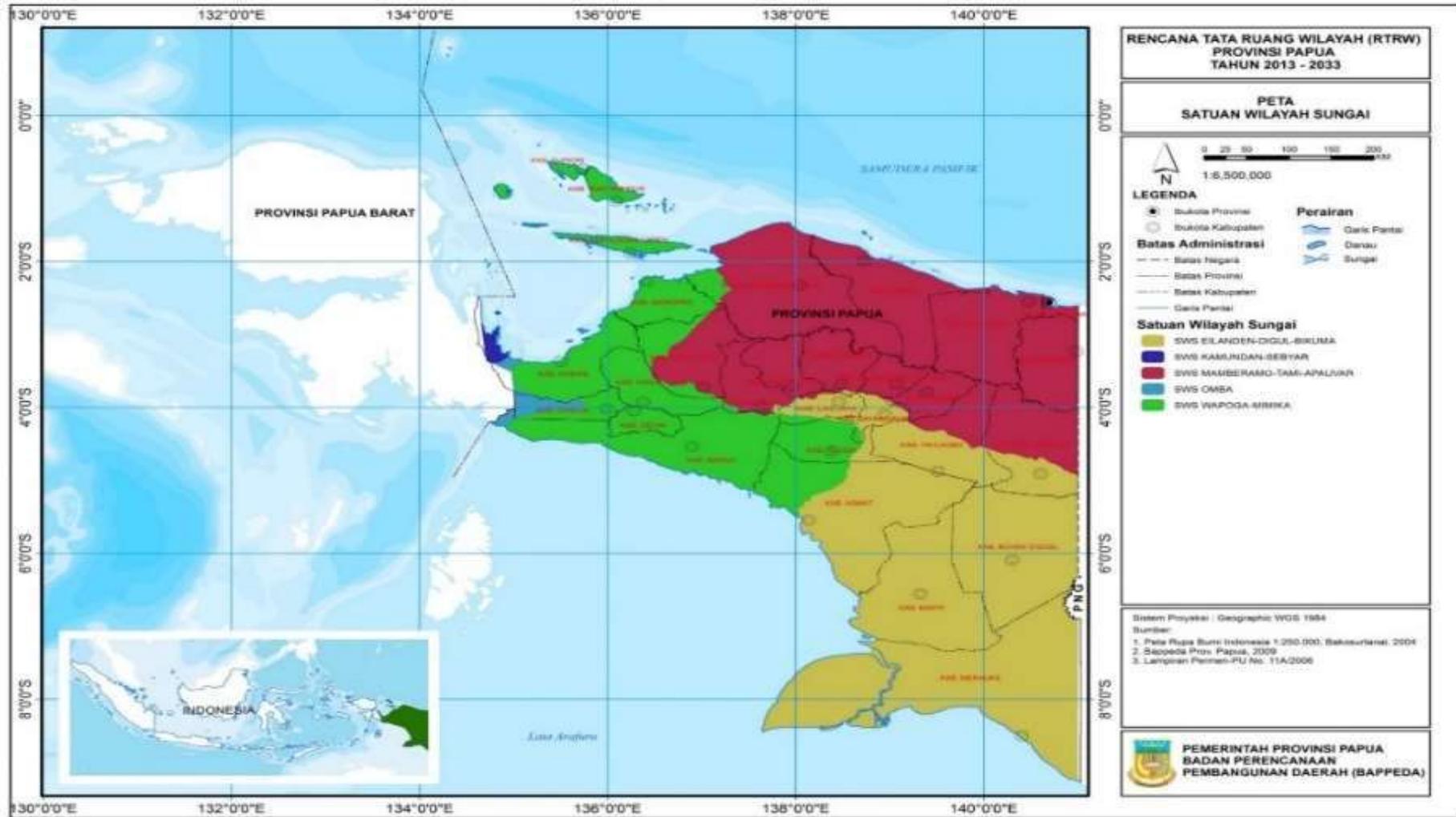
Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

- 1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS:DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.
- 2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai:DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.
- 3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS:DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.

- 4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS Wapoga-Mimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS:DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu

Gambar 3.8.
Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua



Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

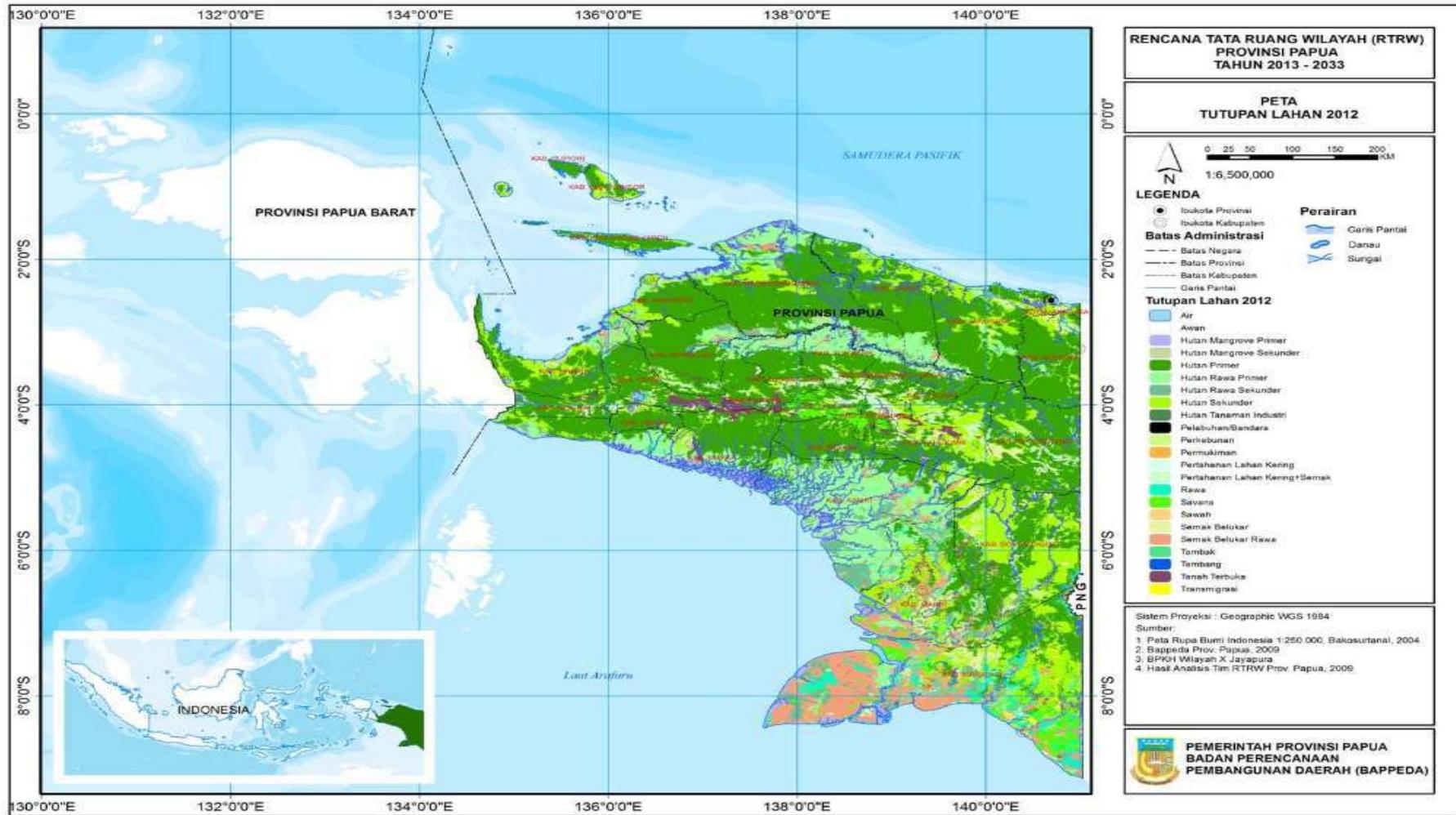
Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa *over estimated*. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

f. Tutupan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, diindikasikan Papua memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha (49%) dan 4,5 juta ha (14,5%); kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta ha (10,5%) dan savanna seluas 1,4 juta ha (4,5%). Sementara itu, hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir sama masing-masing sebesar 8,3 juta ha dan 8,2 juta ha. Sedangkan, jenis penggunaan hutan produksi konversi dan

KSA/KPA mencapai 6,4 juta ha dan 5,6 juta ha (lihat 0 dan Gambar 3.9).

Gambar 3.9.
Peta Tutupan Lahan Tahun 2012



Tabel 3.8.
Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW
Provinsi Papua Tahun 2013-2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan	Persentase
1	A i r	551.789,45	2%
2	APL	1.707.014,50	5%
3	Hutan Lindung	7.838.861,32	24%
4	Hutan Produksi	4.767.346,35	14%
5	Hutan Produksi Konversi	4.136.177,07	13%
6	HPT	5.982.030,10	18%
7	KSA	6.755.034,81	21%
8	KSA Air	1.019.016,51	3%
JUMLAH		32.757.270,10	100%

Sumber: RTRW 2012, Pemerintah Provinsi Papua

Sekitar 81,14% luas lahan di Papua berupa tutupan hutan yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati begitu tinggi. Diperkirakan dalam hutan Papua terdapat 602 jenis burung (52% jenis endemik), 223 jenis mamalia (58% jenis endemik), 223 jenis reptil (35% jenis endemik) dan 1.030 jenis tumbuhan (55% jenis endemik) hidup di belantara Papua.

Selanjutnya, menurut data terbaru yang dipublikasikan oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah X Papua, Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 adalah seluas 32.498.762 hektar yang terdiri atas : (1) Kawasan Berhutan seluas 25.028.044 hektar, dan (2) Kawasan Tidak Berhutan seluas 7.470.718 hektar. Dimana Kelas Tutupan Lahan paling luas adalah untuk Hutan Lahan Kering Primer yaitu 14.746.788 hektar, serta daerah yang paling besar memiliki tutupan lahan adalah Kabupaten Merauke seluas 4.640.188. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.10.

3.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

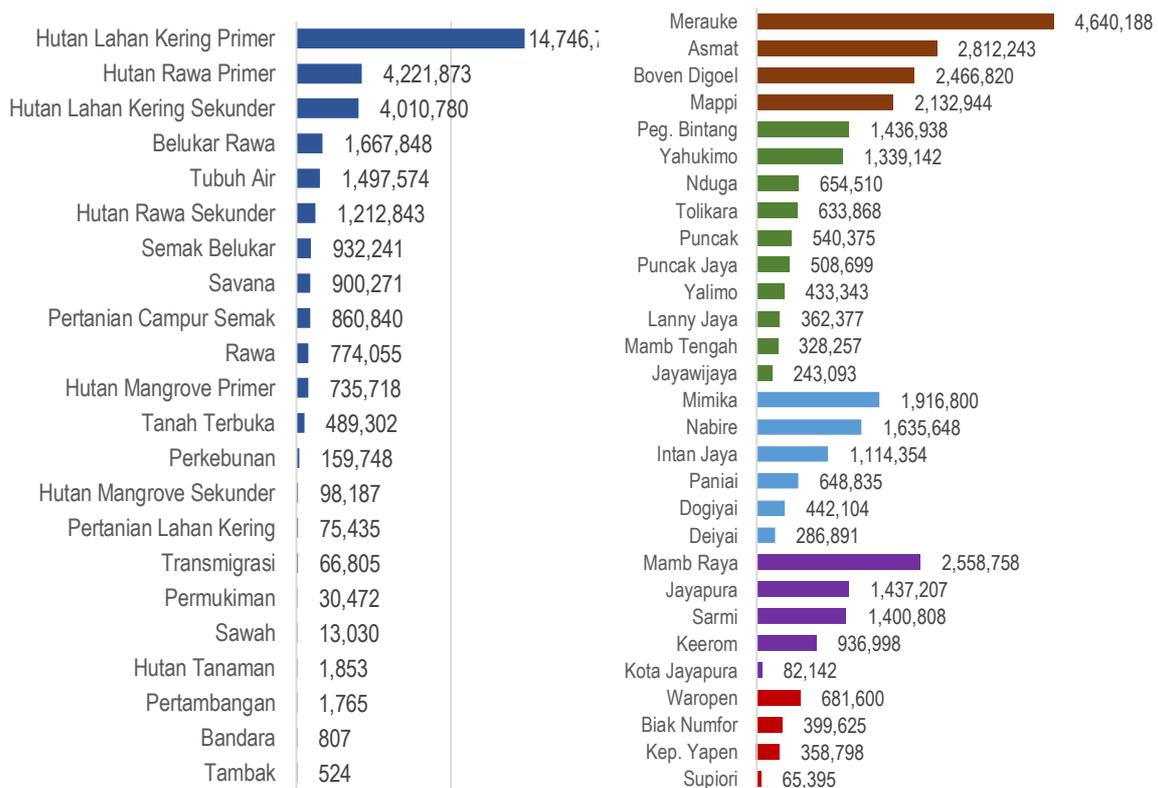
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033, maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang ialah sebagai berikut:

3.1.2.1. Potensi Hutan

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Provinsi Papua memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Gambar 3.10.
Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2017 (dalam hektar)



Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MenLHK/2015 Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Provinsi Papua terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana secara garis besarnya terdiri atas KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang tersebar pada : (1) KPHL Unit II Lintas Nabire, Dogiyai, (2) KPHL Unit VI Lintas Mimika, Dogiyai, Deyiai, (3) KPHL Unit X Lintas Intan Jaya, Waropen, Puncak, (4) KPHP Unit XXII Sarmi, (5) KPHL Unit XLII Lintas Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, (6) KPHP Unit XLIII Lintas Yahukimo, Nduga, (7) KPHL Unit XXXV Lintas Pegunungan Bintang, Yahukimo, (8) KPHP Unit LI Lintas BOVEN DIGUL, Pegunungan Bintang, dan (9) KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.11 di atas.

b. Kawasan Hutan rakyat

Kawasan perutukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Selain itu, kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Pada kawasan ini, kegiatan yang diperbolehkan ialah kegiatan permanen berdasarkan sistem tebang butuh.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Kawasan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kegiatan pada kawasan pertanian adalah pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, kegiatan pertanian skala besar, baik yang

menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus lebih dulu memiliki kajian studi AMDAL.

Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL. Kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang. Kawasan pertanian diharapkan menyediakan kegiatan pertanian berskala besar untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang merupakan penduduk asli setempat, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat. Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kakao dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

3.1.2.2. Potensi Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua memiliki panjang pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110

mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Utara dengan pusat kegiatan di Biak, dan Jayapura;
- Laut Papua Selatan dengan pusat kegiatan di Mimika dan Merauke.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

b. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut:

1. Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura;

2. Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabuapten Sarmi dan Waropen;
3. Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura, serta Kota Jayapura.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya.

3.1.2.3. Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (*Australia Plate*) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate*) yang bergerak ke arah Barat. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten / Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
Kota Jayapura	S.Numbai, Kodam	Emas
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas
	S. APO	Emas
	S. Entrop	Emas
	S. Perumnas IV	Emas
	S. Borgonjie	Emas
	S. Kujabu, Waena	Emas
Jayapura	Sentani	Kobal
		Tungsten
		Nikel
		Asbes
	S. Kemiri	Emas
	Sentani	Emas
	S. Deyau, Sentani	Emas
	S. Sawe Sentani	Emas
	S. Ayapo Sentani	Emas
	S. Tami	Krom
	Tg. Tanahmerah	Talk
Waris	Emas, tembaga, timah hitam	

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
	Web	Emas, perak
	Arso	Krom, batubara
	Depapre	Marmer
	Bonggo	Batubara
	Genyem	Batubara
	Siduarsi	Nikel Laterit
	S.Pis dan S.Pas	Emas
	Senggi	Tembaga, timah hitam
Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Assolokobal	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Asologaima	Batubara
	Borme Utara	Emas
	Okbibab	Tungsten
	Soba	Timbal-Seng
	Holuwan	Timbal-Seng
	Bokondini	Tembaga, emas
	Tiom	Emas, batu garam
	Mbua	Batubara
	Nalca	Emas
	Dabera	Emas, tembaga
	Aboyi	Emas, molibdenum
Nabire	Yaur	Pasir kuarsa, granit, marmer
	Logari	Emas
	S. Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin
	Jali Bumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Haiura	Emas, tembaga
	Wapoga	Emas
Biak Numfor	Supiori	Emas, Batu Kapur
	Korido	Kalsit
	Biak	Fosfat, Pasir Besi
Kepualauan Yapen	Yapen	Pasir Besi
	P. Num	Nikel
Waropen	Waropen Bawah	Emas
	Waropen Atas	Batu bara
Merauke	Jair	Emas, perak
	Mediptana	Tembaga, timah hitam, seng
	Kuoh	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, tembaga
	Ilaga	Arsenit, tembaga, emas, perak
Paniai	Enarotali	Pasir kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Kemabu	Tembaga, Emas
	Uwagimamo	Emas, tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, emas
	Komopa	Tembaga, emas
Mimika	Tembagapura	Tembaga, perak, emas

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan potensi geologinya, wilayah Papua mempunyai kekayaan bahan galian mineral yang sangat besar dan potensial. Mulai dari emas, tembaga, nikel, timah, batu kapur, gamping, dan sebagainya tersedia di wilayah ini. Akan tetapi, meskipun kekayaan mineral tersebut sudah teridentifikasi sejak lama, namun hanya sedikit wilayah yang dapat memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya di Kabupaten Mimika yang memiliki potensi tembaga dan emas terbesar di dunia yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan multinasional yaitu PT. Freeport Indonesia. Sedangkan di daerah-daerah penghasil emas lainnya seperti di Paniai dan Nabire lebih banyak dikelola oleh penambangan rakyat dengan jumlah yang sangat kecil.

Eksplorasi pertambangan di Papua sangat berisiko. Ditambah lagi cadangannya berada di lokasi-lokasi terpencil yang minim infrastruktur, tersembunyi di hutan dan pegunungan. Pada saat eksplorasi, membutuhkan teknik khusus untuk menemukan cadangan mineral di Papua. Wilayah pertambangan secara topografi sangat sulit sehingga tak mudah merancang infrastruktur untuk tambang. Semua kondisi ini menjadi kendala bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan mineral. Sehingga perusahaan besar pertambangan yang ada masih sangat sedikit. Investasi pertambangan di Papua perlu dalam skala besar dengan resiko bisnis tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.

3.1.2.4. Pariwisata

Provinsi Papua memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu kawasan wisata bahari, kawasan wisata air terjun, kawasan wisata

pulau, kawasan wisata budaya, kawasan wisata sejarah, kawasan wisata religi, dan kawasan wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

3.1.3. Aspek Demografi

Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Baik itu di tahun 2010 maupun 2019 bentuk piramida penduduk Provinsi Papua kurang signifikan mengalami perubahan. Lihat Gambar 3.12 berikut ini.

Gambar 3.12.
Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2019



[a] Piramida Tahun 2010

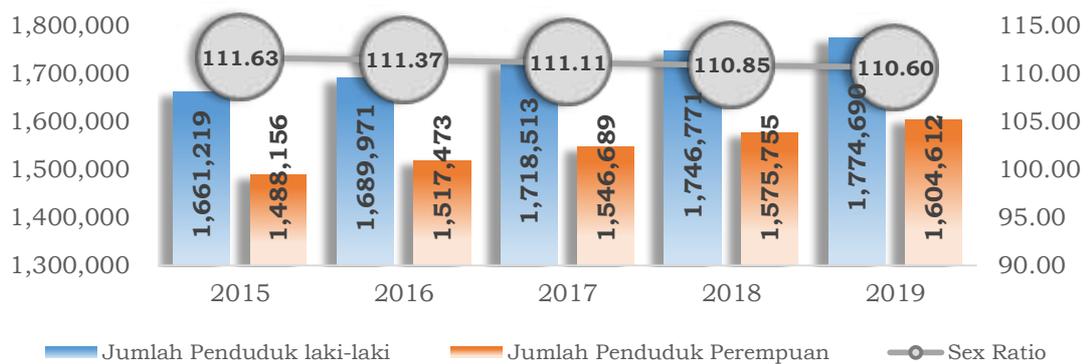
[b] Piramida Tahun 2019

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Penduduk usia muda (0-29 tahun) masih dominan, namun dengan kecenderungan tingkat kelahiran bayi semakin meningkat di tahun 2019. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 15-44 tahun mengindikasikan bahwa penduduk usia

yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida yang tajam diantara tahun 2010 dan tahun 2019 memvisualisasikan bahwa usia harapan hidup di Provinsi Papua masih berkisar diantara 65-69 tahun, dan ada kecenderungan usia harapan hidup untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan di tahun 2019.

Gambar 3.13.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Kemudian dari persebaran penduduk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua terlihat tidak merata. Terdapat kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah yang sangat luas namun jumlah penduduk yang berada di kabupaten/kota tersebut sedikit, sebaliknya ada kabupaten/kota dengan luas wilayah yang kecil tetapi memiliki jumlah penduduk yang besar. Daerah dengan penduduk terbesar, terlihat di kota Jayapura, dengan tingkat kepadatannya tertinggi di Provinsi Papua di tahun 2019 sebesar 315,90 jiwa per km² luas wilayah. Adapun yang paling rendah di Kabupaten Mamberamo Raya, hanya sebesar 0,90 jiwa per km² (lihat Tabel 3.10).

Tabel 3.10.
Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2019

Wilayah Adat	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk 2019 (jiwa)	Kepadatan 2019 (jiwa/km ²)	Pertumbuhan 2019 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
Anim Ha	Merauke	227.411	4,80	0,75	104,29
	Boven Digoel	217.887	2,80	2,21	114,15
	Mappi	103.292	4,50	3,71	100,58
	Asmat	97.490	4,00	1,97	96,60

Wilayah Adat	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk 2019 (jiwa)	Kepadatan 2019 (jiwa/km2)	Pertumbuhan 2019 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
	Total/Rata-rata	646.080	4,03	2,16	103,91
La Pago	Jayawijaya	217.887	93,50	1,35	103,86
	Puncak Jaya	129.300	52,90	2,53	128,51
	Yahukimo	190.887	12,70	0,95	103,07
	Peg. Bintang	75.788	5,20	1,87	111,85
	Tolikara	139.111	22,60	1,03	116,66
	Nduga	98.595	16,90	1,11	122,65
	Lanny Jaya	178.995	52,00	0,74	113,38
	Mamb. Tengah	48.201	14,20	0,23	110,71
	Yalimo	62.605	17,10	2,44	118,94
	Puncak	113.204	20,20	1,82	108,05
		Total/Rata-rata	1.254.573	30,73	1,41
Mee Pago	Nabire	150.308	33,00	1,61	109,92
	Paniai	177.410	8,60	2,32	106,49
	Mimika	219.689	95,50	1,95	124,19
	Dogiyai	97.902	21,70	1,36	103,53
	Intan Jaya	49.293	5,30	0,99	102,07
	Deiyai	73.199	31,50	0,98	105,64
		Total/Rata-rata	767.801	32,60	1,54
Saireri	Kep. Yapen	101.204	20,50	3,89	106,57
	Biak Numfor	152.401	11,70	2,69	105,12
	Waropen	31.514	5,90	2,95	117,19
	Supiori	20.710	32,70	3,46	119,73
		Total/Rata-rata	305.829	17,70	3,25
Mamta	Jayapura	131.802	9,20	2,50	109,82
	Sarmi	40.515	2,90	2,81	122,38
	Keerom	57.100	6,30	2,33	117,94
	Mamb. Raya	24.086	0,90	3,34	113,28
	Kota Jayapura	300.192	315,90	0,81	115,91
		Total/Rata-rata	553.695	67,04	2,36
Provinsi Papua		3.379.302	10,70	1,71	110,60

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen selama tahun 2015-2019 terlihat paling tinggi di Provinsi Papua bersama dengan Kabupaten Mappi, Supiori dan Mamberamo Raya. Laju pertumbuhan penduduk di 4 (empat) kabupaten tersebut berkisar diantara 3,25-3,89% per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang terendah di Kabupaten Mamberamo Tengah hanya sebesar 0,23% per tahun untuk periode yang sama.

Jika diperhatikan pada perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, terlihat di seluruh kabupaten/kota wilayah Papua mempunyai angka Rasio Sex di atas 100, terkecuali Kabupaten Asmat yang memiliki Rasio Sex di bawah 100 yakni 96,60 laki-laki per 100 perempuan, yang mengindikasikan bahwa diantara jumlah penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa terdapat penduduk laki-laki sebanyak 97 jiwa. Dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sementara daerah dengan angka rasio sex yang tertinggi adalah Kabupaten Nduga mencapai 125,51 laki-laki per 100 perempuan.

Ditinjau berdasarkan wilayah adat, diketahui bahwa wilayah yang paling banyak jumlah penduduknya adalah La Pago yakni sebanyak 1.254.573 jiwa, dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 1,41% per tahun selama periode 2015-2019, serta kepadatan penduduk mencapai 30,73 per km², dan angka Rasio Sex sebesar 113,77 laki-laki per 100 perempuan. Adapun wilayah adat yang memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Saireri (3,25% per tahun), dengan total penduduk 382.286 jiwa yang terindikasi paling rendah untuk seluruh wilayah pembangunan. Wilayah Mamta dapat dikatakan merupakan wilayah pembangunan yang paling padat penduduknya, rata-rata sekitar 67,04 jiwa per km², namun dengan pertumbuhannya terbilang cukup rendah bersama wilayah Anim Ha, La Pago dan Mee Pago.

3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Provinsi Papua dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan komponen untuk melihat jumlah nilai tambah barang dan jasa yang

dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, yang mana untuk pengukuran pertumbuhannya lebih jauh dapat dipisahkan untuk wilayah Papua menjadi pertumbuhan PDRB dengan sektor pertambangan dan tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi Papua dengan menyertakan sektor pertambangan (DT) berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan khususnya pada tahun 2018-2019 (lihat Gambar 3.14).

Gambar 3. 14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan dan Tanpa Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2015-2019

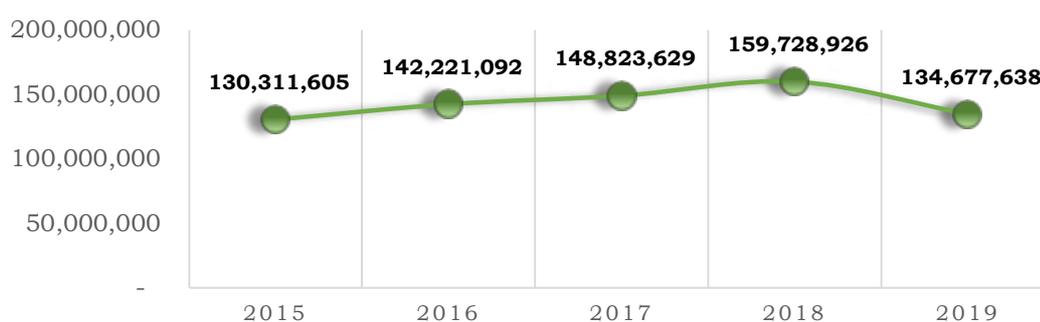


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, pertumbuhan ekonomi dengan sektor pertambangan cenderung mengalami penurunan dan terlihat fluktuatif dalam periode 2015-2019, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,56% setiap tahunnya. Meskipun demikian, tercatat terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,14% namun terjadi penurunan di tahun 2017 sebesar -4,50% yaitu sebesar 4,64%. Sedangkan, pertumbuhan PRDRB tanpa tambang dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat cenderung terus mengalami penurunan, terlihat pertumbuhan PDRB tanpa tambang mengalami penurunan dengan rata-rata mencapai -0,69% setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 tercatat pertumbuhan PDRB tanpa tambang di Provinsi Papua merupakan capaian terendah dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu tercatat sebesar 5,03%, kemudian pertumbuhan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi di tahun 2015 (7,78%). Adanya penurunan pertumbuhan PDRB tanpa tambang di Provinsi Papua terindikasi adanya

penurunan perkembangan pada beberapa sub sektor di antaranya adalah (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Industri Pengolahan, (3) Pengadaan Listrik dan Gas, (4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (5) Informasi dan Komunikasi, (6) Jasa Keuangan dan Asuransi, dan (7) Jasa Perusahaan. Selanjutnya, perkembangan PDRB dengan harga konstan Provinsi Papua selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 15
PDRB Dengan Harga Konstan 2010 Provinsi Papua
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

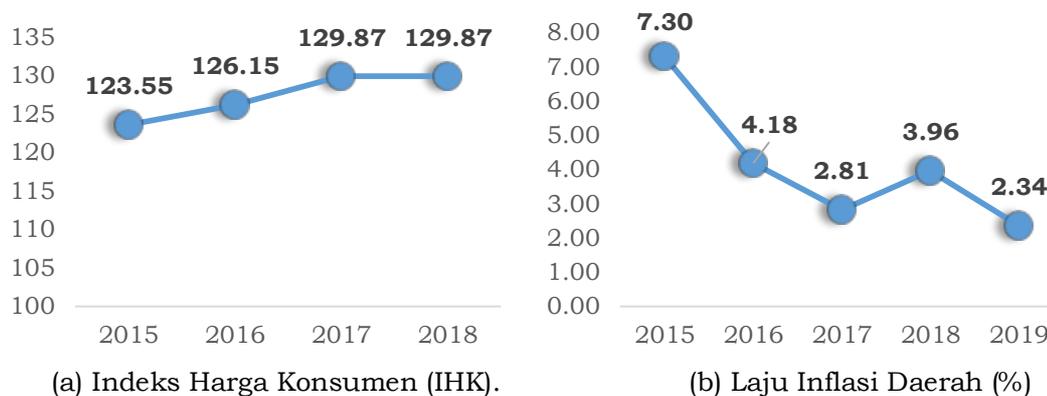
Dari tabel di atas, tercatat nilai PDRB dengan harga konstan Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 nilai PDRB HK adalah sebesar Rp. 130,31 juta kemudian meningkat sebesar Rp. 1,90 juta menjadi Rp. 142,22 juta pada tahun 2016, selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi Rp.159,72 juta. Namun pada periode 2018-2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -Rp.25,01 juta yaitu menjadi Rp.134,68 juta.

3.2.2. Indeks Harga Konsumen (IDHK) dan Laju Inflasi

Sepanjang tahun 2015-2019, tercatat harga-harga di Provinsi Papua mengalami penurunan dan cenderung mengalami fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2015 inflasi Provinsi Papua adalah sebesar 7,30%, kemudian menurun sangat signifikan sebanyak -3,12 poin yaitu sebesar 4,18% di tahun 2016. Selanjutnya terjadi lagi penurunan dalam periode 2016-2017 yaitu sebesar -1,37 poin menjadi 2,81% di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 1,15 poin, lalu kembali terjadi penurunan pada tahun 2018-2019 sebanyak -1,62 poin dan

sampai pada tahun 2019 inflasi Provinsi Papua tercatat adalah sebesar 2,34%. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan harga-harga yang cukup tinggi pada beberapa daerah tertentu khususnya pada wilayah La Pago dan Mee Pago. Selanjutnya dengan terus menurunnya harga-harga di Papua, hal tersebut justru berbeda dengan kondisi indeks harga konsumen (IHK) di Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh, IHK pada tahun 2015 adalah sebesar 123,55 kemudian terjadi naik yang sebesar 2,6 poin yaitu sebesar 126,15 pada tahun 2016. Selanjutnya meningkat pada tahun 2017-2018 tercatat terus masing-masing sebesar 129,87. Tercatat sampai dengan tahun 2018 IHK Provinsi Papua adalah sebesar 129,87, yang jika diperhatikan nilainya mengalami peningkatan dari tahun awal 2015. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 16
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.2.3. Pendapatan Per Kapita

Secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua tanpa tambang mengalami peningkatan positif. Sebaliknya, PDRB perkapita dengan tambang perkembangannya menunjukkan tren negatif dari tahun 2015-2019. Secara keseluruhan rata-rata pendapatan per kapita dengan tambang adalah sebesar Rp. 43,83 juta per tahun, dimana PDRB per kapita dengan tambang pada

tahun 2015 tercatat sebesar Rp.41,37 juta rupiah menjadi Rp.39,85 juta pada tahun 2019.

Gambar 3. 17
Pendapatan Per Kapita Dengan Tambang dan Tanpa Tambang
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



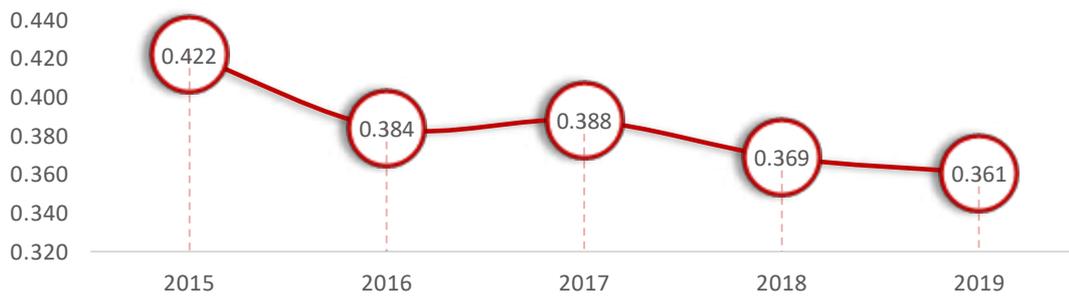
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Selanjutnya, Perhitungan pendapatan per kapita juga dapat dilakukan tanpa memasukan sektor pertambangan. Dalam hal ini, apabila diamati tanpa sektor pertambangan, tampak jelas PDRB per kapita Provinsi Papua menjadi lebih rendah namun memiliki trend. Yang positif. Dengan sektor pertambangan rata-rata PDRB per kapita mencapai Rp.43,3 juta per tahun selama periode 2015-2019, sedangkan tanpa sektor pertambangan hanya sekitar Rp.26,49 juta per tahun. Tercatat pada tahun 2015 pendapatan per kapita tanpa tambang yaitu sebesar Rp.24,57 juta yang meningkat sebanyak Rp.3,72 juta yaitu sebesar Rp.28,30 juta di tahun 2019.

3.2.4. Ratio Gini

Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka Ratio Gini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) dan cenderung mengalami perbaikan, dengan kategori termasuk ketimpangan sedang. Daerah perkotaan dan perdesaan (perdefinisi BPS Provinsi Papua) memiliki distribusi pendapatan yang cukup merata di Provinsi Papua. Fenomena ini tercermin pada kecenderungan angka Rasio Gini perkotaan dan perdesaan yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2019 mencapai 0,36 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 18
Gini Ratio Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Dengan kata lain distribusi pendapatannya menyebar dalam kondisi ketimpangan sedang, dan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 tercatat angka Rasio Gini sebesar 0,36 naik sekitar 0,06 poin bila dibandingkan 2015 sebesar 0,42.

3.2.5. Kemiskinan

Jika mengamati perkembangan tingkat kemiskinan selama tahun 2015-2019, kemiskinan di Provinsi Papua terjadi fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, meskipun sempat di 2016 naik 0,37 poin, namun penurunan kemiskinan bisa dipercepat kembali sampai dengan tahun 2019, hingga menjadi 27,53%. Dengan kata lain Provinsi Papua cukup berhasil mempercepat penurunan kemiskinan kurang lebih 0,16% per tahun selama periode 2015-2019. Tingkat kemiskinan sepanjang tahun 2015-2019, tercatat paling tinggi yaitu pada tahun 2016 yaitu mencapai 28,54%, dan pada tahun 2017 merupakan tingkat kemiskinan paling rendah yaitu sebesar 27,62%. Untuk lebih jelasnya tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk Provinsi Papua selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 19
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Papua Tahun 2015-2019

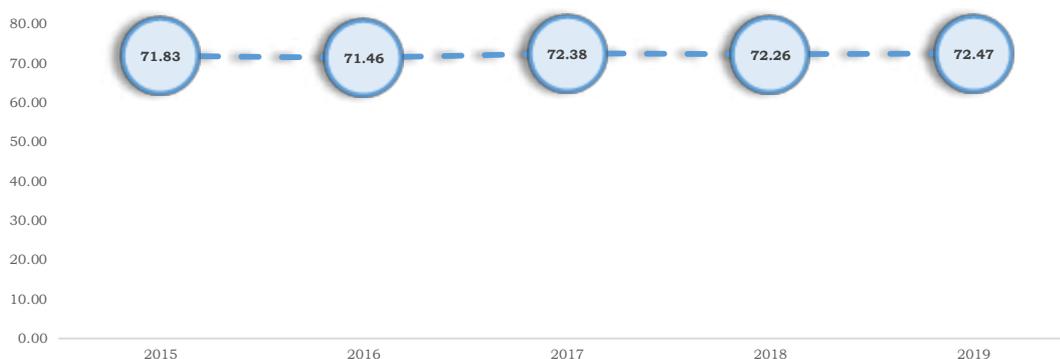


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Selanjutnya, selain persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Provinsi Papua memiliki trend positif dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 penduduk di atas garis kemiskinan adalah sebesar 72,47%. Hal tersebut terindikasi bahwa penduduk di Provinsi Papua semakin keluar dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2015, persentase penduduk berada di atas garis kemiskinan adalah sebesar 71,83%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 71,46%. Kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019, meskipun demikian sempat terjadi penurunan di tahun 2017-2018, dan kembali meningkat lagi di tahun 2019 sebesar -0,21 poin yaitu sebesar 72,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 20
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Di mana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpukul. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 21
Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan, rata-rata turun sebesar 0,41% per tahun. Dengan semakin menurunnya kedalaman kemiskinan (P1) di Papua sepanjang tahun 2015-2019 mengindikasikan semakin kecil rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin membaik. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2015-2019 juga mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 0,30%. Pada tahun 2015 keparahan kemiskinan (P2) adalah sebesar 3,78% meningkat sebanyak 1,18 poin menjadi 2,60% di tahun 2019. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa sebaran penduduk miskin semakin sedikit (tidak timpang).

3.2.6. Kualitas Pembangunan Manusia

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi literasi suatu masyarakat disuatu daerah. Angka melek huruf ini merupakan salah satu komponen penentu tingkat kualitas pembangunan pendidikan di suatu daerah. Oleh karena itu Angka Melek huruf merupakan bagian dari indikator penting pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan. Provinsi Papua tampaknya sangat optimal untuk meningkatkan penduduk yang melek huruf sepanjang tahun 2015-2019.

Gambar 3. 22
Angka Melek Huruf Provinsi Papua Tahun 2015-2019

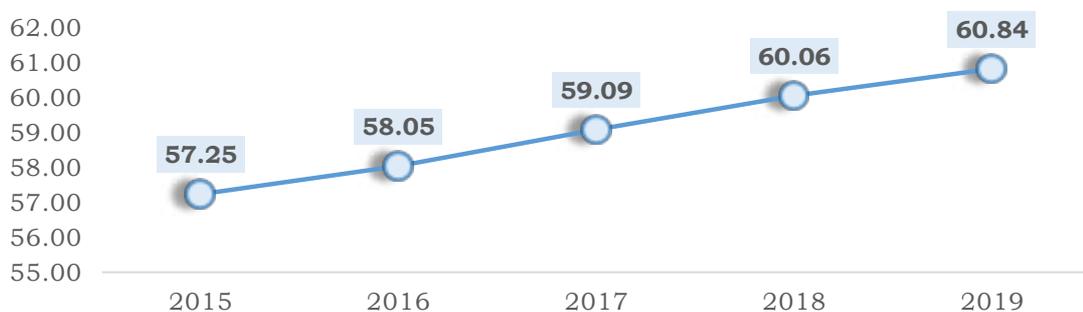


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Dalam gambar di atas terlihat bahwa AMH (Angka Melek Huruf) Provinsi Papua pada tahun 2015 adalah sebesar 70,83% dan meningkat menjadi 78% pada tahun 2019. Dengan demikian, untuk periode 2015-2019 ada kecenderungan peningkatan AMH dengan rata-rata 179% untuk setiap tahunnya.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan data strategis karena dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja Pemerintah.

Gambar 3. 23
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2019

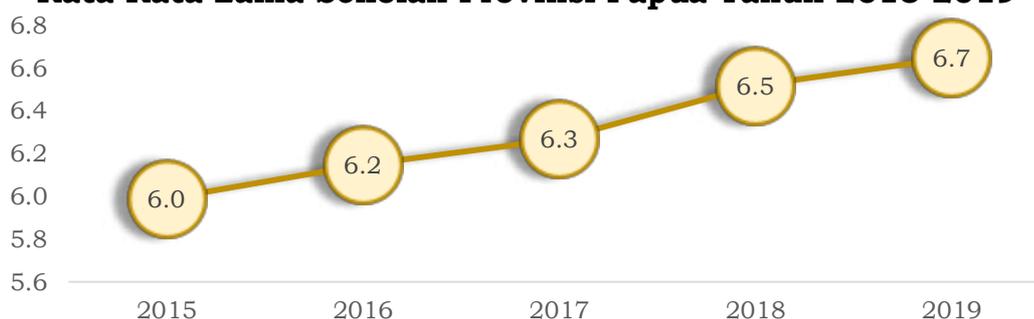


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Pembangunan manusia di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan walaupun kenaikannya tidak signifikan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua mencapai 60,84 poin atau meningkat sebesar 1 poin atau tumbuh sebesar 0,78 persen dibandingkan tahun 2018 dan masuk kategori sedang. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua selama kurun waktu 2015-2019 meningkat 0,90 poin yaitu dari 57,25 poin tahun 2015 menjadi 60,84 poin tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 1,53% pertahun dan sudah bergeser dari IPM kategori rendah masuk dalam kategori sedang.

Selanjutnya, dengan meningkatnya IPM di Papua juga diikuti dengan kenaikan rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

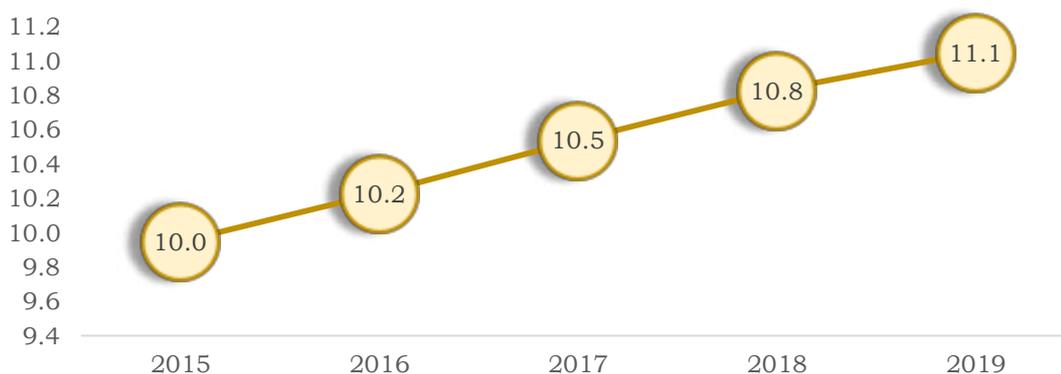
Gambar 3. 24
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tahun 2015 sebesar 6 tahun meningkat 0,2 tahun hingga menjadi 7 tahun (6,7 tahun) pada tahun 2019, artinya Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,7 tahun (kelas 7 atau usia SMP), lebih lama 0,7 tahun dibandingkan tahun 2015 atau lebih lama 0,2 tahun dibandingkan tahun 2018. Selain itu, harapan lama sekolah (HLS) di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

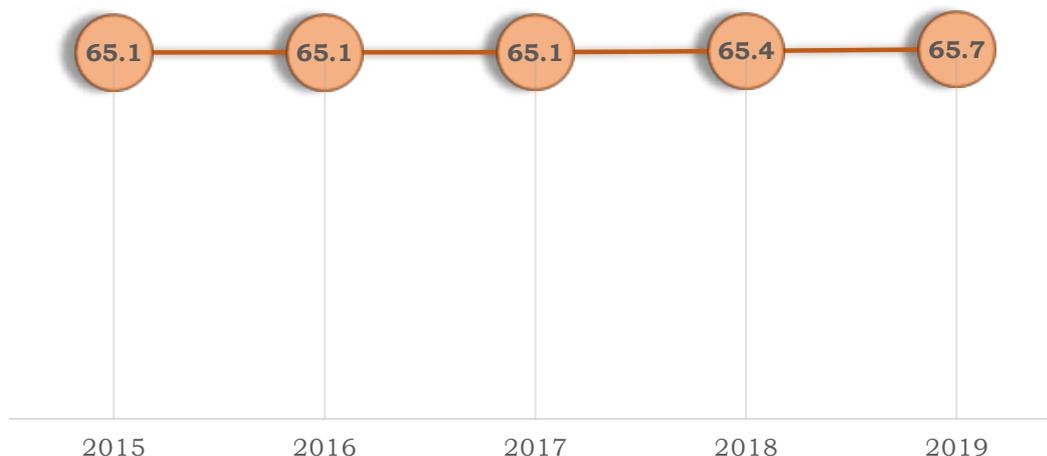
Gambar 3. 25
Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2015 tercatat sebesar 10 tahun (kelas X), sedangkan HLS pada tahun 2019 sebesar 11 tahun artinya anak-anak yang berusia 11 tahun pada tahun 2019 memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 11 tahun (SMA kelas XII) lebih lama 1,1 tahun dibandingkan dengan yang berumur 10 tahun pada tahun 2015 atau lebih lama 0,2 tahun dibandingkan tahun 2018. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua tahun 2015-2019 terlihat tetap yaitu sebesar 65,1 tahun kemudian meningkat 0,6 tahun menjadi 65,7 tahun pada tahun 2019. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Yaitu sebagai berikut:

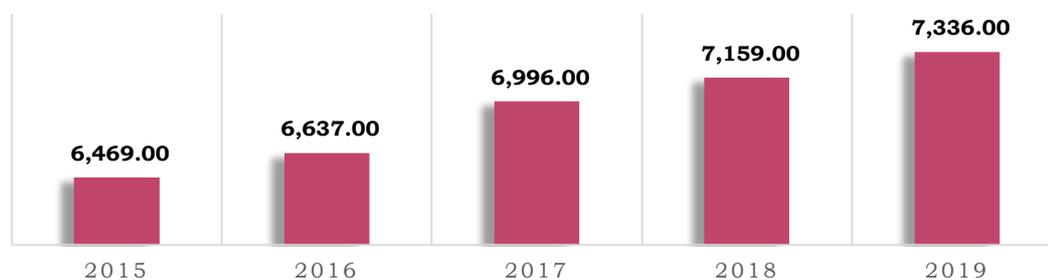
Gambar 3. 26
Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Hal tersebut dapat dikatakan belum terjadi peningkatan yang cukup besar terhadap usia penduduk di Papua, sehingga perlu upaya pemerintah dalam meningkatkan pola hidup sehat pada masyarakat. Pada dimensi ekonomi digunakan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran per kapita Provinsi Papua sepanjang tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 27
Pengeluaran Per Kapita Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada tahun 2019, masyarakat Papua memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp7,336 juta per tahun, meningkat Rp867 ribu dibandingkan pengeluaran tahun 2015 atau meningkat sebesar Rp 177 ribu dibandingkan pengeluaran tahun 2018.

3.2.7. Ketenagakerjaan

Apabila dilihat sepanjang tahun 2015-2019, jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja di provinsi Papua terlihat meningkat, kecuali tahun 2015-2016 yang sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah orang yang menganggur, dari tahun 2015-2019 jumlahnya mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Tercatat jumlah angkatan kerja 1.741.945 jiwa pada tahun 2015 dan orang yang bekerja berjumlah 1.672.480 jiwa, sedangkan pengangguran berjumlah 69.465 jiwa.

Tabel 3. 11
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (jiwa)	2.189.230	2.245.462	2.291.111	2.291.111	3.684.406
Angkatan Kerja (jiwa)	1.741.945	1.722.162	1.762.841	1.835.963	1.842.203
1. Bekerja (jiwa)	1.672.480	1.664.485	1.699.071	1.777.207	1.775.030
2. Penganggur (jiwa)	69.465	57.677	63.770	58.756	67.173
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,57	76,70	76,94	79,11	76,92

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	447.285	523.300	528,27	528,27	552.684
Laju Pertumbuhan yang Bekerja (%)	3,40	-0,48	2,08	4,60	-0,12
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	96,01	95,49	96,38	96,80	96,80**
Rasio Penduduk Bekerja (%)	96,65	96,01	96,01	96,80	96,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	3,99	3,35	3,62	3,20	3,65
Produktivitas Regional Tenaga Kerja (%)	77,92	85,45	87,59	89,91	75,87
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Rasio)	76,40	74,13	74,16	76,58	74,12

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat fluktuatif selama tahun 2015-2019. Dimana untuk TPAK di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut mengalami fluktuatif dan cenderung menurun dengan rata-rata pencapaian sebesar 77,70% per tahun. Pada tahun 2015, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 79,57%, yang kemudian turun di tahun 2016 kemudian kembali meningkat di tahun 2017, kemudian turun kembali di tahun 2018 menjadi 76,7%. Sampai dengan tahun 2019 kondisi TPAK Provinsi Papua adalah sebesar 76,92% yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh jumlah bukan angkatan kerja di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan mulai dari 447.285 jiwa pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 552.684 jiwa di tahun 2019. Kemudian, dari sisi pengangguran, terlihat bahwa jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata mencapai 63.368 orang setiap tahun. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dengan rata-rata mencapai 3,57% pertahun selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019).

Produktifitas regional yang dihasilkan Provinsi Papua selama ini terindikasi cukup tinggi. Rata-rata produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan PDRB di Provinsi Papua selama tahun 2015-2019 adalah rata-rata mencapai 82,79 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Namun demikian cenderung produktifitas tenaga kerja mengalami penurunan pada tahun 2018-2019, sekitar -16,77%.

3.2.8. Kesejahteraan Keluarga

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya. Adapun untuk Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II ini kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi namun kebutuhan untuk pengembangan belum terpenuhi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 28
Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Berdasarkan pentahapan keluarga sejahtera, di Provinsi Papua tercatat persentase keluarga pra sejahtera terlihat cukup stabil dan cenderung menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 tercatat keluarga pra sejahtera di Provinsi Papua mencapai 27,21% menurun menjadi 26,86% pada tahun 2019. Fenomena ini menandakan meskipun sebagian besar keluarga di Provinsi Papua sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi kebutuhan sosial psikologinya masih belum optimal terutama

untuk pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, dan interaksi dengan lingkungan. Dimana pada akhirnya hal ini dapat berdampak terhadap meningkatnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

3.2.9. Potensi Sektor Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, potensi ekonomi di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan baik pada sektor Pertanian/ Perkebunan, Pertanian (Palawija), Perkebunan (Tanamankeras), kelautan dan perikanan, Perdagangan, Industri. Selain itu, terdapat dua sektor yang mengalami fluktuatif dan cenderung menurun, diantaranya ialah sektor kehutanan dan pertambangan. selama ini potensi ekonomi di Provinsi Papua masih didominasi oleh sektor pertambangan yaitu mencapai rata-rata 44,95%. Sedangkan sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap ekonomi masih tergolong sangat rendah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Sektor Ekonomi	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	4,4	4,0	4,0	3,9	4,7	4,2
Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3,6	3,2	3,2	3,1	3,7	3,4
Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	0,8
Sektor kehutanan terhadap PDRB	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4
Sektor pertambangan terhadap PDRB	36,7	38,2	38,0	39,5	24,7	35,4
Sektor pariwisata terhadap PDRB	6,8	6,6	6,7	6,8	8,5	7,1
Sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4,8	4,5	4,5	4,3	5,2	4,7
Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,0	7,9	8,0	7,9	10,0	8,4
Sektor Industri terhadap PDRB	2,0	1,9	1,9	1,9	2,2	2,0

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Selanjutnya, potensi ekonomi di Provinsi Papua selama periode 2015-2019 memiliki trend yang positif dan cenderung terus

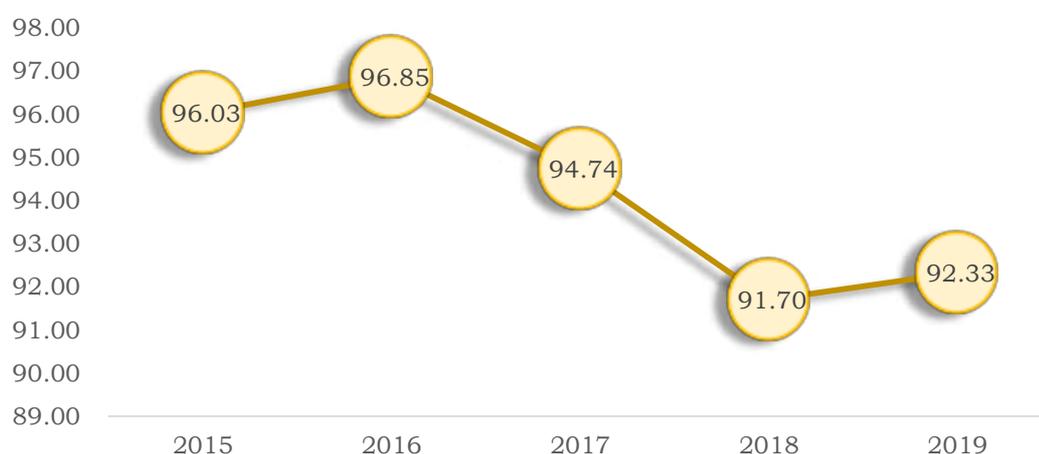
mengalami peningkatan setiap tahunnya, terkecuali pada sektor kehutanan dan pertambangan yang cenderung dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada sektor pertanian/perkebunan tercatat pada tahun 2015 memiliki kontribusi sebesar 4,4% dan meningkat menjadi 4,7% pada tahun 2019, dengan rata-rata kontribusi pertahun sebesar 4,2% per tahun. Kemudian pada sektor pertanian (palwija) tercatat kontribusinya pada tahun 2015 adalah sebesar 3,6% dan meningkat menjadi 3,7%, dengan rata-rata pertahun mencapai 3,4% per tahunnya. Sama halnya dengan sektor Perkebunan (Tanamankeras), kelautan dan perikanan, Perdagangan dan Industri juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3.3. DAYASAING DAERAH

3.3.1. Daya Beli Petani

NTP (Nilai Tukar Pertanian) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada Gambar berikut ini diuraikan perkembangan NTP Provinsi Papua selama tahun 2015–2019. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, NTP Papua menunjukkan kecenderungan yang terus menerus turun, hingga sampai tahun 2019 hanya sebesar 92,33%, padahal pada tahun 2015 bisa mencapai 96,03%.

Gambar 3. 29
Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

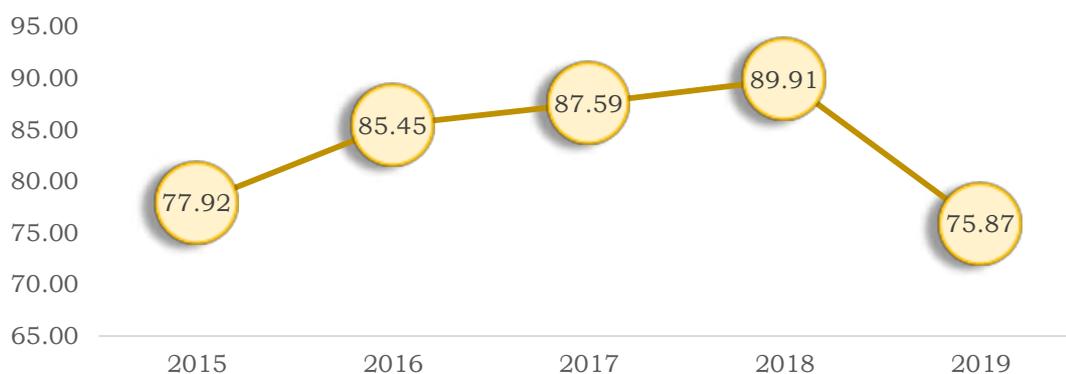
Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa kondisi petani di Papua mengalami defisit terus menerus, mulai tahun 2016, yakni kenaikan harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan

harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibanding tingkat kesejahteraan sebelumnya.

3.3.2. Kemandirian Daerah

Ukuran produktifitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan satu satuan nilai tambah atau PDRB. Perkembangan produktivitas daerah Provinsi Papua selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai -0,2% per tahun, serta rata-rata produktifitas Rp. 83,35 juta per tenaga kerja per tahun. Perhatikan gambar di bawah ini:

Gambar 3. 30
Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2015-2019

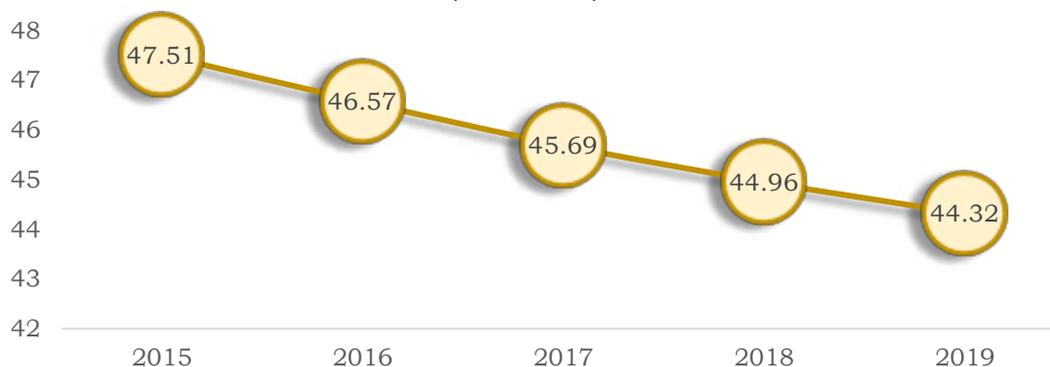


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.3.3. Tingkat ketergantungan Penduduk

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Trend rasio penduduk usia non produktif masih tergolong cukup besar di bandingkan dengan penduduk usia produktif di Provinsi Papua. Tercatat selama 5 (lima) tahun terakhir rasio ketergantungan di Provinsi Papua terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yang artinya ada peningkatan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 31
Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2015-2019
(dalam%)



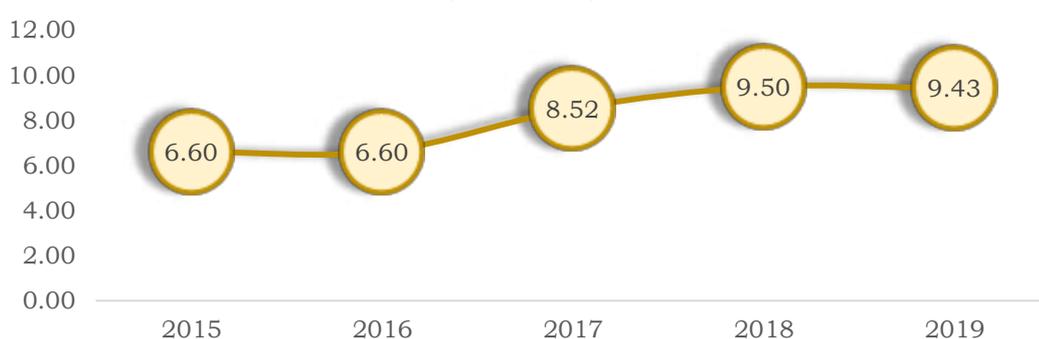
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Tercatat pada tahun 2015 rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 47,51%, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 44,32%.

3.3.4. Angkatan Kerja Yang Berpendidikan Tinggi

Persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi di Provinsi Papua terlihat memiliki trend yang positif dan cenderung meningkat walaupun tergolong cukup rendah. Pertumbuhan persentase angkatan kerja Pendidikan tinggi mencapai 8,13% setiap tahunnya. Meskipun demikian trendnya setiap tahun terus mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 32
Persentase Angkatan Kerja Yang Berpendidikan Tinggi
(SMA/Diploma/PT) Provinsi Papua Tahun 2015-2019
(dalam%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Tercatat pada tahun 2015 persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi adalah sebesar 6,60%, kemudian meningkat sebesar 1,92% menjadi 8,52% di tahun 2017, selanjutnya kembali meningkat hingga tahun 2019 menjadi 9,43%.

3.3.5. Bank dan Lembaga Keuangan

Dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di Provinsi Papua, ini juga mendorong adanya peran bank dalam aktivitas perekonomian tersebut. Ketersediaan Lembaga keuangan Bank di Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2015 jumlah bank mencapai 284 unit, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 327 unit, selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 404 unit, meskipun tercatat pernah terjadi pengurangan sebanyak 3 unit pada periode 201-2018. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gamabar 3.33
Ketersediaan Lembaga Keuangan Bank Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (dalam unit)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Ketersediaan dana perbankan dalam upaya meningkatkan daya saing investasi regional sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kinerja perbankan di suatu daerah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak kolaps (jatuh). Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, tercatat rasio pinjaman pada bank umum di Provinsi Papua terlihat semakin meningkat. sebaliknya, rasio pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) terlihat memiliki trend yang negative atau semakin mengalami penurunan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13.
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Pada Bank Umum dan BPR di Provinsi Papua Tahun 2015-2019

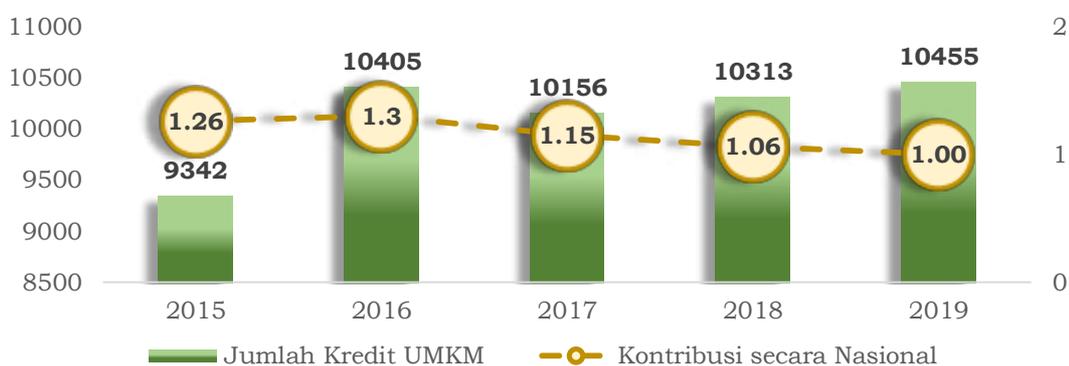
Rasio Pinjaman	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum	61,24	62,82	64,51	66,98	64,73
BPR	264,25	247,70	202,72	211,32	164,35

Sumber: Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat, 2018 (data diolah)

Pada tahun 2015 tercatat rasio pinjaman pada bank umum adalah sebesar 61,24 dan meningkat sebesar 3,49 poin atau 64,73 di tahun 2019. Selanjutnya, pada BPR (Bank Perkreditan Rakyat), kondisinya sangat memprihatinkan, karena rasio LDR BPR setiap tahunnya jauh di atas nilai 100, bahkan lebih dari 200% per tahun (sangat tidak aman), yang mengindikasikan jumlah kredit (pinjaman) jauh lebih besar dibandingkan dana pihak ketiga yang disimpan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka dipastikan dalam lima tahun mendatang banyak BPR yang kolaps. Padahal daya jangkau BPR ini ke pengusaha golongan lemah, dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di daerah perdesaan sangat tinggi sekali.

Oleh karena itu perlu adanya penguatan, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah provinsi melalui kebijakan fiskal untuk menjaga dan melindungi BPR agar tidak kolaps dimasa mendatang. Terlebih lagi jika melihat proporsi penyaluran kredit oleh bank di Provinsi Papua selama ini kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sangat rendah sekali, di bawah 10 triliun rupiah per tahun, dan sekitar 1,4% saja kontribusinya secara nasional, maka BPR menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM di Provinsi Papua. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.34.
Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua
Tahun 2015-2019



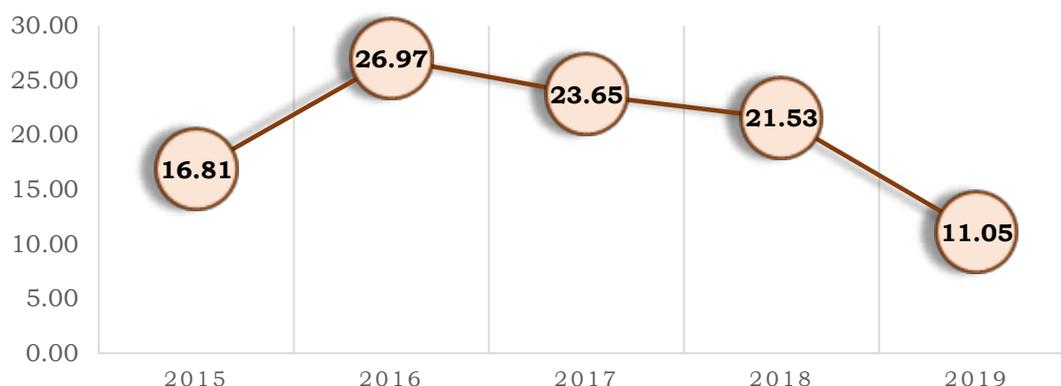
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2020 (data diolah)

3.3.6. Tingkat Keamanan

Tindak pidana terhadap penduduk di Provinsi Papua memiliki trend yang cenderung menurun dan sempat mengalami fluktuatif. Tercatat rasio tindak pidana per 10 ribu penduduk tahun 2015

adalah sebesar 16,81/10 ribu penduduk, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 26,97/10 ribu penduduk, kemudian kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 23,65%, dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 21,53/10 ribu penduduk. Sampai dengan tahun 2019 rasio tindak pidana per 10 ribu penduduk mencapai 11,05 /10 ribu penduduk. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.35
Rasio Tindak Pidana Per 10.000 penduduk menurut Kepolisian Resort (Tingkat Kriminalitas) Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.3.7. Daya Saing Investasi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2 – 4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan. Secara umum nilai ICOR di Provinsi Papua hanya mampu bergerak di bawah 4 poin, bahkan sampai dengan tahun 2019 tercatat mencapai angka -1,75 poin. ICOR sebesar -1,75 mempunyai arti bahwa untuk menciptakan nilai PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar -1,75 rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.36.
Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mampu menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang dapat menguntungkan investor. Fakta ini terekam pada nilai ICOR di setiap daerah yang cenderung lebih besar dari 4 poin, dan mengalami kenaikan rata-rata dalam interval -1,75% sampai dengan 3,98% per tahun selama periode 2015-2019.

3.4. PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan

3.4.1. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar provinsi Papua pada setiap jenjang pendidikan terlihat bervariasi. APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar sepanjang tahun 2015-2019 terlihat mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 93,85%. Kemudian jenjang pendidikan SMP dan SMA juga terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan masing-masing mencapai rata-rata SMP (78,76%) dan SMA/SMK (68,63%), namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat jauh lebih rendah yaitu sampai dengan tahun 2019 adalah

sebesar 78,11% dan 76,33%. Kondisi ini merefleksikan bahwa daya serap penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan tanpa melihat batas usia di provinsi Papua masih rendah.

Tabel 3.14
Angka Partisipasi Kasar
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/PaketA	95,15	94,74	92,94	94,47	91,94
SMP/MTs/PaketB	73,59	72,07	82,20	87,81	78,11
SMA/SMK/MA/PaketC	66,97	66,85	67,94	65,07	76,33

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang drop out atau masih berada di jenjang SMP. Terlihat angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD sebesar 78,56% tahun 2015, meningkat menjadi 78,66% pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2019 meningkat lagi sebesar 79,19%. Angka partisipasi murni ditingkat SMP dan SMA/SMK sampai dengan tahun 2019 juga meningkat masing-masing sebesar 57,19% dan 44,32%. meskipun demikian nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkan tingkat SMP dan SMA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Angka Partisipasi Murni
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Angka Partisipasi Murni	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/PaketA	78,56	78,66	78,83	79,14	79,19
SMP/MTs/PaketB	54,21	54,26	56,13	57,09	57,19
SMA/SMK/MA/PaketC	43,22	4,27	43,48	44,31	44,32

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang sekolah

tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.

3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Papua terlihat mengalami perkembangan yang cukup berarti sepanjang tahun 2015-2019, walaupun dalam perjalanannya sempat turun.

Tabel 3.16
Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Angka Partisipasi Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019
7-12	81,04	81,11	81,80	82,38	82,62
13-15	78,14	78,86	79,09	79,90	80,11
16-18	61,96	62,07	63,35	63,46	62,11

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Angka partisipasi sekolah Provinsi Papua, memang belum mencapai angka yang ideal, terlihat dari akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan 2015 untuk usia 7-12 tahun tercatat 81,04% artinya masih terdapat 18,96% penduduk usia 7-12 yang tidak bersekolah. Tahun 2019, terlihat ada perkembangan positif untuk usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah meningkat menjadi 82,62%, walaupun kenaikannya tidak secara signifikan meningkat. Demikian juga untuk usia 13-15 tahun sampai pada tahun 2019 masih terdapat 80,11% penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam Pendidikan. Sebaliknya, penduduk usia 16-18 tahun terlihat ada perkembangan angka partisipasi sekolah namun angkanya lebih rendah dari penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi.

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APTS) paling tinggi di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2019 adalah APTS SMP yaitu sebesar 1,44%, kemudian diikuti APTS SMA sebesar 2,70% dan yang paling rendah adalah APTS SMA yaitu sebesar 0,79%. Perolehan angka tersebut terbilang sangat kecil, yang artinya masih terdapat siswa/i yang tidak dapat menikmati Pendidikan lebih lanjut. Selengkapnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Angka Putus Sekolah
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Angka Putus Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/PaketA	0,97	0,59	0,62	0,81	2,00
SMP/MTs/PaketB	1,08	0,71	1,27	1,44	2,70
SMA/SMK/MA/PaketC	1,13	0,75	0,86	0,83	0,79

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

5. Angka Mengulang

Secara keseluruhan angka mengulang dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi untuk masing-masing jenjang pendidikan. Tercatat Angka Mengulang di Provinsi Papua tahun 2015 pada tingkat SD sebesar 4,13%, meningkat cukup pesat pada tahun 2019 menjadi 7,88%. Kemudian pada jenjang SMP angka mengulang di tahun 2015 sebesar 2,13% dan meningkat menjadi 7,81% pada tahun 2019, sama halnya juga pada pada tingkat SMA.

Tabel 3.18
Angka Mengulang
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Angka Mengulang	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/PaketA	4,13	3,03	4,02	4,13	7,88
SMP/MTs/PaketB	2,13	0,80	1,48	2,13	7,81
SMA/SMK/MA/PaketC	1,64	0,66	0,70	1,64	7,22

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

6. Angka Kelulusan

Masih terdapat siswa/i pada setiap jenjang Pendidikan di Provinsi Papua yang tidak lulus. Selain itu, tingkat kelulusan Pendidikan per jenjang Pendidikan di Papua memiliki trend yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan khususnya pada

jenjang Pendidikan SD dan SMA. Angka Kelulusan di Provinsi Papua pada tahun 2015 ditingkat SD sebesar 98,60% menurun menjadi 79,44% pada tahun 2019. Sehingga dapat di katakan pada tahun 2019 masih terdapat 20,56% siswa/i yang tidak lulus dan melanjutkan Pendidikan pada jenjang SMP. Untuk selengkapnya dapat dilihat uraian per jenjang Pendidikan berikut ini:

Tabel 3.19
Angka Kelulusan
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Angka Kelulusan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/PaketA	98,60	97,88	98,17	81,61	79,44
SMP/MTs/PaketB	94,38	98,25	96,47	91,89	94,98
SMA/SMK/MA/PaketC	98,12	98,20	98,44	95,78	95,80

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

7. Perkembangan Guru dan Murid

Secara keseluruhan jumlah guru di Provinsi Papua baik Pendidikan SD, SMP, SMA maupun SMK adalah sebesar 33,668 orang pada tahun 2019. Dengan semakin tingginya kebutuhan terhadap Pendidikan di Papua, juga diikuti dengan perkembangan jumlah guru di Papua terlihat cukup pesat dan bahkan pada setiap jenjang Pendidikan terus mengalami peningkatan. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2019 mencapai 18.037 orang, kemudian untuk SMP mencapai 8.315 orang, pendidikan SMA sebesar 4.479 orang dan SMK mencapai 2.837 orang. Dengan semakin meleknya masyarakat terhadap di bidang pendidikan berdampak juga terhadap penambahan jumlah murid sepanjang tahun 2015-2019.

Tabel 3.20.
Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
Sekolah Dasar	16.825	17.667	16.208	16.054	18.037
Sekolah Menengah Pertama	7.331	7.687	7.547	7.752	8.315
Sekolah Menengah Atas	3.971	4.230	4.234	4.313	4.479
Sekolah Menengah Kejuruan	2.502	2.869	2.860	2.825	2.837
Jumlah	30.629	32.453	30.849	30.944	33.668

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Selanjutnya, jika dilihat pada tabel di bawah ini perkembangan jumlah murid per jenjang pendidikan secara keseluruhan semakin bertambah pesat, hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan yang mencapai angka 2,91% setiap tahunnya. Terlihat bahwa di semua jenjang pendidikan terjadi penambahan murid setiap tahunnya. Rata-rata penambahan jumlah murid paling banyak terlihat pada rata-rata pertumbuhan jenjang pendidikan SMA dan SMK yaitu masing-masing sebesar 6,18 persen dan 9,74 persen. Sedangkan jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama masing-masing mencapai 1,87 dan 3,45 persen. Meskipun pertumbuhan sekolah dasar hanya mencapai 3,07 persen, namun dari sisi jumlah murid pendidikan sekolah dasar paling dominan jumlahnya yaitu mencapai 442.845 orang sampai dengan tahun 2019. Kemudian diikuti dengan SMP sebesar 131.812 orang, lalu 36.154 orang untuk SMA, serta 36.154 orang untuk SMK.

Tabel 3.21.
Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
Sekolah Dasar	412.187	445.243	448.483	447.968	442.845
Sekolah Menengah Pertama	115.296	123.823	126.477	125.678	131.812
Sekolah Menengah Atas	53.851	59.126	61.786	63.395	68.344
Sekolah Menengah Kejuruan	25.588	33.144	31.341	32.997	36.154
Jumlah	606.922	661.336	668.087	670.038	679.155

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Secara kewilayahan, pada jenjang pendidikan sekolah dasar terlihat bahwa sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 belum merata. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama sebaran guru berpendidikan tinggi sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa daerah yang sebarannya masih terbilang cukup rendah. Sedangkan, pendidikan menengah tercatat terdapat beberapa daerah dengan sebaran mencapai angka sempurna sampai tahun 2017 di antaranya adalah Kabupaten Intan Jaya, Membramo Tengah dan Memberamo Raya. Namun masih terdapat juga daerah yang memiliki kualifikasi guru berpendidikan tinggi bahkan sangat rendah di Provinsi Papua. Secara keseluruhan, sebaran kualifikasi guru berpendidikan tinggi baik pada pendidikan

dasar dan menengah masih perlu diperhatikan. Rata-rata sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 yang cukup rendah paling banyak terdapat pada daerah yang sulit akses tepatnya pada beberapa wilayah pegunungan tengah.

Tabel 3.22.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Papua	54,94	58,89	84,36	87,21	94,71	59,68
Jayapura	65,73	73,77	89,35	91,90	96,91	61,14
Sarmi	77,04	71,92	89,10	91,67	97,06	69,92
Keerom	73,98	75,96	85,57	84,95	96,81	69,11
Memberamo Raya	18,56	20,67	82,50	85,86	94,59	100,00
Kota Jayapura	79,11	83,10	91,87	93,01	96,70	55,93
Jaya Wijaya	45,92	53,89	82,26	86,82	95,33	64,80
Puncak Jaya	28,03	55,24	86,57	90,16	97,62	58,49
Yahukimo	26,25	38,70	76,97	75,00	97,67	76,56
Pegunungan Bintang	54,35	48,25	95,65	92,05	100,00	59,32
Tolikara	44,17	47,34	54,35	63,09	94,92	81,97
Nduga	34,02	41,12	52,94	62,32	84,62	75,00
Lanny Jaya	20,71	29,71	42,86	69,12	90,00	93,10
Membramo Tengah	23,40	26,35	50,88	68,75	92,31	100,00
Yalimo	28,74	43,00	56,73	68,75	92,11	61,67
Puncak	36,76	40,31	86,05	91,94	96,36	70,91
Nabire	55,00	58,84	88,26	90,28	96,29	57,00
Paniai	45,90	46,61	81,58	82,21	86,89	57,38
Mimika	69,63	72,98	92,98	94,09	94,33	38,92
Dogiyai	44,41	37,57	83,59	86,03	95,24	53,66
Deiyai	25,07	28,35	75,47	79,12	92,31	55,06
Intan Jaya	53,57	67,00	87,50	95,38	100,00	100,00
Biak Numfor	42,44	54,32	75,00	82,45	89,57	67,47
Kepulauan Yapen	58,96	60,22	85,15	86,15	95,73	64,33
Waropen	51,42	53,18	85,28	85,96	88,46	62,10
Supiori	74,81	83,71	86,78	92,31	91,06	85,47
Merauke	57,36	62,70	90,91	92,71	93,43	52,04
Boven Digoel	59,82	55,61	84,95	89,52	93,24	48,94
Mappi	34,90	34,34	86,91	84,78	97,86	68,39
Asmat	47,54	50,87	92,50	88,32	97,22	90,76

Sumber: Kemendikbud RI (2017) dan Bappeda Papua (2018)

8. Fasilitas Pendidikan

Dengan semakin tingginya kebutuhan akses terhadap Pendidikan di Papua, tidak diikuti dengan kondisi fasilitas Pendidikan yang tersedia. Hal tersebut tercermin dengan masih sangat rendahnya kondisi fasilitas sekolah kondisi baik sepanjang tahun 2015-2019. Persentase sekolah dalam kondisi baik di Provinsi Papua pada tahun 2015-2019 untuk tingkat SD tercatat tidak banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan, dengan

rata-rata per tahun hanya mencapai 22,59%. Kondisi yang sama juga terjadi pada kondisi fasilitas Pendidikan untuk SMP dan SMA tergolong masih sangat rendah sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Sekolah dalam Kondisi Baik
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Sekolah Kondisi Baik	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/PaketA	22,48	22,48	22,48	22,77	22,75
SMP/MTs/PaketB	23,93	23,93	22,37	22,46	22,46
SMA/SMK/MA/PaketC	37,30	37,30	33,87	32,75	33,06

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.4.2. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Di Provinsi Papua masih terdapat kasus kematian bayi pada periode 2015-2019, bahkan di tahun 2015 tercatat AKB tergolong sangat tinggi. Diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun cukup pesat hingga tahun 2019. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat. Tercatat pada tahun 2015 kasus AKB mencapai hingga 44 kasus AKB per 1000 kelahiran, kemudian turun di tahun 2016 sebanyak 8 kasus, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 7 kasus per 1000 kelahiran.

Gambar 3.37
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

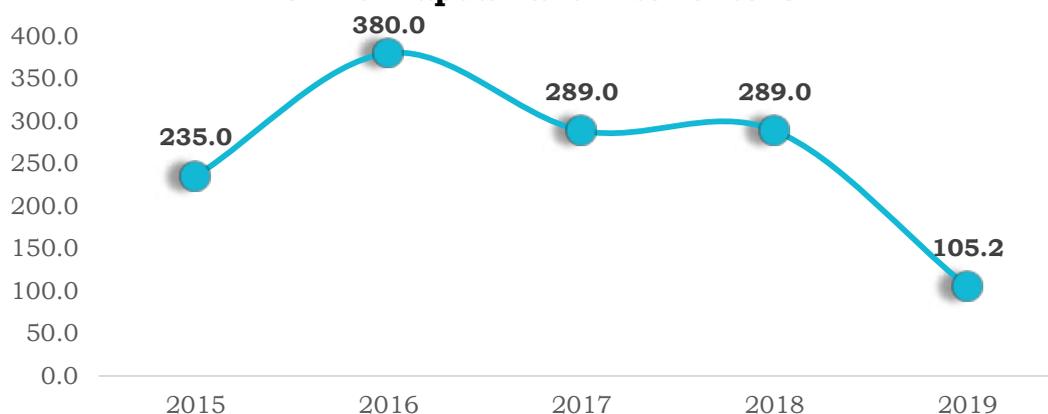


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

2. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Gambar 3. 38
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020 (data diolah)

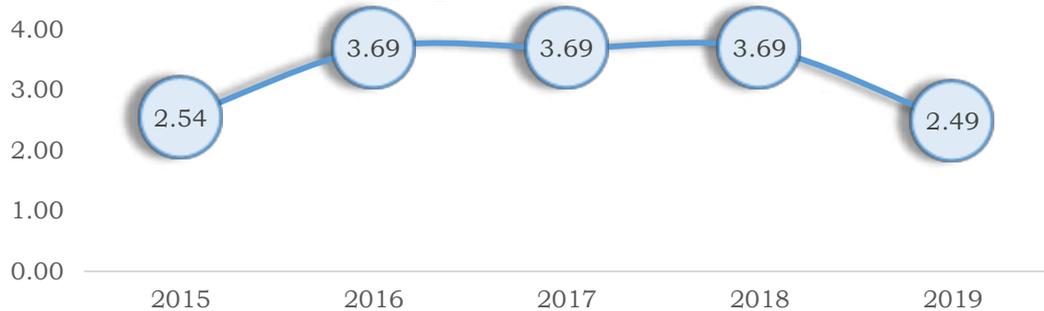
Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi dan cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2015 kasus AKI mencapai 235 kasus, sampai dengan tahun 2019 kasus AKI menurun hingga tersisa 105 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi kasus AKI di Provinsi Papua untuk tahun-tahun yang akan datang.

3. Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Rasio puskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua pada tahun 2015 menunjukkan 3 puskesmas melayani 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sebanyak 4 puskesmas melayani 10.000 penduduk. Namun sampai pada tahun 2019 rasio puskesmas mengalami penurunan, hal tersebut terindikasi dengan semakin bertambahnya jumlah

penduduk yang semakin tinggi sehingga pelayanan terhadap puskesmas juga semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

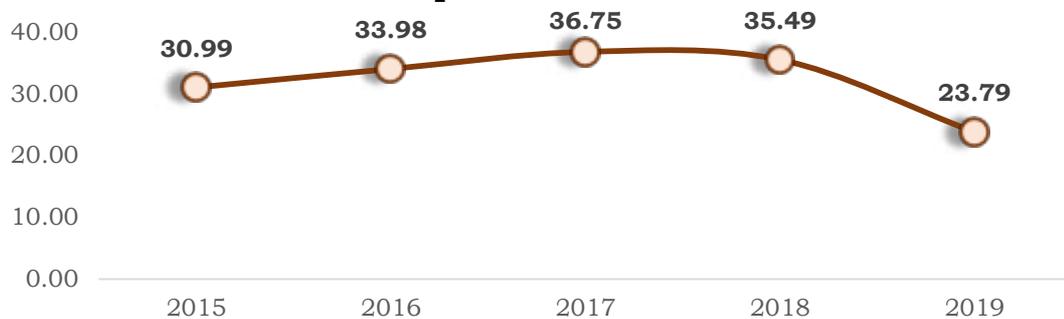
Gambar 3.39
Rasio Puskesmas Per 10.000 penduduk
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Selanjutnya, pelayanan dokter terhadap 100 ribu penduduk. Juga terindikasi semakin mengalami penurunan. Provinsi Papua pada tahun 2015 menunjukkan 31 dokter dapat melayani 100 ribu penduduk dan terus menurun hingga tahun 2019 sebanyak 24 dokter melayani 100 ribu penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

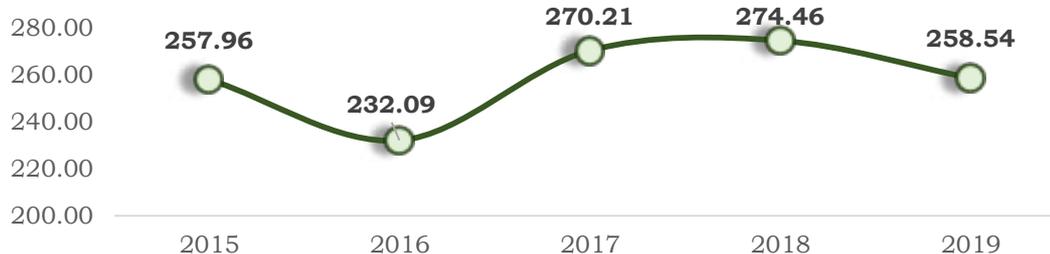
Gambar 3.40
Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Ketersediaan tenaga medis di Provinsi Papua sepanjang tahun 2015-2019 tercatat tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terdapat sebanyak 258 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 sebanyak 232 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk. Kemudian hingga tahun 2019 terdapat sebanyak 259 tenaga medis per 100 ribu penduduk yang jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 274 di tahun 2018.

Gambar 3.41
Rasio Tenaga Medis Per 100 Ribu Penduduk
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

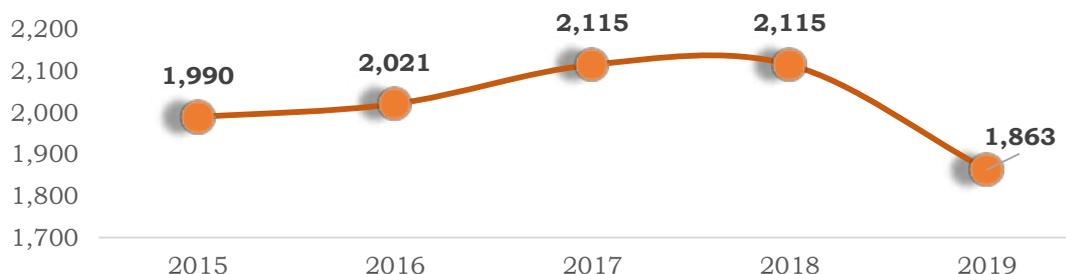


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

4. Asupan Kalori dan Protein

Konsumsi kalori atau protein adalah banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Rata-rata wanita memerlukan asupan sebanyak 2000 kalori per harinya, sedangkan pria rata-rata membutuhkan asupan sebanyak 2500 kalori per hari. Asupan kalori Provinsi Papua dalam rentang waktu 5 tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2019.

Gambar 3.42
Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



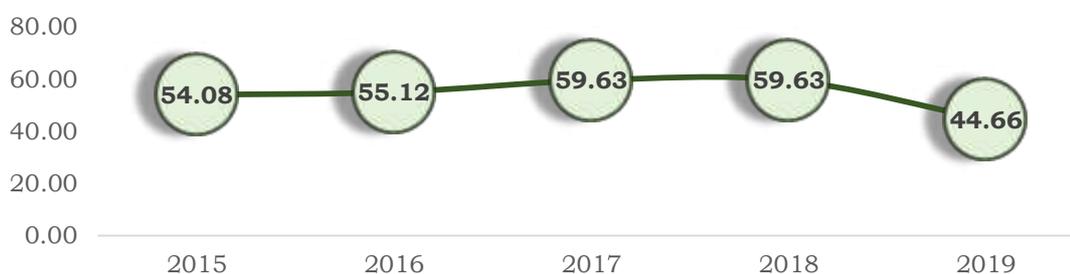
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Pada tahun 2015 asupan kalori mencapai 1.990 kkal/kapita/hari dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2018 menjadi 2.115 kkal/kapita/hari, namun terjadi penurunan di tahun 2019 sebesar 279 poin menjadi 1.863 kkal/kapita/hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa asupan kalori di Provinsi Papua belum memenuhi standar yang ditentukan.

Selain itu, rata-rata konsumsi protein per kapita/hari di provinsi Papua sepanjang tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 tercatat konsumsi protein adalah sebesar 54,08 per kapita/hari, kemudian terlihat meningkat di tahun 2016 menjadi 55,12 per kapita/hari, dan meningkat lagi

pada tahun 2017-2018 masing-masing sebesar 59,63 per kapita/hari. Sedangkan pada kondisi terakhir di tahun 2019 terlihat mengalami penurunan hingga 44,66 per kapita/hari dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh keluarga di Provinsi Papua rata-rata mengkonsumsi protein per hari

Gambar 3.43
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

5. Perkembangan Penanganan Penyakit Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit endemis di Provinsi Papua, meskipun nilainya tidak terlalu signifikan di semua wilayah di 29 kabupaten/kota di Papua. Dari gambar yang terlihat di bawah ini, situasi penyakit malaria di Provinsi Papua terbilang cukup tinggi bahkan tercatat paling tinggi pada tingkat nasional. Selain itu, penyakit malaria di Provinsi Papua cenderung meningkat sepanjang tahun 2015-2019.

Gambar 3.44.
Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



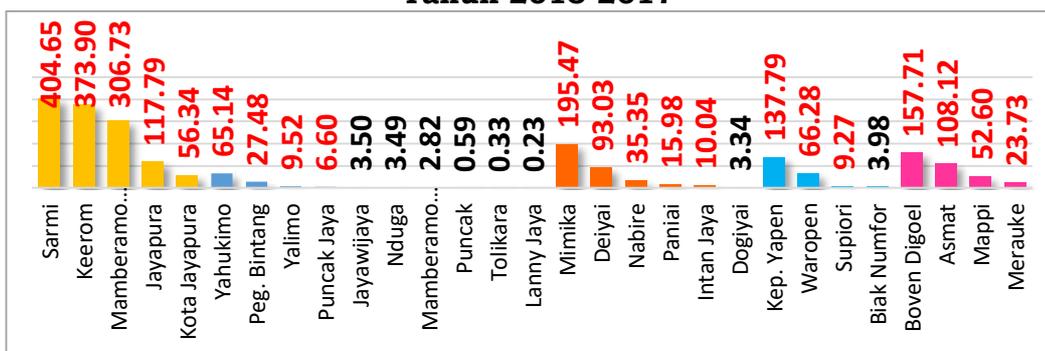
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

Keterangan: Annual Parasite Incidence (API) atau angka penderita malaria per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2015 tercatat kasus penderita penyakit malaria mencapai 25 kasus per 1.000 penduduk, dan terjadi peningkatan. Di tahun 2016 yang cukup tinggi yaitu. Sebanyak 59 kasus per. 1.000 penduduk. Meskipun demikian, angka penderita sepanjang tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Tercatat sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 35 kasus/1.000 penduduk yang masih

lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya. Angka Penderita Malaria tertinggi di papua terdapat pada beberapa daerah seperti Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen, Intan Jaya, Paniai, Nabire, Deiyai, Mimika, Puncak Jaya, Yalimo Pegunungan Bintang, Yahukimo, Kota Jayapura, Jayapura, Mamberamo Raya, Keerom dan Sarmi dengan kisaran 6,60-404,65%. Sedangkan daerah dengan angka penderita malaria terendah adalah Lanny Jaya, Tolikara dan Puncak dengan kisaran API sebesar 0,23 sampai dengan 0,59%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.45.
Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017

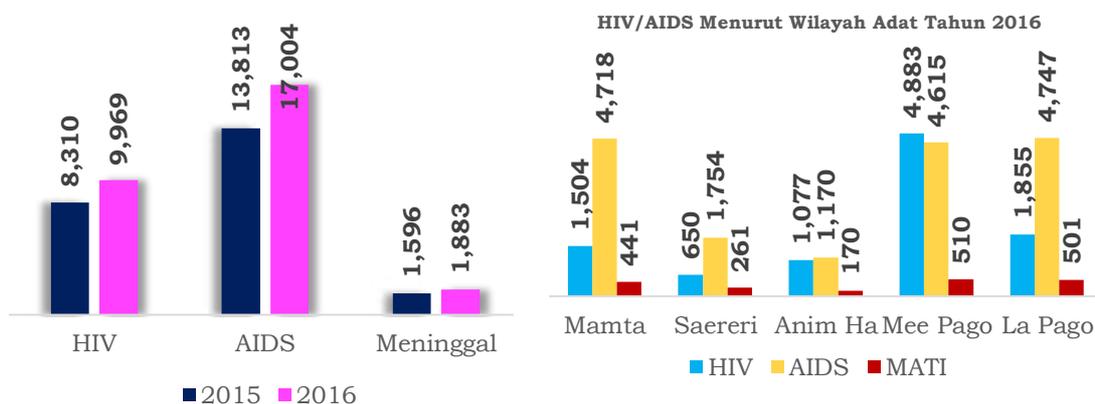


Sumber: Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2018 (data diolah)

6. Perkembangan Penanganan Penyakit HIV/AIDS

Perkembangan HIV/AIDS di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan baik penderita HIV, AIDS bahkan kasus kematian. Tercatat sampai dengan tahun 2016 triwulan ke IV terdapat 9.969 kasus pengidap HIV, 17.004 pengidap AIDS dengan 1.883 kasus kematian (lihat Gambar 3.47).

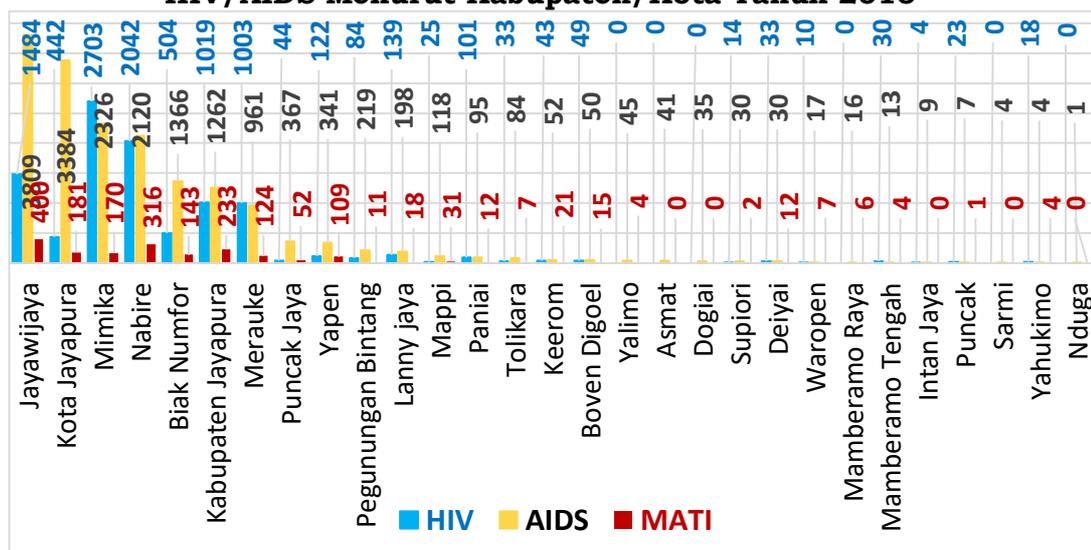
Gambar 3.46.
HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang) Tahun 2015-2016



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara keseluruhan, kasus pengidap HIV/AIDS dan kematian atas penyakit tersebut ada tersebar di 29 kabupaten/kota dengan jumlah yang bervariasi. Sedangkan daerah dengan kasus pengidap HIV terbanyak sampai dengan tahun 2016 adalah wilayah Mee Pago yaitu sebesar 4,883 kasus, kemudian pengidap AIDS terbanyak adalah wilayah La Pago adalah sebesar 4,747 kasus dan kasus kematian HIV/AIDS adalah wilayah Mee Pago adalah sebanyak 510 kasus.

Gambar 3.47.
HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

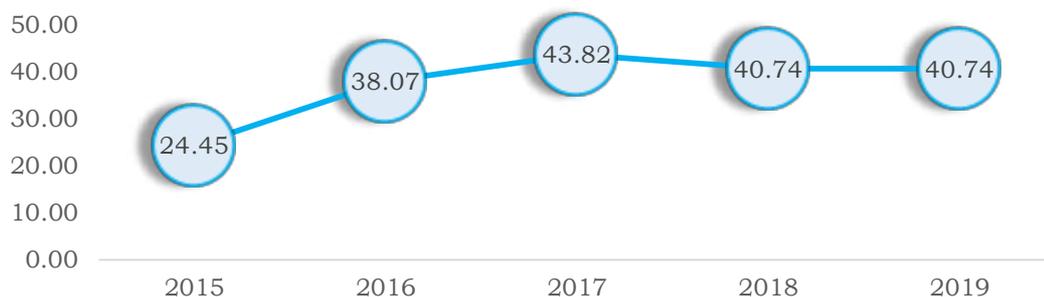


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

7. Perkembangan Penanganan Ibu Hamil

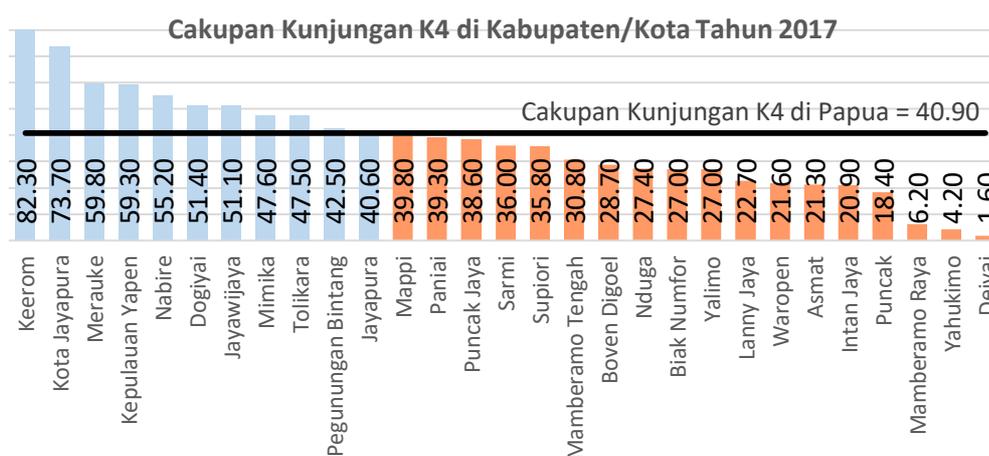
Cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Secara umum, cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019. Meskipun demikian, cakupan kunjungan K4 sempat mengalami peningkatan pada periode 2016-2017. Selain itu, terdapat 4 dari 5 wilayah adat dengan rata-rata cakupan K4 di bawah rata-rata provinsi. Meskipun demikian, persebaran capaian Kunjungan K4 di Mamta sangat timpang. Capaian Kunjungan K4 tertinggi dimiliki oleh Kota Jayapura dengan persentase mencapai 73,7% pada akhir tahun 2017. Persentase tersebut sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Kunjungan K4 di Mamberamo Raya sebagai yang terendah. Untuk cakupan K4 di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.48.
Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: Kemenkes-RI, 2020

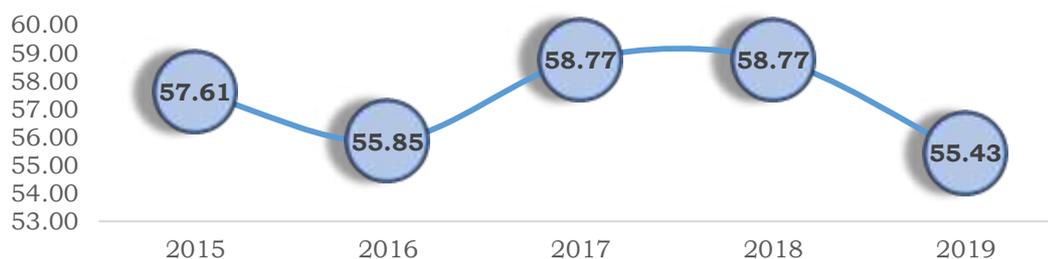
Gambar 3.49.
Cakupan Kunjungan K4 Kabupaten Kota di Provinsi Papua Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2020

Selanjutnya, persentase balita yang telah memperoleh imunisasi campak di Provinsi Papua tercatat tidak mengalami perubahan yang cukup besar setiap tahunnya. Rata-rata balita yang mendapatkan layanan imunisasi adalah sebesar 57,29 persen.

Gambar 3.50
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Balita yang telah mendapat imunisasi campak diprovinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 57,61 persen dan menurun

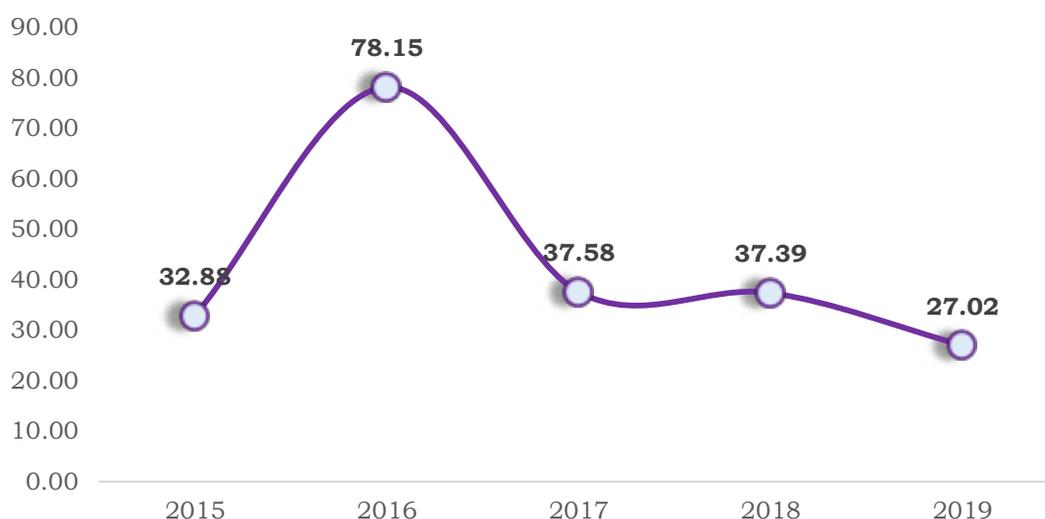
sebanyak 2,18 poin menjadi 55,43 persen balita yang pernah mendapat imunisasi campak. Sehingga perlu dilakukan pendekatan kepada keluarga yang memiliki balita guna di berikan imunisasi campak kepada balita. Lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian gambar berikut ini:

3.4.3. Pekerjaan Umum

1. Jaringan Jalan

Kondisi jalan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2019 dapat dikatakan cukup memprihatinka. Berdasarkan kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik diprovinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 32,88 persen dan mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2016 menjadi 78,15 persen. Namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik merosot hingga 27,02 persen, yang artinya terdapat 72,98 persen kondisi jalan dalam keadaan yang belum di lakukan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.51
Proporsi Jaringan Jalan dalam kondisi baik
Provinsi Papua Tahun 2015-2019

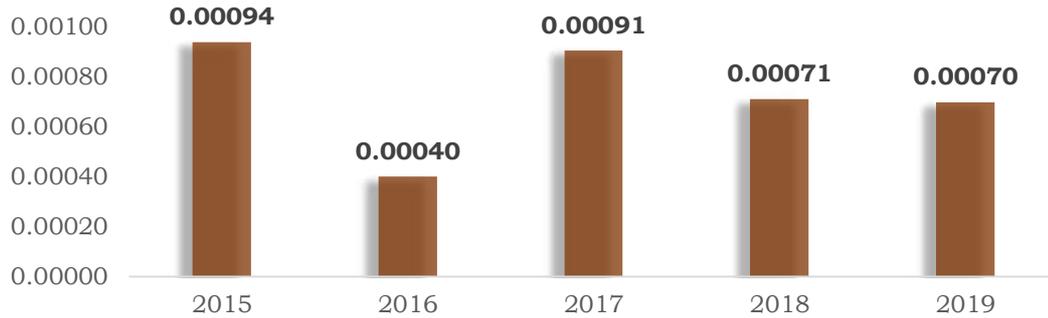


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Provinsi Papua. Peningkatan jalan dari tahun 2015-2019 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga tidak serta merta dapat menaikkan rasio mobilitas. Rasio mobilitas tahun 2015 sebesar 0,00094 Km/jiwa naik menjadi

0,00040 km/jiwa di tahun 2016 kemudian terlihat meningkat di tahun 2017 yaitu sebesar 0,00091 Km/jiwa. Selanjutnya pada tahun 2017-2019 mobilitas penduduk secara perlahan-lahan mengalami penurunan sebesar 0,00070 Km/jiwa di tahun 2019. Hal tersebut dapat tergambarkan di bawah ini:

Gambar 3.52
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
Provinsi Papua 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

2. Persampahan

Masih rendahnya implementasi dari 3R (Reuse, Recycle dan Reduce) terhadap sumber sampah baik di sumber maupun di tempat pengumpulan sampah menjadi salah satu indikasi pengelolaan sampah yang belum baik. Di samping itu terbatasnya sarana persampahan di masing-masing distrik menjadi salah satu kendala yang cukup besar. Provinsi Papua mengalami tren penurunan keterangkutan sampah ke TPA dari tahun 2015 yang semula sebesar 11,31% menjadi 9,38% pada tahun 2018. Hal tersebut meningkatkan sampah domestik dari 76,15% pada tahun 2015 menjadi 80,42% pada tahun 2018 (lihat 3.52).

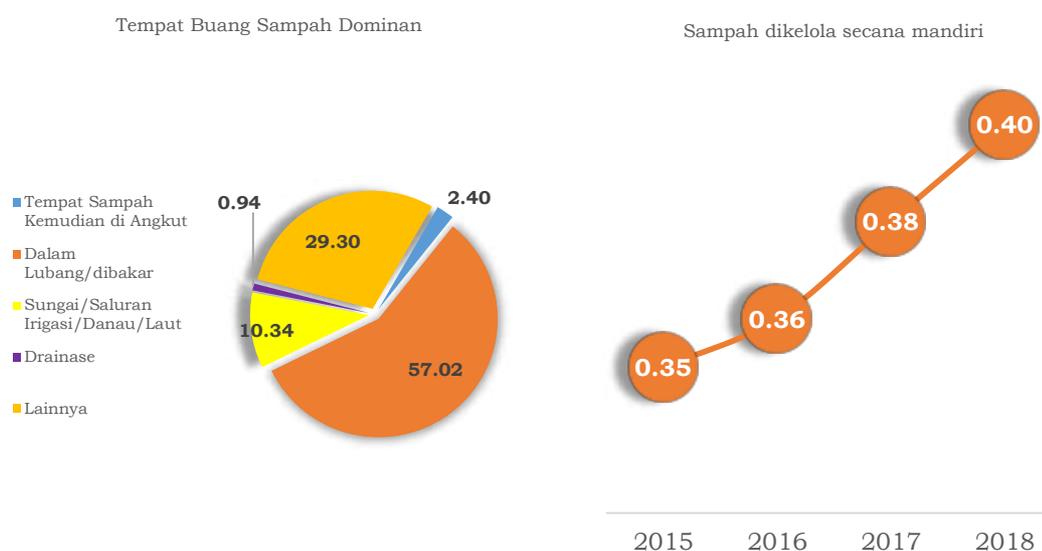
Gambar 3.53.
Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2015-2018



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selanjutnya, pengelolaan sampah di Provinsi Papua saat ini masih mengandalkan sistem swadaya atau tidak tersentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan TPS yang hanya tersebar di 1% dari total distrik saja di Provinsi Papua. Oleh karena keterbatasan pelayanan persampahan tersebut, maka hanya 2,40% kampung saja yang membuang sampah ke tempat sampah lalu diangkut. Sebanyak 57,02% kampung mengelola sampah secara dominan di dalam lubang atau dibakar, dan masih terdapat 10,34% desa lainnya yang membuang sampah ke badan air. Namun demikian, sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber sangatlah kecil. Pada tahun 2018 hanya 0,40% saja sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

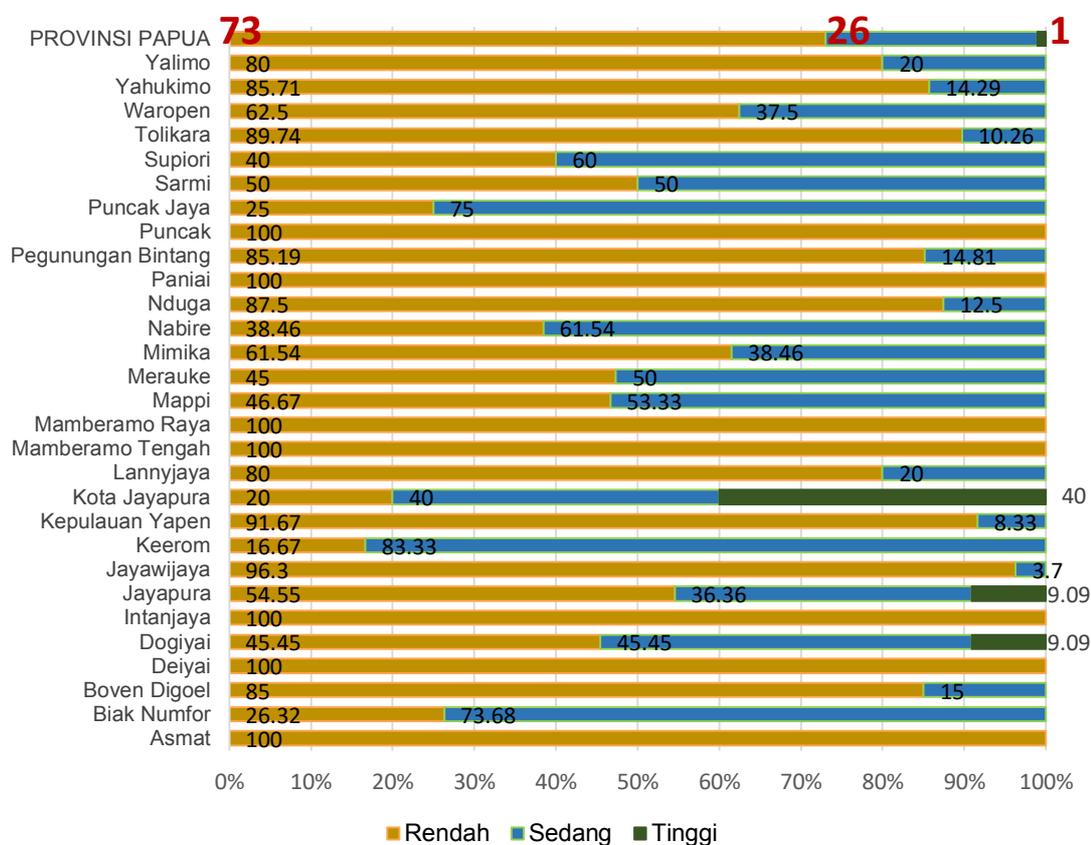
Gambar 3.54.
Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat Tahun 2018



Sumber: Podes Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar di atas, sebagian besar distrik di Provinsi Papua (73%) memiliki status “rendah” dalam penyediaan infrastruktur persampahan domestik. Namun demikian, perlu dipikirkan pula upaya peningkatan pada 26% distrik dengan status penyediaan eksisting “sedang” dan upaya pemeliharaan status “tinggi” bagi distrik-distrik yang telah memiliki kategori cukup baik dalam penyediaan persampahan domestik eksisting.

Gambar 3.55
Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua



Sumber: Podes Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Adapun kabupaten dengan jumlah distrik lebih dari 50% yang berstatus “rendah” berada di hampir semua kabupaten kecuali Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kota Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supirori. Penilaian rendah tersebut disebabkan karena masih banyaknya penggunaan drainase (got/selokan) dan sungai/saluran irigasi/danau/laut sebagai tempat buang sampah bagi sebagian besar keluarga di masing-masing distrik. Pembuangan sampah ke badan air merupakan tindakan yang akan mencemarkan badan air yang akan berpengaruh ke ekosistem secara keseluruhan.

3. Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua cenderung terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai -3,94% pertahun. Tercatat sampai dengan tahun 2019 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 21 unit. Artinya untuk 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 21 unit tempat

ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 29 kabupaten/kota sepanjang tahun 2015-2019 sangat bervariasi.

Tabel 3.24.
Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Papua	24,65	23,76	26,63	20,63	20,28
MAMTA					
Jayapura	49,01	39,52	47,95	40,52	39,53
Sarmi	31,34	34,72	51,30	43,90	42,70
Keerom	37,39	36,78	70,16	52,33	51,14
Mamberamo Raya	22,85	24,04	0,90	26,13	25,74
Kota Jayapura	22,13	28,21	18,39	18,10	17,96
LA PAGO					
Jayawijaya	26,37	26,11	19,45	25,72	25,38
Puncak Jaya	29,83	28,39	19,01	19,35	18,87
Yahukimo	29,89	29,42	29,57	14,28	14,14
Pegunungan Bintang	30,12	29,79	27,90	9,81	9,63
Tolikara	26,35	25,11	25,26	24,91	24,66
Nduga	0,00	0,00	0,10	0,51	0,51
Lanny Jaya	12,86	0,00	14,04	15,25	15,14
Mamberamo Tengah	0,00	19,49	18,53	14,35	14,32
Yalimo	21,74	0,00	20,06	20,29	19,81
Puncak	0,00	24,64	24,95	1,89	1,86
MEE PAGO					
Nabire	35,53	40,69	36,66	28,33	27,88
Paniai	28,73	14,10	9,81	14,07	13,75
Mimika	35,85	35,75	26,33	12,85	12,61
Dogiyai	12,15	14,71	113,58	14,70	14,50
Intan Jaya	0,00	0,00	5,38	1,64	1,62
Deiyai	0,00	0,00	8,31	11,86	11,75
SAERERI					
Kepulauan Yapen	27,32	22,92	36,73	35,72	34,39
Biak Numfor	24,28	27,68	19,77	20,15	19,62
Waropen	17,07	18,18	43,08	37,89	36,81

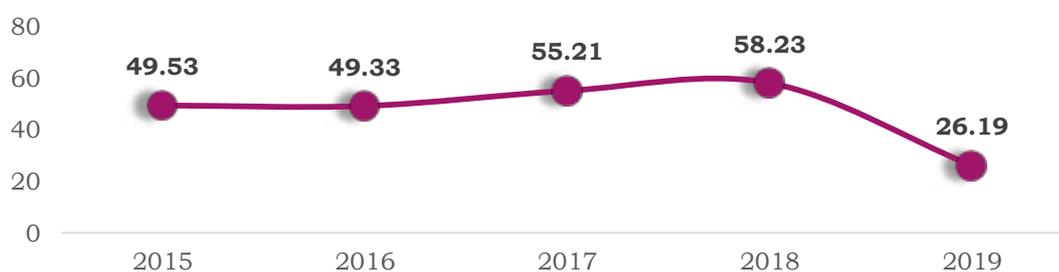
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Supiori	25,36	22,76	35,59	33,97	32,83
ANIM HA					
Merauke	52,30	34,82	22,79	22,91	22,73
Boven Digoel	53,81	51,45	41,54	40,61	39,73
Mappi	48,80	70,94	22,39	25,20	24,30
Asmat	0,00	0,00	26,15	25,42	24,93

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.4.4. Perumahan Rakyat

Akses kepemilikan rumah di Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau tercatat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 akses terhadap rumah layak huni adalah sebesar 49,53 persen turun sebanyak -23,34 poin menjadi 26,19 persen di tahun 2019. Meskipun selama ini pemerintah telah berupaya dalam memberikan program perumahan bagi masyarakat kurang mampu, namun ketersediaan tersebut masih belum mampu meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh fasilitas rumah layak huni dan terjangkau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 56
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Provinsi Papua Tahun 2015-2019



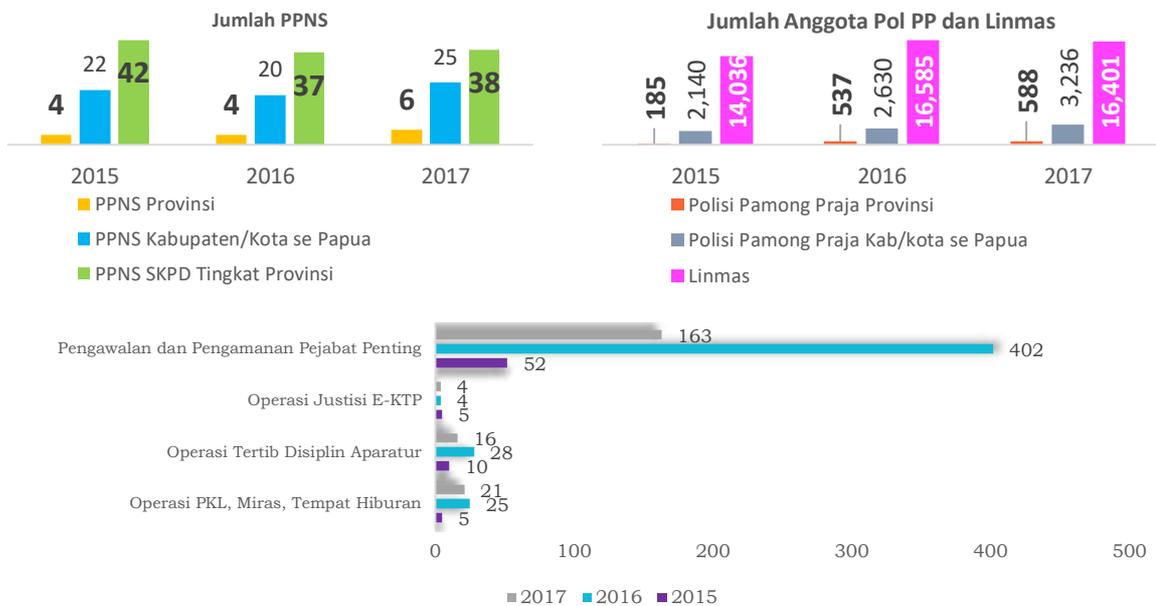
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

3.4.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat selama tahun 2015-2017 terus ditingkatkan. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan

dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (lihat gambar 3.56)

Gambar 3.57.
Kondisi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2015-2017



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

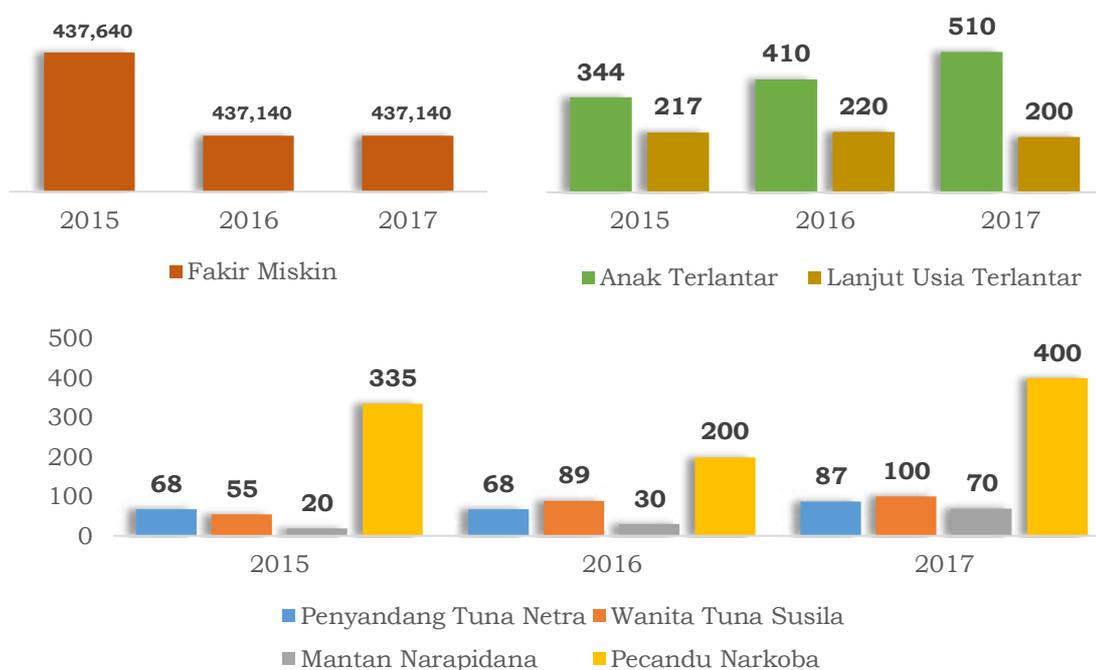
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa terdapat peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Papua pada rentang tahun 2015-2017. Hal ini terindikasi berdasarkan peningkatan jumlah PPNS, peningkatan anggota Polisi Pamong Praja, peningkatan jumlah operasi trantibum, serta peningkatan pengamanan pejabat penting.

3.4.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba pada rentang

tahun 2015-2017. Meskipun demikian, penyandang fakir miskin di Provinsi Papua cenderung membaik, walaupun terjadi penurunan capaian tersebut masih tergolong masih cukup tinggi (lihat gambar 3.57).

Gambar 3.58.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang)



Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 344 anak (tahun 2015) menjadi 510 anak (tahun 2017). Trend yang relatif menurun terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 217 orang (tahun 2015) menjadi 200 orang (tahun 2017). Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada penyandang tuna netra, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2015 sebanyak 55 orang dan bertambah menjadi 100 orang pada tahun 2017.

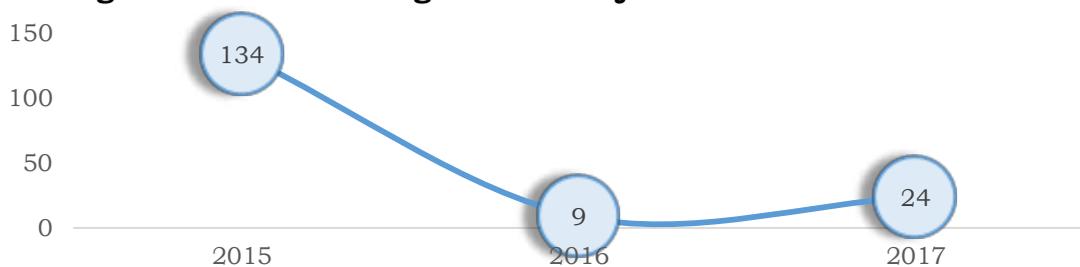
Selanjutnya, jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2015 tercatat sebanyak 20 jiwa dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi 70 jiwa. Adapun jumlah pecandu narkoba yang teridentifikasi pada tahun 2015 sebanyak 335 orang, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 200 orang namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 400 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan

Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

3.4.7. Tenaga Kerja

Kasus perselisihan pengusaha dengan pekerja Provinsi Papua terlihat cenderung berangsur-angsur mengalami penurunan yang cukup besar. Sampai dengan tahun 2017 perselisihan di antara pengusaha dan pekerjanya adalah sebanyak 24 kasus, yang nilainya masih lebih besar dari tahun sebelumnya (2016). Penurunan perselisihan pengusaha dan kerja ini dapat disebabkan karena peningkatan kompetensi atau capacity building yang dilakukan terhadap tenaga kerja di Provinsi Papua (lihat gambar 3.58).

Gambar 3.59.
Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun 2015-2017



Sumber: Bappeda Papua 2018

Selanjutnya, jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 645 jiwa dan menurun hingga 100 jiwa pada tahun 2016, namun kembali meningkat menjadi 1.487 jiwa pada tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.60.
Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja



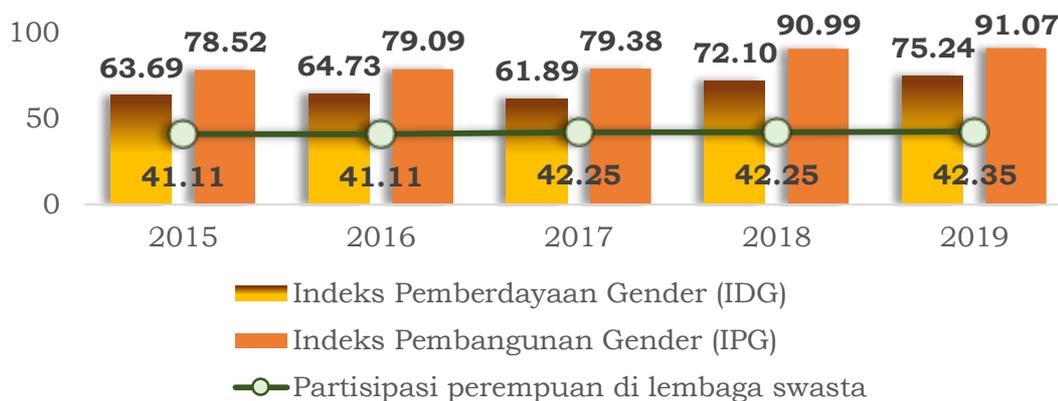
Sumber: Bappeda Papua 2018

Selain itu, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2015 sebanyak 100 orang kemudian meningkat pada tahun 2016 sebanyak 230 orang. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi 75 orang tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Penurunan tersebut mungkin dikarenakan banyak tenaga kerja pada tahun sebelumnya yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Adapun penduduk usia 15 tahun keatas yang pernah mengikuti pelatihan/keterampilan kerja pada tahun 2013 sebanyak 620 orang namun terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 berjumlah sebanyak 100 orang. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan atau keterampilan kerja, sehingga pemerintah bersama lembaga pelatihan perlu melakukan invasi pelatihan keterampilan kerja.

3.4.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan gender (IPG) yang dihitung dengan menggunakan harapan hidup, harapan pendidikan dan indeks distribusi pendapatan merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Hal tersebut terindikasi bahwa kualitas dalam pembangunan gender semakin menunjukan hal yang positif di Provinsi Papua. (lihat gambar 3.60)

Gambar 3.61
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2015-2019

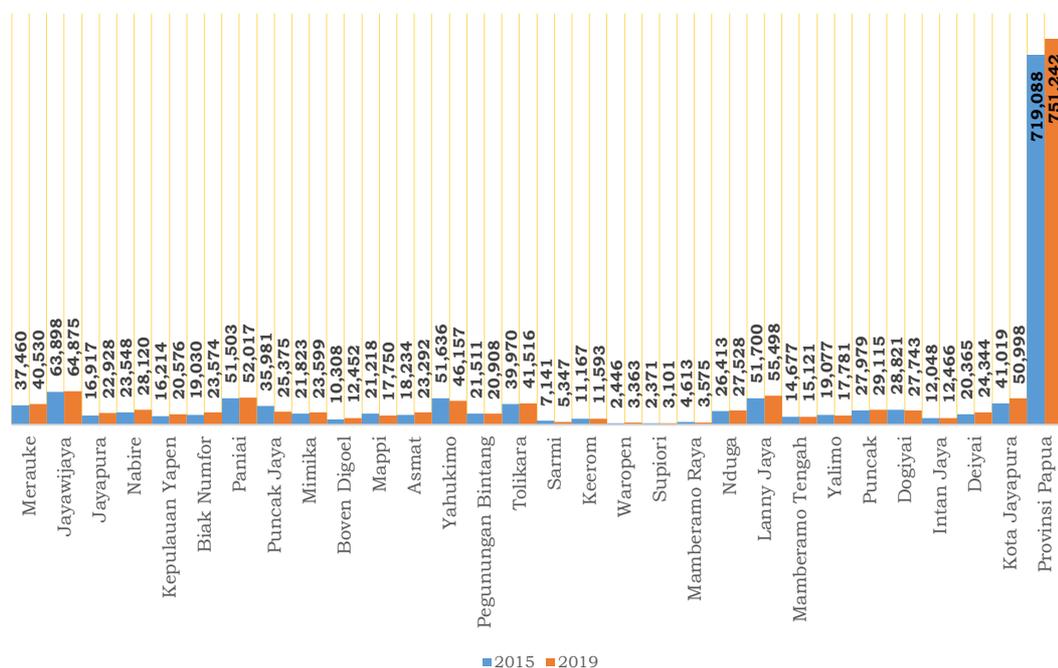


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Indeks pemberdayaan gender tercatat memiliki nilai cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2016-2017 terlihat menurun sebesar 2,84%, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, pada indeks pembangunan gender juga terlihat cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.

Membangun daerah tidak terlepas dari tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Strategi pembangunan selama ini sudah diarahkan dalam memberdayakan masyarakat secara umum dan peningkatan peran swasta terhadap urusan-urusan masyarakat yang belum optimal dilakukan pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap lapangan tenaga kerja perempuan di Provinsi Papua selama ini terbilang cukup tinggi. Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan, namun terlihat partisipasi perempuan terlihat sudah tinggi. Sampai dengan tahun 2019 partisipasi perempuan pada sektor swasta mencapai 42,35%. Selain variabel di atas, berikut ini adalah variabel partisipasi angkatan kerja khusus perempuan pada semua sektor lapangan usaha di Provinsi Papua yang akan disajikan perbandingan data tahun 2015 dengan kondisi pada tahun 2019.

Gambar 3.62.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Papua 2020, (data diolah)

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Papua untuk perbandingan tahun 2015 dan tahun 2019 mengalami peningkatan pada masing-masing daerah di 29 kabupaten/kota. Tercatat Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua secara keseluruhan meningkat dari 719.088 orang di tahun 2015 menjadi 751.242 orang pada tahun 2019 atau meningkat sebesar sebesar 4,47 persen. Secara kewilayahan, terdapat beberapa daerah yang juga mengalami peningkatan di antaranya terdapat 18 kabupaten/kota, sedangkan 11 daerah lainnya mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan perubahannya.

Selain itu, terdapat juga partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan yang tergambarkan melalui Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan yang terlihat bervariasi. Rata-rata partisipasi perempuan dalam dunia Pendidikan di Provinsi Papua didominasi pada tingkat Pendidikan dasar, sedangkan pada Pendidikan SMP dan SMA terbilang cukup rendah. Tercatat sampai dengan tahun 2019 APM perempuan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 78,8%, ini berarti masih terdapat 21,20% perempuan yang belum mengenyam pendidikan sekolah dasar. Sedangkan APM perempuan pada pendidikan menengah pertama sebesar 56,86%, kemudian pendidikan menengah sebesar 43,23%.

Gambar 3.25.
APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
MAMTA									
Jayapura	92,72	95,09	93,92	67,11	78,02	72,34	67,35	73,09	70,28
Sarmi	88,9	94,96	91,93	74,12	81,3	77,15	50,55	52,89	51,81
Keerom	88,79	81,89	85,39	73,43	66,97	71,66	65,67	53,27	60,4
Mamberamo Raya	95,4	94,74	95,09	52,5	61,74	57,6	55,67	51,36	53,44
Kota Jayapura	96,93	93,52	95,19	81,45	74,79	78,57	59,22	76,27	67,36
LA PAGO									
Jayawijaya	89,85	89,71	89,78	81,83	70,97	75,96	66,81	66,71	66,76
Puncak Jaya	62,69	89,7	74,8	25,29	28,61	26,76	16,76	19,65	17,98
Yahukimo	65,15	58,05	61,67	24,91	29,37	27,05	13,04	15	14,09

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
Pegunungan Bintang	64,44	66,58	65,43	37,86	30,56	34,04	34,61	24,48	29,33
Tolikara	65,96	52,94	60,2	61,84	42,91	52,91	31,86	34,74	32,99
Nduga	61,78	52,62	57,98	36,85	34,15	35,53	10,41	9,53	9,99
Lanny Jaya	69,98	70,93	70,39	73,94	60,97	68,52	55,43	39,13	47,81
Mamberamo Tengah	83,39	89,59	85,95	75,11	67,3	71,96	60,09	53,23	56,41
Yalimo	83,34	76,84	80,37	43,65	65,73	53,66	32,62	27,59	30,41
Puncak	53,33	50,43	51,96	25,12	29,18	26,83	15,92	6,02	11,52
Nabire	96,04	83,57	89,63	72,8	63,1	69,15	65,75	61,9	63,97
Paniai	70,41	74,23	72,15	62,74	44,78	54,27	34,14	17,08	25,15
MEE PAGO									
Mimika	92,78	89,94	91,41	74,15	80,09	77,11	83,66	50,03	66,97
Dogiyai	86,02	82,62	84,31	55,36	81,59	68,43	34,22	42,42	38,4
Intan Jaya	63,63	59,85	61,7	15,23	17,04	16,05	6,45	14,57	11,11
Deiyai	61,32	61,73	61,51	41,99	58,98	49,3	45,25	34,61	40,29
SAERERI									
Kepulauan Yapen	92,02	90,57	91,32	61,12	71,57	65,8	52,32	64,29	57,41
Biak Numfor	93,82	85,79	90,2	67,54	74,79	71,31	57,85	66,1	61,95
Waropen	91,15	89,68	90,52	71,85	76,45	73,81	47,74	76,59	60,64
Supiori	93,2	95,59	94,26	62,31	65,72	63,7	57,66	59,4	58,47
ANIM HA									
Merauke	89,3	93,81	91,95	65,99	76,1	70,59	67,61	63,93	65,87
Boven Digoel	87,96	84,82	86,49	63,32	71,42	67,63	36,3	35,37	35,82
Mappi	82,91	82,89	82,9	41,36	33,23	36,74	18,93	19,61	19,33
Asmat	81,79	82,39	82,07	46,91	27,96	37,36	21,39	25,61	23,59
Papua	79,46	78,8	79,15	57,49	56,86	57,19	45,14	43,23	44,21

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi dan pendidikan saja melainkan ditentukan juga oleh terwujudnya kerukunan yang aman dan damai yang dimulai dari lingkungan keluarga masyarakat. Sepanjang tahun 2015-2016 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Papua

masih terjadi. Kondisi KDRT di Provinsi Papua memiliki trend meningkat, dan angkanya terbilang cukup tinggi. Tercatat bahwa pada rentang waktu dua tahun terakhir pertumbuhannya meningkat hingga 6,49%. Pada tahun 2015 jumlah KDRT adalah sebesar 462 kasus dan terus menurun hingga 492 kasus di tahun 2016.

Gambar 3.63
Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2015-2016



Sumber: Statistik Kriminal BPS RI, 2017 (data diolah)

3.4.9. Pangan

1) Tingkat Konsumsi Pangan

Konsumsi kalori atau protein adalah banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Rata-rata wanita memerlukan asupan sebanyak 2000 kalori per harinya, sedangkan pria rata-rata membutuhkan asupan sebanyak 2500 kalori per hari. Jika diperhatikan proporsi asupan kalori Provinsi Papua memiliki trend yang positif, meskipun rata-rata asupan kalori masyarakat di Papua masih terbilang rendah khususnya pada tahun 2015-2016 belum masuk dalam kategori ideal (dibawah standar). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.64.
Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)



Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan 0, asupan kalori Provinsi Papua dalam rentang waktu 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Pada tahun 2015 asupan kalori mencapai 1.989 kkal/kapita/hari dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 menjadi 2.115 kkal/kapita/hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa asupan kalori di Provinsi Papua telah memenuhi standar yang ditentukan.

3.4.10. Pertanian

Kondisi pertanian khususnya di Provinsi Papua sering menjadi masalah yang serius, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, terdapat penurunan peralihan tanah di Provinsi Papua dari 7.057 hektar pada tahun 2016 menjadi 5.887 hektar pada tahun 2017. Adapun proporsi luas peralihan tanah dengan jual-beli mengalami peningkatan dari 87,96% pada tahun 2016, menjadi 88,51% pada tahun 2017 (lihat 026).

Tabel 3.25.
Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jual beli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7057
2017	5.211	451	197	3	25	5887

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ±729.116 hektar, yang berasal dari :

1. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar
3. Program pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah baru seluas ± 9.053 hektar
4. Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar
5. Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar

6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar
7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±11.302 hektar

3.4.11. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting di Provinsi Papua ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 3.26.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Tahun	IKU	IKA	IKTL	IKLH
2015	84.24	80.00	79.35	81.01
2016	89.60	76.00	79.17	81.35
2017	90.91	77.33	78.18	81.47
Rata2 Pertumbuhan Provinsi Papua	3.91	-1.62	- 0.73	0.56
Kontribusi Terhadap Nasional Tahun 2017	1.12	6.32	- 9.22	2.07

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Dalam tabel 3.26 diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang positif (0,56%). Sementara satu dari tiga indikator pembentuk IKLH Provinsi Papua yaitu IKU memiliki pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat. Sedangkan dua indikator lainnya seperti IKA dan IKTL memiliki pertumbuhan yang cenderung negative. Adapun Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki trend yang cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 3,91% setiap tahunnya. Selanjutnya kontribusi IKLH Provinsi Papua untuk tahun 2017 tercatat untuk IKU sebesar 1,12%, IKA sebesar 6,32%, IKTL sebesar -9,22% dan secara keseluruhan kontribusi IKLH Provinsi Papua terhadap Nasional yaitu sebesar 2,07%.

3.4.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak yang memiliki akte lahir di beberapa kabupaten sampai saat ini terbilang masih cukup rendah. Sampai dengan tahun 2019, terdapat beberapa daerah dengan jumlah anak yang memiliki akte lahir mencapai 0,53% sampai dengan 8,72%. Secara kewilayahan hampir sebagian besar daerah di Provinsi Papua, persentase anak yang memiliki akte lahir masih rendah. Berdasarkan kewilayahan, kepemilikan akta kelahiran rata-rata masih belum optimal.

Tabel 3.27.
Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2019

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kapamilikan Akta Kelahiran			
		Dapat Ditunjukkan	Tidak Dapat ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu
Mamta	Jayapura	35,13	17,93	46,94	0,00
	Keerom	53,92	15,23	29,34	1,51
	Mamberamo Raya	0,00	38,46	61,54	0,00
	Sarmi	22,55	37,04	40,41	0,00
	Kota Jayapura	22,07	39,44	38,49	0,00
La Pago	Jayawijaya	0,53	38,45	61,03	0,00
	Lanny Jaya	0,00	15,97	84,03	0,00
	Mamberamo Tengah	0,00	70,03	29,97	0,00
	Nduga	0,00	0,76	99,24	0,00
	Pegunungan Bintang	10,99	5,36	82,42	1,22
	Puncak	0,00	28,02	67,93	4,05
	Puncak Jaya	4,24	7,66	88,10	0,00
	Tolikara	0,00	69,33	30,23	0,45
	Yahukimo	8,72	10,24	81,02	0,00
	Yalimo	0,00	28,63	71,37	0,00
Mee Pago	Deiyai	0,00	11,69	74,58	13,73
	Dogiyai	5,44	0,00	94,56	0,00
	Intan Jaya	0,00	1,86	97,23	0,91
	Mimika	35,44	19,20	45,36	0,00
	Nabire	35,19	33,67	28,87	2,27
	Paniai	0,00	7,90	91,31	0,79
Saereri	Biak Numfor	17,96	18,30	59,13	4,60
	Supiori	27,01	21,39	51,60	0,00
	Waropen	26,77	30,61	42,62	0,00
Anim Ha	Asmat	10,85	23,56	59,37	6,22
	Boven Digoel	23,15	24,88	51,97	0,00
	Mappi	2,71	34,11	62,27	0,91
	Merauke	43,72	18,26	38,02	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019, (data diolah)

Selain kepemilikan terhadap akta kelahiran, persentase penduduk berbasis NIK di beberapa kabupaten juga terlihat masih rendah di Papua. Sampai dengan tahun 2019, tercatat persentase penduduk yang memiliki KTP adalah sebesar 58,52%, yang artinya masih terdapat 41,48% penduduk belum memiliki KTP. Sampai dengan tahun 2019 juga tercatat beberapa daerah dengan kepemilikan KTP terbilang sangat rendah di antaranya adalah kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Apabila dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua tercatat sebanyak 2 (dua) wilayah yang memiliki persentase penduduk memiliki NIK dibawah 50% yaitu, Mee Pago dan La Pago. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28.
Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP
Berbasis NIK Tahun 2019

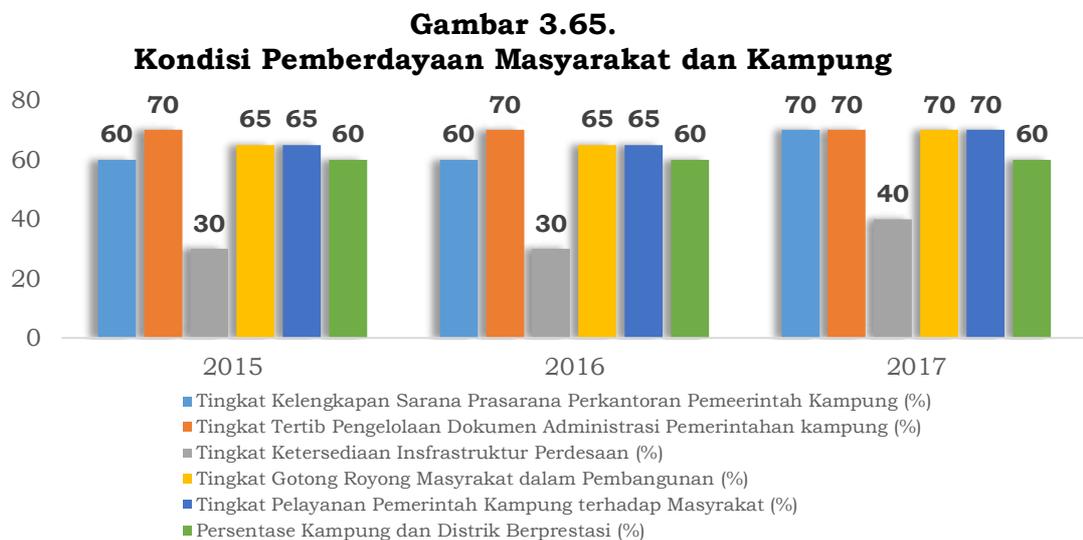
Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan NIK		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Merauke	85,73	85,33	85,53
Jayawijaya	77,04	76,48	76,76
Jayapura	80,7	79,56	80,16
Nabire	82,45	82,03	82,25
Kepulauan Yapen	82,54	79,46	81,05
Biak Numfor	68,35	63,74	66,1
Paniai	5,45	5,24	5,35
Puncak Jaya	14,83	15,81	15,26
Mimika	65,56	67,48	66,42
Boven Digoel	76,72	78,5	77,55
Mappi	80,31	77,61	78,96
Asmat	41,72	42,32	43,02
Yahukimo	4,36	3,99	4,18
Pegunungan Bintang	39,42	38,63	39,05
Tolikara	99,38	99,76	99,56
Sarmi	74,22	73,56	73,92
Keerom	79,79	79,47	79,64
Waropen	79,41	78,52	79
Supiori	78,72	78,73	78,73
Mamberamo Raya	60,51	63,93	63,12
Nduga	2,05	0,51	1,36
Lanny Jaya	98,69	97,98	98,36
Mamberamo Tengah	8,45	7,28	7,89
Yalimo	40,81	39,11	40,02
Puncak	48,76	47,6	48,2
Dogiyai	11,3	10,29	10,8

Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan NIK		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Intan Jaya	3,84	4,75	4,29
Deiyai	0	0	0
Kota Jayapura	90,14	90,61	90,35
Rata-rata	58,92	58,08	58,52

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019, (data diolah)

3.4.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah kampung yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat mencapai 65%, dan mengalami peningkatan menjadi 70% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam peningkatan pelayanannya kepada masyarakat, yang juga dapat ditinjau berdasarkan peningkatan kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintah kampung, peningkatan tertib pengelolaan dokumen administrasi pemerintah kampung, dan penyediaan infrastruktur perdesaan (lihat gambar 3.64).

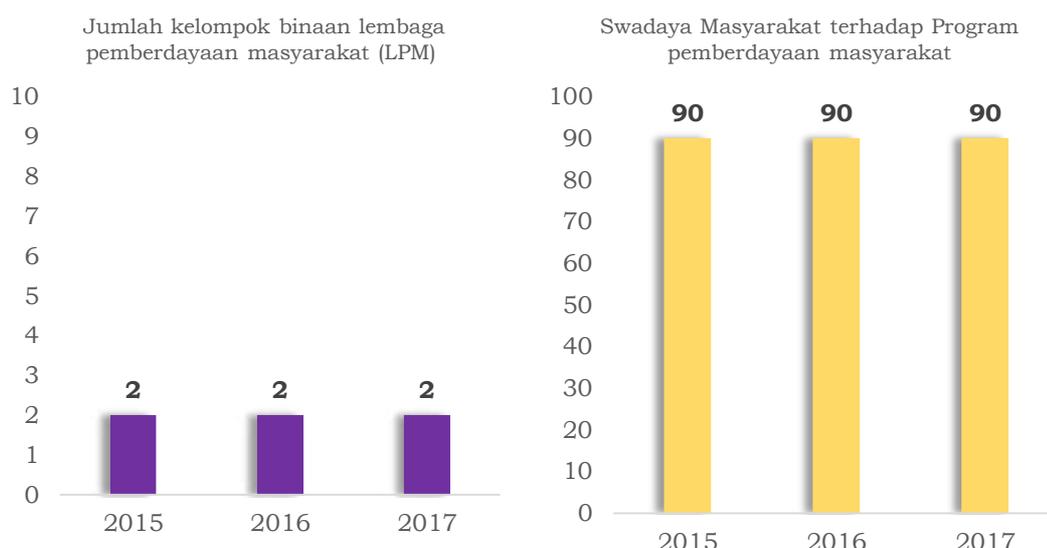


Sumber: Bappeda Papua 2018

Secara keseluruhan kondisi pemberdayaan masyarakat dan kampung terjadi peningkatan. Semangat masyarakat membantu pemerintah dalam pembangunan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Hal tersebut kiranya dapat memacu pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi dalam pembangunan, sehingga seluruh masarakat yang berada dipelosok dapat menikmati pembangunan yang sama.

Dalam gambar di bawah ini dapat terlihat bahwa jumlah swadaya masyarakat untuk mendukung program pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat, menunjukkan angka yang sangat baik. Peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dengan swadaya masyarakat dalam mendukung program pemerintah, kiranya dapat mempercepat pembangunan di daerah, sehingga permasalahan kesenjangan dapat menurun.

Gambar 3.66.
Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2017 (program)



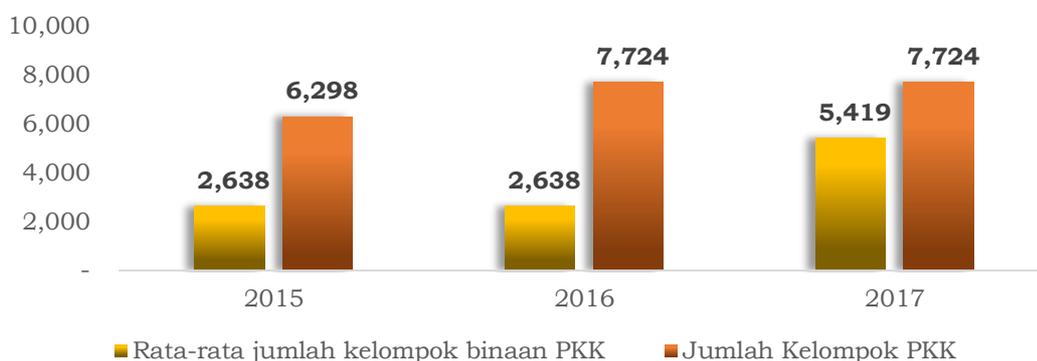
Sumber: Bappeda Papua 2018

Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 baru mencapai 2 kelompok. Kiranya di tahun-tahun kedepan lembaga pemberdayaan masyarakat kampung menambah lagi kelompok-kelompok binaan sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah baik di sektor ekonomi dan sektor lainnya lebih banyak lagi.

Selanjutnya, jumlah kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2015 sebanyak 6.298 kelompok PKK mampu membentuk 2.638 kelompok binaan. Pada tahun 2017 jumlah kelompok PKK meningkat menjadi 7.724 kelompok dan menbinan 5.419 kelompok binaan (lihat gambar 3.66). Peningkatan tersebut menunjukkan nilai yang positif, dengan meningkatnya jumlah kelompok PKK dan binaannya kiranya dapat melibatkan banyak masyarakat dalam

upaya peningkatan kualitas masyarakat terutama perempuan dalam meningkatkan peran perempuan melalui PKK.

Gambar 3.67.
Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK



Sumber: Bappeda Papua, 2018

Melalui PKK kita dapat meningkatkan peran perempuan serta dapat menggali dan menggerakkan serta mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembinaan ini diharapkan dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan perempuan dan anak serta perbaikan kesejahteraan keluarga dan mampu memotifasi orang lain dan memberikan harapan bagi terbentuknya keluarga mandiri serta bermasyarakat dan menunjang program pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah

telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

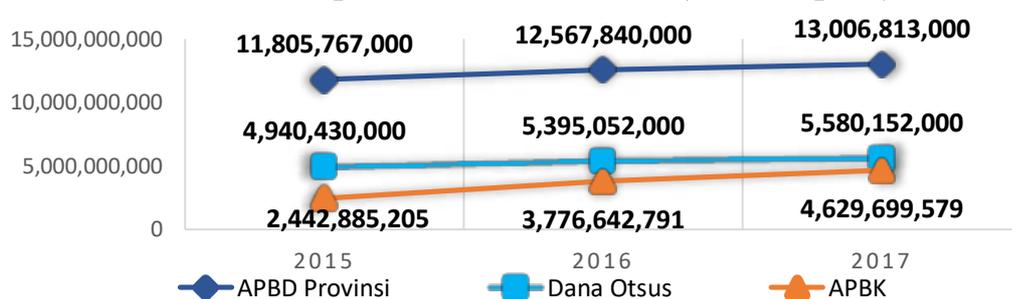
Tabel 3.29.
Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua

Uraian	2015	2016	2017
APBD Provinsi	11.805.767.000	12.567.840.000	13.006.813.000
Dana Otsus	4.940.430.000	5.395.052.000	5.580.152.000
APBK	2.442.885.205	3.776.642.791	4.629.699.579
DD	1.433.226.742	3.385.116.457	3.563.722.683
Kampung	4.293	4.635	5.163
Penduduk	3.149.375	3.207.444	3.265.202
DD/kampung	333.852,02	730.337,96	690.242,63
DD/kapita	455,08	1.055,39	1.091,42
%DD terhadap APBK	59	90	77
%DD terhadap APBD provinsi	0,12	26,93	27,40
%DD terhadap Dana Otsus	29,01	62,74	63,86
%APBK terhadap APBD provinsi	20,69	30,05	35,59
%APBK terhadap dana otsus	49,45	70,00	82,97

Sumber: Data Dana Desa diolah dari DJPK Kementerian Keuangan dan APBDesa dari BPS Pemerintahan Desa tahun 2015, 2016 dan 2017

Sejak diimplementasikan tahun 2015, Dana Desa memiliki komposisi bauran dana yang signifikan baik di tingkat Desa, kabupaten, maupun provinsi. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seiring dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi mandate UU Desa agar alokasi Dana Desa secara bertahap mencapai 10% dari dana transfer daerah- jumlah alokasi Dana Desa di Provinsi Papua terus meningkat, terakhir tahun 2017 mencapai 3,56 Trilyun Rupiah atau 63,86% terhadap total Dana Otsus dan 27,40 terhadap total APBD Provinsi Papua. Peningkatan DD juga diikuti oleh APB Kampung karena UU Desa juga mengamankan Kabupaten/Kota mengalokasikan 10% dari DAU, DBH dan Pajak Daerah untuk Desa.

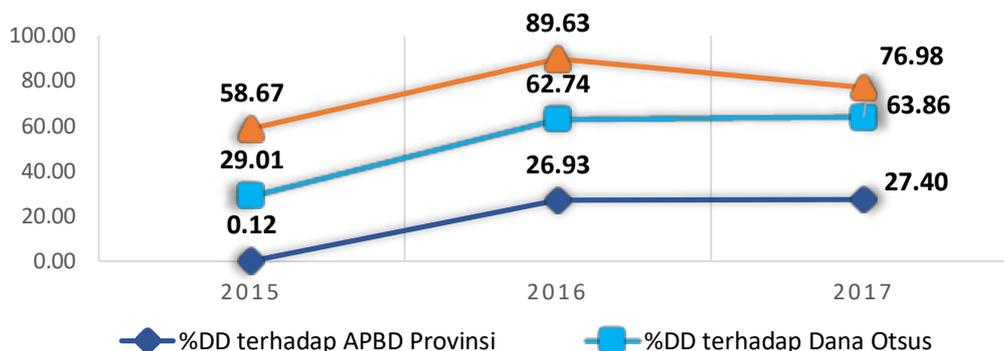
Gambar 3.68.
Perkembangan APBK, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribuan Rupiah)



Pada 066, 067, dan 068, dapat dilihat perkembangan APB Kampung dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dimana pada tahun

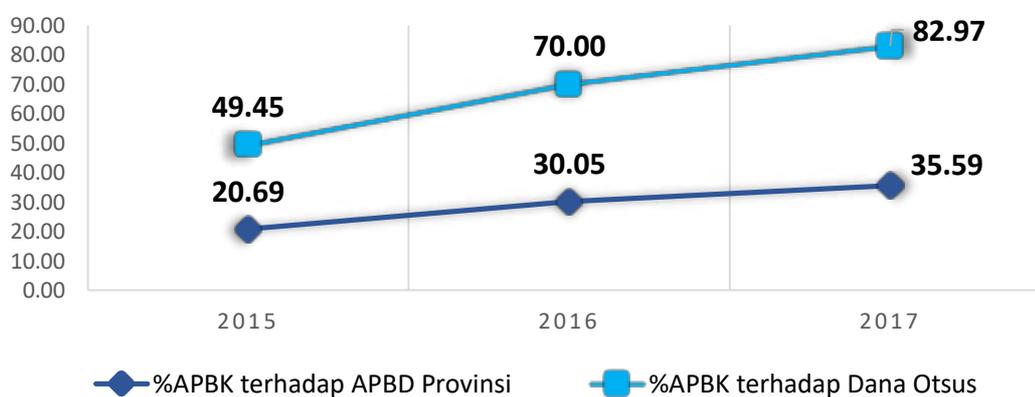
2017 APBKampung mencapai 4,63 Trilyun atau 82,97% dari Dana Otsus dan 35,59,4% dari APBD Provinsi. Meskipun lokasi ADD juga meningkat, tetapi proporsi DD terhadap APBKampung tetap tinggi sebesar 76,98% pada tahun 2017.

Gambar 3.69.
Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBK di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)



Dari uraian di atas, nampak bahwa kebijakan UU Desa dengan Dana Desa memberikan kontribusi terhadap alokasi sumber daya keuangan langsung ke kampung. Dengan kata lain, idealnya kampung perlu memiliki sumber daya keuangan untuk mendanai untuk mendanai kewenangan lokal kampung sesuai dengan prinsip subsidiaritas.

Gambar 3.70.
Persentase APBK terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)



3.4.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pengendalian Penduduk

Jumlah penduduk Papua selama periode 2015-2019 berkembang pada tingkat pertumbuhan yang sangat terkendali dan relatif menurun. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Papua sebesar 3.25 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhannya sebesar

1,89%. Selanjutnya di tahun 2016 pertumbuhan penduduk Papua relatif mengalami pelambatan, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 1,84%. Kondisi ini terus berlanjut sepanjang periode 2017-2019, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 1,71%, yang terlihat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Adapun jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2019 adalah sebanyak 3,38 juta jiwa (lihat Gambar 3.69).

Gambar 3.71.
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)



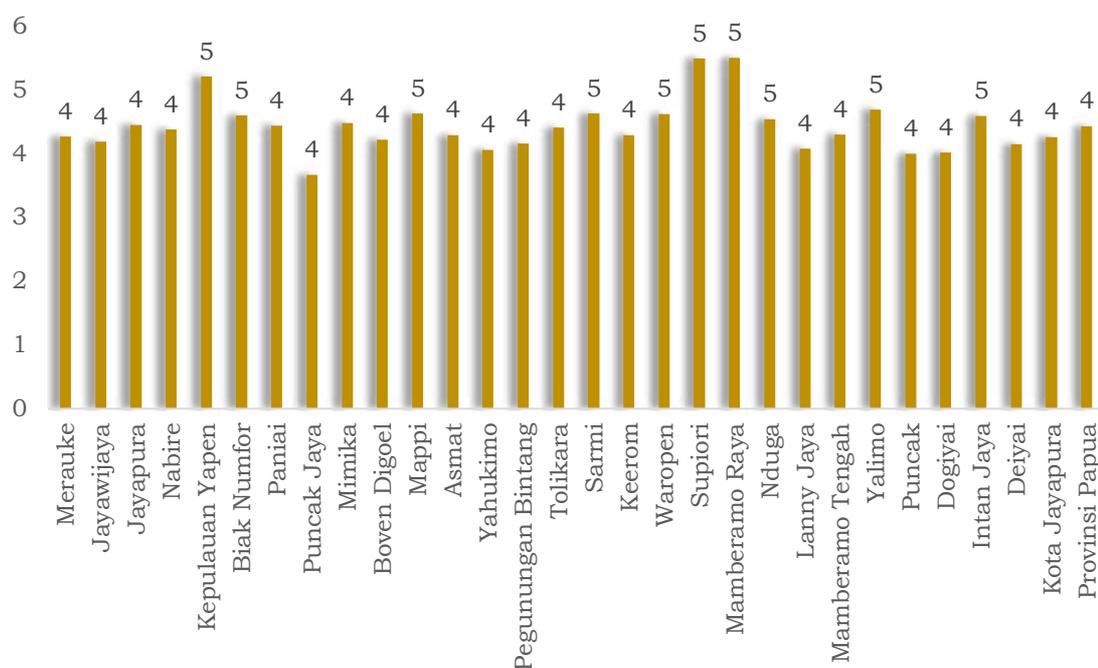
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan (lihat Gambar 3.10). Jumlah penduduk laki-laki tahun 2015 tercatat 1.661.219 jiwa, dan meningkat menjadi 1.774.690 jiwa pada tahun 2019. Sementara jumlah penduduk perempuan pada tahun 2015 sebesar 1.488.156 jiwa, dan meningkat menjadi 1.604.612 jiwa pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan angka Rasio Sex menjadi lebih besar dari 100, namun mempunyai kecenderungan angka yang relatif menurun. Tahun 2015 angka Rasio Sex mencapai 111,63 dan menurun menjadi 110,60 di tahun 2019.

Secara demografis, tujuan berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk, dengan jumlah anak yang dianjurkan pemerintah sebanyak 2 (dua) orang sehingga anggota keluarga sebanyak 4 (empat) orang. Secara filosofis adalah untuk

mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua juga tidak memiliki perubahan yang cukup pesat. Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebesar 4 (empat) orang dalam setiap rumah tangga.

Gambar 3.72.
Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Berdasarkan kabupaten/kota di Papua, terdapat 10 daerah yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di atas rata-rata provinsi di antaranya ialah Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mappi, Sarmi, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Nduga, Yalimo dan Intan Jaya yaitu rata-rata 5 (lima) orang. Sedangkan daerah lainnya memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di bawah rata-rata provinsi.

2. Keluarga Berencana

Persentase pasangan usia subur (PUS) dalam menyelesaikan program keluarga berencana dapat terdeteksi melalui partisipasinya menjadi akseptor KB. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran PUS selain bersumber dari kesadarannya sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan layanan pemerintah khususnya para aparaturnya yang berperan di dalam pelaksanaan program tersebut.

Tabel 3.30.
Rasio Akseptor KB

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Mamta	Jayapura	22,08	37,55	86,33	0,00	62,18
	Sarmi	123,24	51,51	20,96	448,95	50,95
	Keerom	45,63	31,68	100	73,75	70,13
	Mamberamo Raya	33,41	100	100	0,00	57,06
	Kota Jayapura	95,16	85,35	98,34	0,00	60,32
La Pago	Jayawijaya	5,45	92,02	84,34	0,00	39,43
	Puncak Jaya	19,19	72,71	42,86	71,15	41,61
	Yahukimo	31,06	15,46	7,55	21,38	58,21
	Pegunungan Bintang	75,11	45,03	37,81	0,00	53,04
	Tolikara	10,13	100	100	16,11	50,56
	Nduga	65,05	100	100	0,00	82,61
	Lanny Jaya	45,35	9,78	68,14	16,63	51,34
	Mamberamo Tengah	80,74	55,42	100	4,39	53,03
	Yalimo	97,31	38,4	58,99	53,68	60,00
	Puncak	81,43	41,87	86,11	16,42	52,00
Mee Pago	Nabire	52,88	41,35	100	56,62	53,67
	Paniai	94,22	62,15	100	109,09	51,75
	Mimika	21	75,09	100	0,00	82,78
	Dogiyai	96,59	20,88	100	67,18	46,11
	Intan Jaya	23,71	27,14	100	38,30	58,27
	Deiyai	29,36	14,53	100	40,13	50,17
Saereri	Kepulauan Yapen	35,62	68,97	65,21	0,00	52,64
	Biak Numfor	19,47	63,13	53,92	0,00	50,03
	Waropen	11,21	44,93	50,7	54,14	57,52
	Supiori	15,42	22,33	82,24	33,57	33,09
Anim Ha	Merauke	9,84	54,6	61,56	82,43	40,76
	Boven Digoel	13,34	32,91	38,63	112,92	52,31
	Mappi	31,49	100	100	95,35	50,09
	Asmat	49,85	82,03	65,52	0,00	52,17
	Papua	33,38	55,32	79,37	166,38	53,70

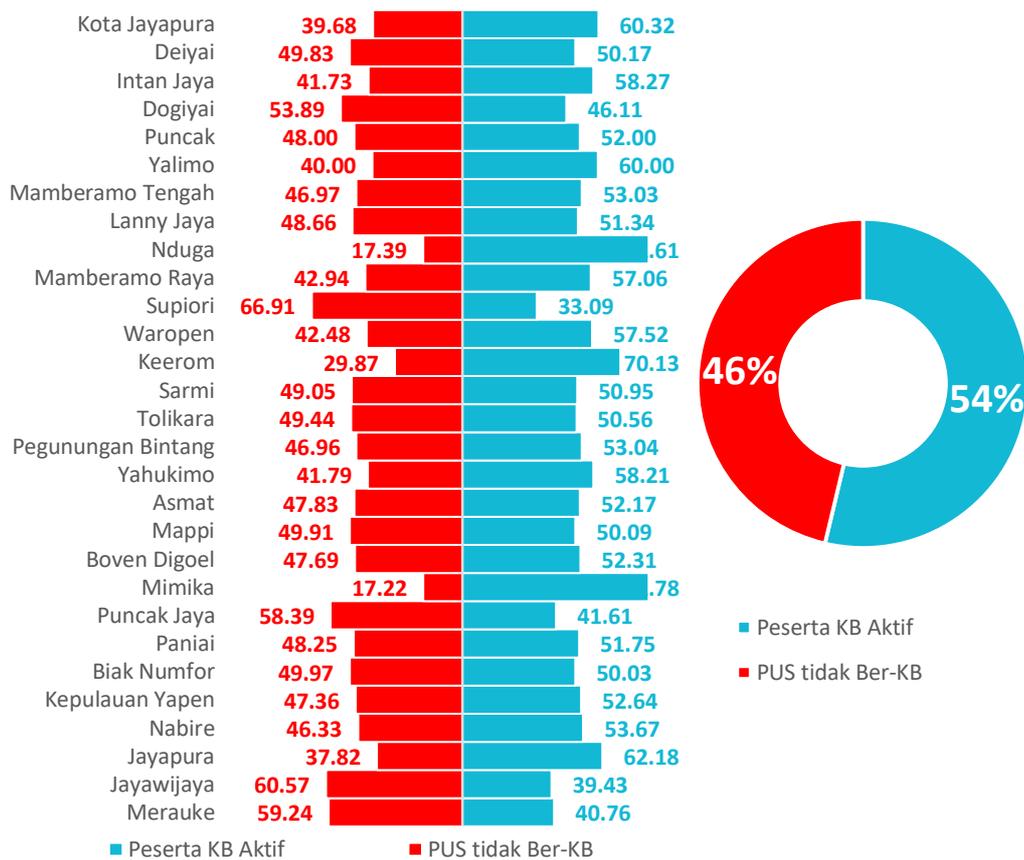
Sumber: Papua Dalam Angka 2016-2020

Pada tabel di atas tercatat rasio akseptor KB di Provinsi Papua menunjukkan kondisi yang cenderung semakin meningkat. Secara keseluruhan di Provinsi Papua terdapat 21 daerah yang

menunjukkan rasio akseptor KB cenderung semakin meningkat. Sedangkan (delapan) daerah lainnya terlihat memiliki nilai yang cenderung mengalami penurunan.

Selanjutnya secara keseluruhan persentase PUS aktif di Provinsi Papua pada tahun 2019 lebih besar jika dibandingkan dengan PUS tidak aktif. Kemudian jika dilihat berdasarkan wilayah, maka persentase PUS aktif tertinggi di Papua berada pada Kabupaten Mimika. Sedangkan persentase PUS tidak aktif tertinggi di Papua berada pada Kabupaten Supiori. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.73.
Pasangan Usia Subur Ber-KB Aktif dan Tidak Aktif



Sumber: Papua dalam angka 2020

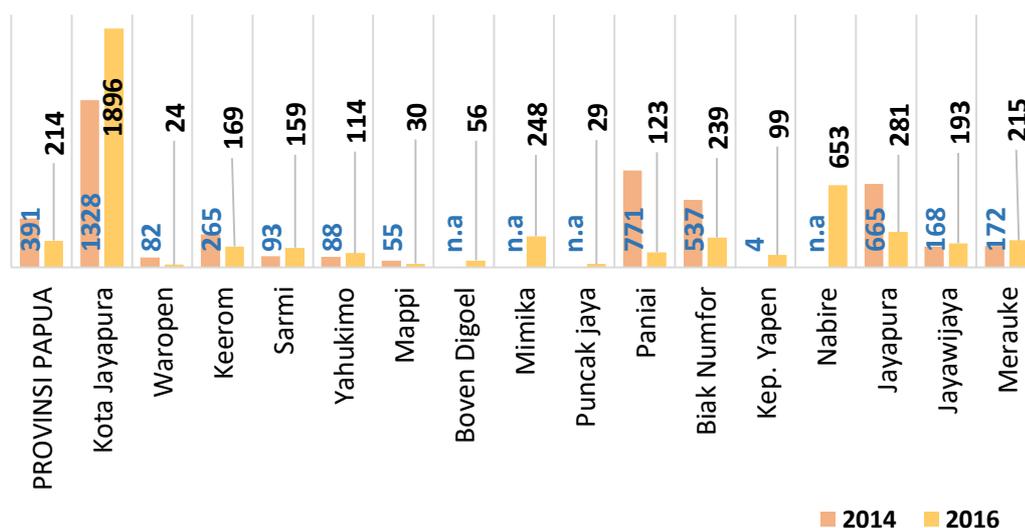
3.4.15. Perhubungan

1. Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 1:214 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan sebanyak 214 unit kendaraan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013, yaitu sepanjang 1 km dapat diakses oleh 391 unit kendaraan baik roda empat, roda dua dan kendaraan lainnya.

016 menunjukkan adanya perubahan di masing-masing wilayah di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016. Dari data statistik yang diperoleh Kota Jayapura memiliki perbandingan yang paling besar di antara beberapa kabupaten lainnya yaitu mencapai 1;1,896 yang berarti bahwa dalam 1 km diakses oleh 1,896 unit kendaraan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 berarti terjadi penambahan unit kendaraan baik roda empat, dua dan lainnya. Selain itu, terdapat juga kabupaten lain yang tercatat secara statistik memiliki rasio panjang jalan terhadap kendaraan meningkat di antaranya adalah Kabupaten Sarmi, Yahukimo, Kepulauan Yapen, Jayawijaya dan Merauke yang menandakan adanya peningkatan unit kendaraan. Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Waropen, Keerom, Mappi, Paniai, Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura memiliki nilai rasio yang menurun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penambahan ruas jalan selama ini.

Gambar 3.74.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2015-2018 (data diolah)

Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

- Entrop di Kota Jayapura;
- Wamena di Kabupaten Jayawijaya;
- Oyehe di Kabupaten Paniai;
- Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- Biak di Kabupaten Biak Numfor.

3.4.16. Komunikasi dan Informatika

Hingga awal 2018, total BTS yang telah didirikan tiga operator di seluruh wilayah Papua sebanyak 4.644 unit. Dengan jumlah terbanyak dibangun oleh Telkomsel. Anak perusahaan Telkom itu mengoperasikan 4.461 unit BTS. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan BTS milik Indosat 137 unit BTS, dan XL 46 unit BTS. Dengan jumlah BTS seperti itu, Telkomsel menjadi perusahaan yang mendominasi, yakni 96,06%. Bandingkan dengan Indosat Ooredoo 2,95% dan XL Axiata 0,99%.

Gambar 3.75.
Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2015-2019 (data diolah)

Ketersediaan akses terhadap internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat sepanjang tahun 2015-2019 akses terhadap penggunaan internet di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan, selain itu juga penggunaan HP juga terlihat terus meningkat hingga tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh persentase penduduk di atas usia 5 tahun tahun 2013 tercatat sebesar 32,04 persen meningkat menjadi 34,98 persen di tahun 2019. Sama halnya dengan akses terhadap internet tercatat pada tahun 2013 adalah sebesar 8,98 persen dan meningkat menjadi 19,74 persen. Meskipun terjadi peningkatan terhadap akses penggunaan HP dan internet, namun capaian tersebut masih terbilang masih rendah.

3.4.17. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Berdasarkan data statistik koperasi yang diperoleh di Provinsi Papua tercatat sampai dengan tahun 2019 koperasi yang aktif

adalah sebesar 1,73% yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Jika dirata-ratakan koperasi aktif di Provinsi Papua selama lima tahun terbilang sangat rendah yaitu hanya berkisar 1%. Tercatat kopeasi aktif tahun 2015 adalah sebesar 1,14%, kemudian terjadi penurunan hingga 0,51% di tahun 2016, selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Rendahnya koperasi aktif ini juga sangat dipengaruhi oleh Administrasi koperasi yang belum tertata dengan baik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kinerja koperasi di Provinsi Papua adalah faktor modal, kemudian kapasitas SDM koperasi yang belum memadai. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi manajemen koperasi yang tidak berjalan optimal.

Gambar 3.76.
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015-2019



Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

3.4.18. Penanaman Modal

Dalam mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi Papua masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data di atas menunjukkan sepanjang tahun 2015-2019 jumlah investor baik PMDN maupun PMA di Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata pertumbuhan terlihat semakin meningkat hingga 6,64 % setiap tahunnya. Demikian juga nilai investasi memiliki baik PMDN dan PMA terlihat cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Walaupun tidak konsisten mengalami peningkatan, namun tercatat hingga tahun 2019 total nilai investasi PMDN dan PMA mencapai Rp. 2,91 triliun.

Tabel 3.31.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Tahun	PMDN			PMA		
	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta) Target	Realisasi	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta) Target	Realisasi
2015	78	172.477.114	46.650.707	122	14.022.236	47.393.235
2016	84	183.760.084	59.483.954	125	13.122.953	70.278.818
2017	78	172.474.114	46.650.707	122	18.286.750	71.314.128
2018	87	183.760.084	10.462.000	146	13.133.953	1.132.270
2019	104	43.754.633	149.034.958	152	13.923.695	2.912.243.514

Sumber: Papua dalam angka 2020

Selanjutnya, rasio daya serap tenaga kerja dari perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2015 dari rata-rata satu perusahaan menyerap 279 tenaga kerja meningkat hingga tahun 2019 sebesar satu perusahaan menyerap 905 tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja di Provinsi Papua sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 3.32.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Perusahaan					
PMDN	78	87	78	87	104
PMA	122	126	122	146	152
Jumlah Perusahaan	200	213	200	233	256
Tenaga Kerja					
PMDN	14.805	14.881	15.423	-	231.627
PMA	40.919	64.087	63.321	77.209	-
Jumlah Tenaga Kerja	55.724	78.968	78.744	77.209	231.627
Rasio (TK/PMDN+PMA)	278,62	370,74	393,72	331,37	904,79

Sumber: Papua dalam angka 2020 (data diolah)

3.4.19. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa

kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

1. Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Dengan semakin banyaknya event olahraga baik pada tingkat kabupaten, nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir tercatat klub olahraga di Provinsi Papua juga kian bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan klub-klub olahraga berbagai cabang olahraga sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata bertumbuh sebesar 3,41% per tahunnya.

Gambar 3.77.
Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2020 (diolah)

Sampai dengan tahun tahun 2019 secara keseluruhan tercatat klub olahraga di Provinsi Papua ada 130 klub dengan berbagai macam cabor. Jumlah tenaga dan keolahragaan yang berkualitas Provinsi Papua secara konsisten juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 223 orang tenaga keolahragaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 365 orang. Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik

pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah atlet berprestasi di Provinsi Papua maningkat sangat pesat. Tercatat rata-rata pertumbuhan atlet yang berprestasi hingga mencapai 91,53 % setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 jumlah atlet yang berprestasi tercatat sebanyak 650 orang. Selanjutnya, partisipasi masyarakat di Provinsi Papua selama ini juga terus mengalami peningkatan dalam bidang olahraga. Adanya partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat gambar 3.74).

2. Organisasi Kepemudaan

Dalam meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan di Provinsi Papua selama ini, terdapat beberapa indikator dalam peningkatan peran serta kepemudaan di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33.
Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	44	47	47	52	52
Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	32	30	33	33	33
Jumlah Organisasi Pemuda	32	32	32	32	32
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	45	30	115	35	35

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2020

Dari 4 (empat) indikator di atas 3 (tiga) indikator pemberdayaan pemuda mengalami peningkatan yang positif diantaranya adalah Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina dan Jumlah Organisasi Pemuda. Sedangkan pelatiba kewirausahaan terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir. Tercatat organisasi pemuda di Provinsi Papua terus bertambah dari tahun-ke tahun, sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 52 oraganisasi pemuda yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga konsisten melakukan pembinaan maupun kegiatan pelatihan lainnya terhadap lembaga maupun organisasi kepemudaan, pada tahun 2019 sudah ada 33 lembaga/oraganisasi yang terbina.

3. Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam menunjang capaian olahraga yang terus konsisten, perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Provinsi Papua saat ini memiliki sarana dan prasarana olahraga terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019. Tercatat sarana olahraga masyarakat dan ruang publik bermutu sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 186 unit, kemudian gedung olahraga 34 unit dan sarana olahraga untuk pusat pertandingan sebanyak 190 unit. Dengan semakin bertambahnya sarana dan prasarana olahraga di Papua sangat dipengaruhi oleh akan dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua tahun 2021.

Tabel 3.34.
Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	175	186	186	186	186
Jumlah Gedung olahraga	10	15	15	16	34
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	175	176	177	190

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2020

4. Pekan Olahraga Nasional

Papua sebagai gudang atlet tiada hentinya selalu mencetak prestasi di setiap event olahraga. Sebagai contoh di event bergengsi nasional yaitu PON (Pekan Olahraga Nasional), Provinsi Papua selalu dapat mempertahankan posisinya di peringkat 10 besar mulai tahun 1981, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 3.37 berikut ini.

Tabel 3.35.
Peringkat Provinsi Papua Dalam Pekan Olahraga Nasional Periode 1973-2016

Tahun	Event	Prestasi			Jumlah	Peringkat
		Emas	Perak	Perunggu		
1973	PON VIII	1	4	7	12	15
1977	PON IX	7	14	7	28	10
1981	PON X	13	24	19	56	7
1985	PON XI	23	24	26	73	5
1989	PON XII	23	23	16	62	6
1993	PON XIII	17	14	16	47	6

Tahun	Event	Prestasi				
		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1996	PON XIV	17	17	16	50	6
2000	PON XV	18	17	23	58	7
2004	PON XVI	23	13	18	54	7
2008	PON XVII	14	23	16	53	11
2012	PON XVIII	9	11	16	36	15
2016	PON XIX	19	18	32	69	7

Sumber:

Posisi yang gemilang sempat ditorehkan Provinsi Papua di PON XI Tahun 1985. Kala itu Provinsi Papua mampu berada diperingkat ke-5 dengan perolehan medali sebanyak 73 buah dari 27 Cabor (Cabang Olah Raga) yang diikuti. Meskipun terjadi penurunan peringkat namun sampai dengan tahun 2004 Provinsi Papua masih berada di posisi 10 besar di Indonesia. Akan tetapi di PON XVII – XVIII prestasi Provinsi Papua menurun tajam, karena sudah tidak ada lagi di posisi 10 besar. Kemudian di tahun 2016 pada PON XIX, kembali Provinsi Papua dapat mengoreksi peringkatnya naik ke posisi 10 besar berada di urutan ke-7, dengan total medali yang diperoleh hampir menyamai prestasi di PON XI sebelumnya yaitu sebanyak 69 buah medali.

Pada PON XIX yang diadakan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua menyertakan kontingennya untuk mengikuti 25 Cabor (Cabang Olah Raga), diantaranya atletik, dayung, sepak bola, basket, wushu, dan sebagainya. Cabor yang paling banyak menyumbangkan medali emas adalah Dayung, Selam, Bilyar dan Dansa. Total perolehan medali emas dari keempat Cabor tersebut sebanyak 10 buah medali. Sepak bola yang sangat dibanggakan oleh Papua, saat itu hanya mampu memberikan medali perunggu. Selengkapnya perolehan medali dari setiap Cabor pada PON XIX yang diperoleh kontingen Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 3.36
Perolehan Medali Kontingen Provinsi Papua Pada PON XIX
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Cabang Olah Raga	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Dayung	4	5	5	14
2	Selam	2	2	0	4
3	Bilyar	2	1	0	3
4	Dansa	2	0	3	5
5	Atletik	1	2	1	4
6	Terbang Layang	1	1	1	3

No	Cabang Olah Raga	Emas	Perak	Perunggu	Total
7	Tenis Lapangan	1	0	3	4
8	Pabsi	1	0	2	3
9	Karate	1	0	1	2
10	Berkuda	1	0	1	2
11	Hoki Field	1	0	1	2
12	Sepatu Roda	1	0	0	1
13	Tarung Derajat	1	0	0	1
14	Tinju	0	2	1	3
15	Layar & Selancar	0	1	4	5
16	Menembak	0	1	1	2
17	Hoki Indor	0	1	1	2
18	Kempo	0	1	0	1
19	Softball	0	1	0	1
20	Tenis Meja	0	0	2	2
21	Bola Basket	0	0	1	1
22	Sepakbola	0	0	1	1
23	Drumband	0	0	1	1
24	Voli Pasir	0	0	1	1
25	Wushu	0	0	1	1
Total		19	18	32	69

Sumber:

3.4.20. Statistik

Kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Papua selain didukung dengan adanya instansi BPS, Provinsi Papua juga saat ini memiliki pusat data pembangunan yang merupakan salah satu unit di bawah Bappeda yaitu Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, yang disingkat PUSDALISBANG.

PUSDALIBANG Provinsi Papua adalah Wadah yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah. Selain itu Pusat Data dan Analisa Pembangunan berfungsi untuk : (1) menjembatani jaringan-jaringan dengan pemangku kepentingan pembangunan, (2) mendukung dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, (3) mendorong pengembangan kapasitas dan secara proaktif menyebarkan data dan informasi (terutama dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik dan pemerintah.

Muatan utama dari produk PUSDALISBANG adalah statistik hasil-hasil pembangunan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua, penyediaan data SIPD, analisis data statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data statistik secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Selama tahun 2016-2018, PUSDALISBANG Provinsi Papua telah menghasilkan beberapa dokumen statistik dan analisis pembangunan, antara lain : (1) Infografis Potret Capaian Pembangunan Papua, (2) Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (3) Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (4) Pencapaian Indikator Makro Provinsi Papua, (5) Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, PUSDALISBANG Provinsi Papua juga telah mengembangkan e-Government yang dapat diakses melalui website : [https:// pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel](https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel).

3.4.21. Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan

membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua. Selengkapnya perkembangan WBTB Papua dapat dilihat pada Tabel 3.37 berikut.

Tabel 3.37.
Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Papua	Seni Pertunjukan
2013	68	Ukiran Asmat	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2013	69	Barappen	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan
2013	70	Tifa	Papua	Seni Pertunjukan
2013	77	Noken	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	120	Tomako Batu	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	121	Koteka	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
2016	142	Elha	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	143	Aker	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	144	Honai	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	145	Khombow	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	146	Terfo	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	143	Yu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	144	Pokem	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO

sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2015 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

Gambar 3. 78.
Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta



Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.4.22. Perpustakaan

Sepanjang tahun 2015-2016 gedung perpustakaan di Provinsi Papua mengalami peningkatan dan tersebar di 29 kabupaten/kota. Tercatat peningkatan jumlah gedung perpustakaan dimulai dari tahun 2015 sebanyak 50 unit kemudian meningkat sampai dengan tahun 2016 sebesar 321 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya perpustakaan di Provinsi Papua dapat memberikan ruang kepada siapa saja untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Gambar 3.79.
Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua



Sumber: Provinsi Papua

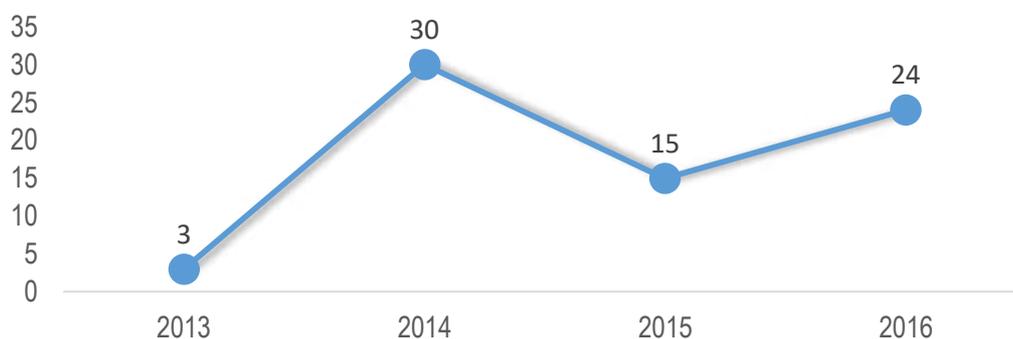
Selain ketersediaan perpustakaan, koleksi buku yang tersedia dan jumlah pengunjung juga mengalami peningkatan dalam rentang waktu dua tahun terakhir. Tercatat peningkatan koleksi buku di Provinsi Papua meningkat sebesar 5,29%. Selanjutnya, dengan semakin banyaknya perpustakaan yang dibuka ini membuat jumlah kunjungan ke perpustakaan juga terlihat terus mengalami peningkatan. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 75.146 pengunjung, dengan peningkatan sebesar 2,79%.

3.4.23. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku merupakan perangkat yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Berdasarkan 0, diketahui bahwa perangkat daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku

baru mencapai 24 PD, dengan kata lain masih terdapat beberapa OPD yang belum menerapkan arsip masing-masing PD secara baku.

Gambar 3.80.
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku



Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

3.4.24. Pariwisata

Potensi pariwisata di Provinsi Papua sangat beragam jenisnya yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Objek wisata di Papua terbagi atas dua kelompok yaitu wisata alam dan wisata buatan. Tercatat objek wisata alam di Provinsi Papua terdiri dari 120 objek, dan objek wisata buatan sebanyak 13 objek. Tercatat pada tahun 2015-2016 terjadi peningkatan jumlah tamu baik WNA dan WNI sangat pesat yaitu sebesar 64,73 persen, sampai dengan tahun 2016 jumlah tamu adalah sebanyak 900,570 orang (lihat gambar 3.78).

Gambar 3.81.
Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua

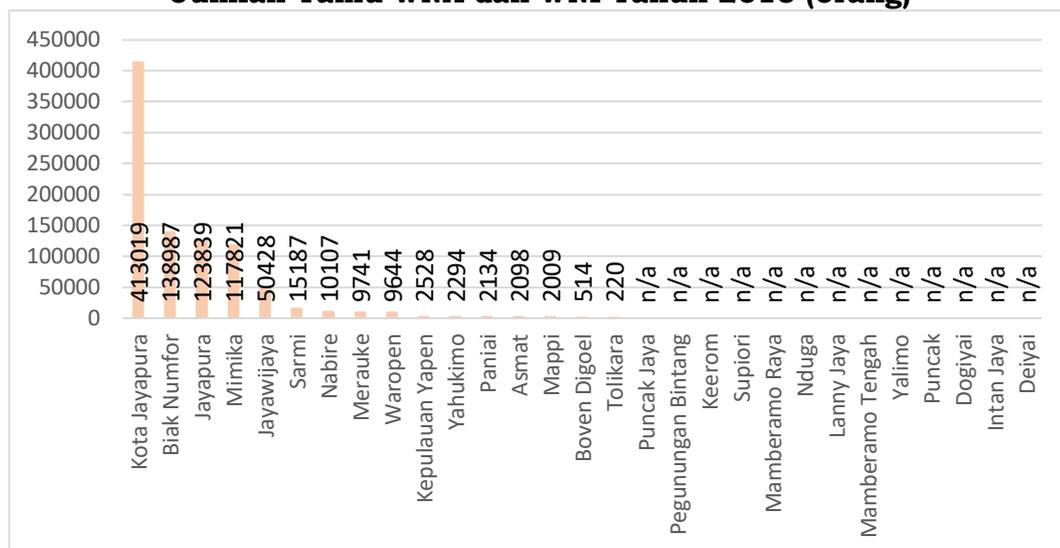


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan gambar 3.79, diketahui bahwa kunjungan wisata di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Sebaran kunjungan wisatawan di Papua tidak terlepas dari adanya event-event yang dilaksanakan hampir ada di setiap tahun di berbagai

daerah di Papua. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah wisatawan dalam negeri maupun mancanegara mencapai 900,570 orang atau meningkat sebesar 39,29% dari tahun sebelumnya. Selain itu, lama kunjungan wisatawan di Papua sangat beragam dalam rentan waktu empat tahun terakhir, tercatat rata-rata lama kunjungan berkisar antara 2-6 hari setiap tahunnya.

Gambar 3.82.
Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)



Sumber: Statistik BPS, 2017

3.4.25. Pertanian

Perkembangan pertanian di Provinsi Papua dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Papua dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Papua. Berdasarkan gambar 3.38, diketahui bahwa rata-rata produktifitas pertanian secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, meskipun terdapat dua komoditi terjadi penurunan yaitu padi sawah dan jagung. Hal tersebut terlihat pada produktifitas total di Papua terus meningkat dari 6,49 ton/ha di tahun 2015 menjadi 7,74 ton/ha di tahun 2019. Rata-rata setiap tahunnya produktifitas meningkat hingga mencapai 5,23%.

Tabel 3. 38.
Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Komoditi	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Luas Panen (Hektar)						
Padi Sawah	38.977	51.730	55.004	59.420	54.132	51.853
Jagung	2.736	3.342	3.464	64.853	64.853,3	27.850**
Kacang Kedelai	2.761	5.723	6.282	485	485,1**	3.147**
Kacang Tanah	2.268	2.902	3.187	1.072	1.071,9**	2.100**

Komoditi	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Ubi Kayu	3.822	3.463	3.559	1.903	1.903,3**	2.930**
Ubi Jalar	36.091	35.863	37.656	12.681	1.2680,5**	26.994**
Total	86.655	103.023	109.152	140.414	135.125,8* *	115.932* *
Produksi (Ton)						
Padi Sawah	374.949	394.342	414.736	436.184	235.340	371.110
Jagung	6.666	8.143	8.550	12.476	12476**	9.662**
Kacang Kedelai	3.523	7.964	9.082	1.761	1.761**	4.818**
Kacang Tanah	2.498	3.308	3.729	1.788	1.788**	2.622**
Ubi Kayu	46.388	45.059	47.112	23.576	2.3576**	37.142**
Ubi Jalar	446.952	469.441	492.913	307.333	307.333**	404.794* *
Produktifitas (Ton/Hektar)						
Padi Sawah	9,62	7,62	7,54	7,34	4,35	7,29
Jagung	2,44	2,44	2,47	0,19	0,19**	1,55**
Kacang Kedelai	1,28	1,39	1,45	3,63	3,63**	2,27**
Kacang Tanah	1,10	1,14	1,17	1,67	1,67**	1,35**
Ubi Kayu	12,14	13,01	13,24	12,39	12,39**	12,63**
Ubi Jalar	12,38	13,09	13,09	24,24	24,23**	17,41**

Sumber: Bappeda Papua, 2020 (data diolah)

Secara keseluruhan terdapat empat komoditi dengan produktifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan ubi jalar. Sedangkan rata-rata produkstifitas padi sawah dan jagung sepanjang tahun 2015-2019 mengalami penurunan hingga mencapai masing-masing sebesar 16,32% dan 23,03% setiap tahunnya. Namun secara nilai produksi terlihat bahwa Padi Sawah, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar terkecuali jagung yang meningkat dari sisi produksi. adanya Dalam bidang perkebunan, secara keseluruhan luas panen untuk 12 komoditi di Provinsi Papua tercatat pada tahun 2015 sebesar 115.231 ha dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2018 sebesar 159.493 ha atau meningkat sebesar 38,41%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.39.
Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018

Komoditi	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Luas Panen (Hektar)					
Kakao	34.950	35.223	34.130	34.500	34.701
Kopi	10.067	11.839	10.906	11.407	11.055
Kelapa	27.305	125.486	25.063	25.458	50.828
Karet	4.387	6.707	8.659	8.729	7.121

Komoditi	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Sawit	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244
Sagu	13.516	35.486	155.675	56.763	65.360
Pinang	3.882	4.435	4.245	4.269	4.208
Mente	4.796	5.100	2.351	2.337	3.646
Cengkeh	576	30	323	323	313
Lada	45	45	42	42	44
Kapuk Randu	799	816	853	853	830
Jarak Pagar	664	605	568	568	601
Total	115.231	240.016	257.059	159.493	192.950
Produksi (ton)					
Kakao	10.133	10.297	10.732	10.841	10.501
Kopi	2.009	3.101	2.503	2.688	2.575
Kelapa	15.320	15.993	16.136	15.244	15.673
Karet	3.342	3.342	6.990	5.117	4.698
Sawit	8.121	8.121	8.121	8.121	8.121
Sagu	24.959	26.618	66.593	67.931	46.525
Pinang	602	1.107	1.117	1.478	1.076
Mente	584	593	709	946	708
Cengkeh	3	3	47	47	25
Lada	6	6	7	4	6
Kapuk Randu	35	35	110	110	73
Jarak Pagar	278	278	276	276	277
Produktifitas (Ton/Hektar)					
Kakao	5,38	5,47	5,99	6,00	5,71
Kopi	4,38	5,54	6,49	6,19	5,65
Kelapa	8,23	9,33	9,78	9,05	9,10
Karet	9,16	984,33	10,27	7,52	252,82
Sawit	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88
Sagu	26,85	8,81	16,85	16,94	17,36
Pinang	3,29	5,16	5,34	7,08	5,22
Mente	2,01	2,98	3,20	4,29	3,12
Cengkeh	1,00	-	2,87	2,87	1,69
Lada	4,07	4,07	2,06	1,18	2,85
Kapuk Randu	0,48	0,47	1,45	1,45	0,96
Jarak Pagar	11,21	11,03	11,17	11,17	11,15

Sumber: Bappeda Papua, 2020 (data diolah)

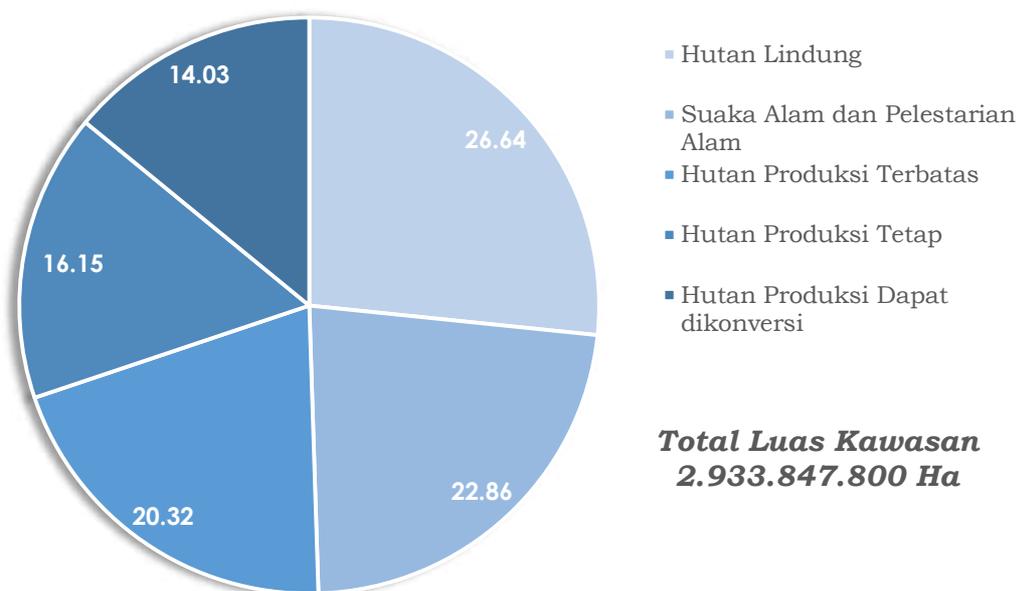
Produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Papua secara keseluruhan terus mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2015 adalah rata-rata sebesar 858 ton/ha turun menjadi 839 ton/ha atau menurun sebesar 2,25 % di tahun 2018. Jika dilihat per komoditi, tanaman Pinang, Mente, Cengkeh dan Kapuk Randu memiliki produktivitas tertinggi yaitu bisa mencapai di atas 90-95% yaitu pada tahun 2015 ke tahun 2018. Kemudian diikuti oleh

komoditi kopi dan lada yang memiliki produktivitas berkisar antara 40-70% untuk tahun 2015 ke tahun 2018. Sedangkan komoditi lainnya hanya mampu meningkat di bawah 20% untuk tahun 2015-2018.

3.4.26. Kehutanan

Secara keseluruhan total luas kawasan di Provinsi Papua adalah sebesar 32.757.059 Ha yang terdiri atas hutan produksi (terbatas), hutan produksi (tetap), hutan produksi (dapat dikonversi), hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, areal lainnya dan kawasan perairan.

Gambar 3.83.
Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2020 (data diolah)

Dengan luas kawasan hutan yang cukup luas, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu kapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya sepanjang tahun 2015-2018. Produksi kayu bulat dalam kurun waktu 2015-2018 cenderung mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2015 produksinya mencapai 659.712 m³ turun menjadi 474.279 m³ di tahun 2018. Selain itu, produksi kayu gergajian dan kayu lapis juga tercatat mengalami penurunan jumlah produksi hingga di tahun 2018 masing-masing sebesar -15,24% dan -26,11%.

Tabel 3. 40.
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m3)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
2015	659.712	125.374,04	279.574	-
2016	525.314	112.063,54	238.624	9.450
2017	439.120	109.854,37	217.145	-
2018	474.279	106.267,91	206.580	-

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

3.4.27. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Luas Areal Pertambangan

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Sepanjang tahun 2013-2016 luas areal penambangan terus meningkat dengan rata-rata 33,55% setiap tahunnya. Meningkatnya luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat pada tahun 2015-2016.

Tabel 3.41.
Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan (ha)

Uraian	2013	2014	2015	2016
Eksplorasi	100,204	100,204	3,023,359	3,257,179
Eksploitasi	100,204	100,402	100,402	100,402
Area Penambangan Liar	789	789	789	789
Total	201,197	201,395	3,123,761	3,358,370

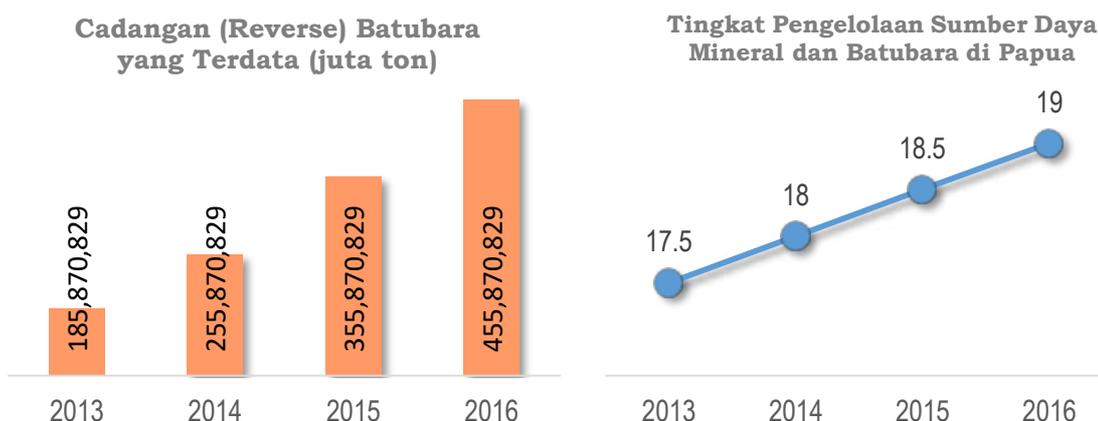
Sumber: Bappeda Papua, 2018

2. Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah cadangan berubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2013 mencapai 185,9 juta ton dan pada tahun 2016 meningkat mencapai 455,9 juta ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk mengeksplorasi sumber daya batubara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun persentase pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Papua hingga tahun 2016 baru

mencapai 19% (lihat 0). Ekplorasi yang lebih mendalam perlu dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan sumberdaya sebagaimana kegunaannya. Namun pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan sumberdaya yang ada dan tidak merusak lingkungan.

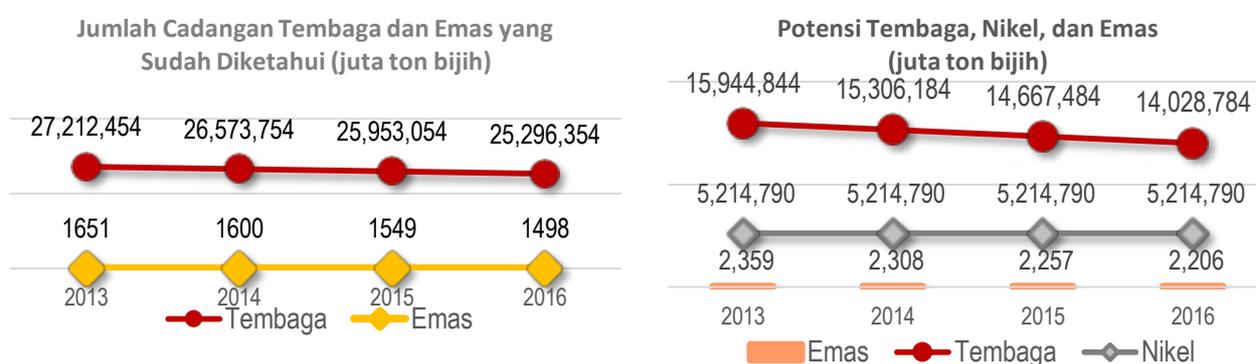
Gambar 3.84.
Jumlah Cadangan (Reserve) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Papua, 2018

Jumlah cadangan tembaga dan emas yang telah diketahui di Provinsi Papua sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 terus menurun dari 1.651 juta ton biji tembaga pada tahun 2013 menurun hingga 1.498 juta ton tembaga pada tahun 2016. dan 27,21 juta ton bijih emas pada tahun 2013 menurun menjadi 25,29 juta ton bijih emas pada tahun 2016 (lihat 082).

Gambar 3.85.
Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih)

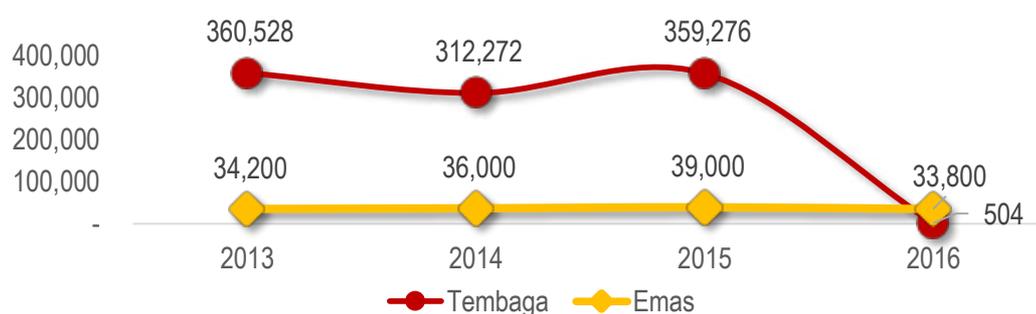


Sumber: Bappeda Papua, 2018

Potensi tembaga dan emas di Provinsi Papua menunjukkan penurunan sejak tahun 2013 sebanyak 15,94 juta ton bijih emas dan 2,36 juta ton bijih tembaga menurun menjadi 14,03 juta ton bijih tembaga pada tahun 2016 dan 2,20 juta ton bijih emas pada tahun 2016. Namun tidak untuk nikel yang angkanya sejak tahun

2013 hingga tahun 2016 masih tetap sebanyak 5,21 juta ton bijih nikel. Hal ini menunjukkan untuk sumberdaya mineral seperti bijih nikel belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan untuk dilakukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Gambar 3.86.
Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih)



Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa produksi sektor pertambangan seperti tembaga dan emas mengalami fluktuasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 dari 360,52 juta ton bijih emas sempat menurun menjadi 312,27 juta ton emas per tahun pada tahun 2014 kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 359,27 juta ton bijih emas dan produksi kembali menurun hingga 504 juta ton bijih emas pada tahun 2016.

Penurunan produksi bijih emas dan tembaga pada tahun 2014 disebabkan adanya negosiasi ulang kontrak sumber daya alam antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport, kemudian pada tahun 2016 karyawan PT. Freeport melakukan mogok kerja yang mengakibatkan Produksi emas, dan tembaga kembali menurun. Sedangkan produksi tembaga terlihat sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 terus meningkat dari 34,2 juta ton bijih pada tahun 2013, namun pada tahun 2016 menurun hingga 33,8 juta ton bijih tembaga.

3. Ketersediaan dan Sumber Penerangan

Persentase rumah tangga di Provinsi Papua yang telah menggunakan listrik (PLN dan non PLN) terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rumah tangga yang menggunakan listrik baru mencapai 53,17% kemudian meningkat menjadi 73,63% pada tahun 2019. Dari data BPS terlihat rumah tangga menurut sumber penerangan yang paling rendah pada tahun 2015 terdapat

di kabupaten Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Asmat. Pada tahun 2019 kabupaten dengan sumber penerangan listrik paling rendah adalah Yahukimo, Puncak, dan Dogiyai.

Tabel 3.42.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya								
MAMTA										
Jayapura	96,01	3,99	99,78	0,22	97,07	2,93	97,99	2,01	99,85	0,15
Sarmi	88,60	11,40	79,14	20,86	81,85	18,15	85,22	14,79	90,92	9,08
Keerom	85,53	14,47	92,11	7,89	95,54	4,46	97,54	2,47	94,62	5,37
Mamberamo Raya	58,53	41,47	51,74	48,26	43,88	56,12	64,81	35,19	74,01	25,99
Kota Jayapura	96,23	3,77	99,48	0,52	99,88	0,12	99,28	0,72	100,00	0,00
LA PAGO										
Jayawijaya	50,69	49,31	48,71	51,29	57,93	42,07	79,15	22,50	73,66	26,34
Puncak Jaya	11,16	88,84	12,16	87,84	14,91	85,09	17,58	82,42	87,19	12,81
Yahukimo	3,76	96,24	5,79	94,21	2,90	97,10	5,49	94,51	15,70	84,30
Pegunungan Bintang	28,45	71,55	19,01	80,99	34,22	65,78	52,85	47,15	83,91	18,09
Tolikara	7,33	92,67	7,56	92,44	11,07	88,93	74,99	25,01	85,23	14,76
Nduga	n.a	n.a	11,18	88,82	6,49	93,51	11,08	88,92	49,87	50,13
Lanny Jaya	5,83	94,17	9,49	90,51	3,09	96,91	44,11	55,89	73,25	26,74
Mamberamo Tengah	8,02	91,98	86,93	13,07	38,92	61,08	4,08	95,92	80,56	19,44
Yalimo	48,76	51,24	37,02	62,98	85,83	14,17	74,57	25,43	85,91	14,09
Puncak	73,78	26,22	5,27	94,73	15,15	84,85	0,00	100,00	2,79	97,21
MEE PAGO										
Nabire	84,89	15,11	82,58	17,42	92,65	7,35	89,78	10,22	95,34	4,67
Paniai	13,97	86,03	22,92	77,08	31,97	68,03	44,05	55,96	38,45	61,45
Mimika	93,69	6,31	96,12	3,88	98,14	1,86	99,83	0,18	88,34	11,66
Dogiyai	19,07	80,93	18,58	81,42	3,61	96,39	27,40	72,60	4,00	95,99
Intan Jaya	10,55	89,45	9,87	90,13	11,06	88,94	30,36	69,64	89,25	10,75
Deiyai	49,33	50,67	49,70	50,30	44,65	55,35	94,00	6,00	72,93	27,07
SAERERI										
Kepulauan Yapen	75,65	24,35	65,49	34,51	70,40	29,60	77,00	23,01	76,48	23,51
Biak Numfor	98,78	1,22	98,65	1,35	98,64	1,36	98,87	1,31	98,96	1,03
Waropen	73,50	26,50	87,72	12,28	93,03	6,97	93,82	6,18	88,31	11,70
Supiori	45,60	54,40	59,91	40,09	74,21	25,79	96,58	3,42	95,96	4,03
ANIM HA										
Merauke	94,37	5,63	93,89	6,11	94,70	5,30	95,54	4,46	94,98	5,01
Boven Digoel	73,41	26,59	69,60	30,40	91,64	8,36	86,04	13,96	86,52	13,48

Kabupaten/Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya								
Mappi	20,78	79,22	23,67	76,33	26,86	73,14	48,95	51,05	43,38	56,62
Asmat	21,97	78,03	18,18	81,82	81,29	18,71	79,82	20,18	64,89	35,11
Papua	53,17	46,83	50,90	49,10	55,82	44,18	64,51	35,56	73,63	26,43

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2019

3.4.28. Perdagangan

Volume ekspor menurut negara tujuan pada tahun 2015 mencapai 1.168.206 ton dengan jumlah volume ekspor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 1.009.511 ton. Pada tahun 2019 jumlah ekspor meningkat sangat pesat yaitu mencapai 742.324.122 ton, dengan benua tujuan ekspor terbesar adalah Asia sejumlah 613.903.804 ton. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

Tabel 3.43.
Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton)

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)				Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)			
	2015	2016	2018	2019	2015	2016	2018	2019
ASIA	1.009.511	1.144.285	151.239.100	613.903.804	308.394	312.286	279.047	229.764
Jepang	220.900	280.200	1.098.615.299	70.000.000	4	760	2.983	460
Singapura	-	-	-	-	-	-	269.460	221.335
Korea Selatan	75.721	137.289	210.426.682	50.000.000	2.590	3.587		
Filipina	111.000	163.200	85.150.000	261.060.110	171	1.469	279	464
Tiongkok	167.000	263.000	311.818.282	100.776.998	96	7.279	1.571	1.842
India	429.440	270.000	335.550.000	96.875.000	-	-		
Malaysia					36	44	4.333	4.482
Asia Lainnya	5.450	30.597	151.239.100	35.191.696	305.498	299.148	421	1.181
EROPA	32.000	38.000	239.750.000	40.000.000	1.878	2.115	626	6
Spanyol	32.000	38.000	84.000.000	30.000.000	-	-		
Inggris	15	-	-	-	74	86	0	0
Jerman	-	-	20.000.000	10.000.000	3	6	617	2
Swiss	-	-	-	-	142	194	0	0
Italia	-	-	-	-	217	395	0	0
Europa Lainnya	-	-	135.750.000	-	1.442	1.434	8	4
AMERIKA	11.655	12.551	26.731.768	45.360.309	10.435	11.085	5.667	335
Amerika Serikat	11.655	12.551	26.501.408	45.360.309	9.548	9.442	5.535	178
Kanada	-	-	-	-	753	1.461	132	152
Amerika Lainnya	-	-	230.360	-	135	182	0	5
OCEANIA	509	625	2.354.305	2.042.104	46.957	54.262	50.410	30.573
Australia	23	9	55.806	41.156	46.905	54.210	50.234	30.353
Selandia Baru	-	-	-	-	-	1	1	0
Oseania Lainnya	486	617	2.298.499	2.000.948	52	51	175	220
TIMUR TENGAH	114.532	64.077	56.682.928	41.017.905	-	-		
Saudi Arabia	93.225	39.081	40.695.485	37.140.855	-	-		
Uni Emirat Arab	11.562	12.510	8.200.533	1.529.780	-	-		
Timur Tengah Lainnya	9.745	12.485	7.786.910	2.347.270	-	-		
Negara Lainnya	-	-	-	-	5	15		2
Jumlah	1.168.206	1.259.539	1.424.134.300	742.324.122	367.670	379.763	335.750	260.681

BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Sedangkan volume impor menurut negara asal pada tahun 2015 mencapai 367.670 ton dengan jumlah volume impor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 308.394 ton. Dan pada tahun 2019 impor barang terlihat menurun yaitu sebesar 260.681 ton, dengan benua tujuan impor terbesar adalah Asia sejumlah 229.764 ton.

Tabel 3.44.
Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton)

Pelabuhan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Pelabuhan (Ton)					Volume Impor Menurut Pelabuhan (Ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Frans Kaisepo	4	365	1	-	2613	-	-	-	-	-
Jayapura	662	68	4089	2896929	4762209	10.225	9.233	34.901.982	5.227.441	4.242.219
Serui	40.408	30.894	89.870	49.872.958	99.362.204	-	-	-	7.537.794	1.045.815
Merauke	41.609	45.245	-	1.892.532	8.344.477	417	-	-	8.885.229	3.497.579
Amamapare	782.958	1.179.368	956.820	1.307.049.436	527.291.156	356.982	370.483	373.480.445	482.288.175	334.984.076
Sentani	1	164	8	417	5888	38	46	5.810.504	6.032.084	6.298.681
Bade	79.528	70.562	56.850	62.422.028	99.493.697	-	-	-	6.772.247	-
Kimaam	26.049	36.665	-	-	3.060.110	-	-	-	-	-
Ubrub	-	-	-	-	-	7	-	-	1.051	45
Nabire	15	15	-	-	1768	-	-	32.416.572	3.455.025	5.278.249
Ilaga	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000	-
Wamena	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Numfoor	15	789	1980	-	-	-	-	-	-	-
Wagethe	-	-	-	-	-	-	-	446.609.503	520.419.046	355.347.094
Jumlah	971.218	1.364.120	1.109.618	1.424.134.300	742.324.122	367.669	379.762	446.609.503	520.419.046	355.347.094

BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Nilai ekspor yang dihasilkan dalam waktu lima tahun terakhir memiliki trend yang negative, hal tersebut juga dilihat pada volume barang yang diekspor terlihat juga mengalami penurunan. Nilai ekspor menurut golongan barang yang paling tinggi sepanjang tahun 2015-2019 didominasi oleh golongan barang Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26). Kemudian diikuti dengan golongan barang Kayu dan Barang dari Kayu (HS44). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.45.
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit
Provinsi Papua Tahun 2015 – 2019 (ton/US\$)

Golongan Barang	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26)	Volume (kg)	1.015.240	1.114.400	952.440.410	1.306.650.600	527.250.100
	Nilai (US\$)	1.831.814.111	1.907.955.250	2.341.210.268	3.758.070.560	1.086.855.063
Kayu dan Barang dari Kayu (HS44)	Volume (kg)	152.036	144.500	147.458.682	107.346.349	132.802.708
	Nilai (US\$)	123.336.544	96.181.410	100.430.276	90.379.995	88.227.769
Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03)	Volume (kg)	600	6.314	8.170	557	13.934
	Nilai (US\$)	713	59.166	270.868	17.722	206.060
Lemak Nabati & Hewani (HS15)	Volume (kg)	5.770	47.955	211.493	7.659.152	73.745.856
	Nilai (US\$)	20.449	79.907	61.197	3.289.522	29.428.818
Lainnya	Volume (kg)	924.110	584.338	9.499.657	2.477.642	8.511.524
	Nilai (US\$)	1.168.206.165	1.259.538.627	18.813.681	4.704.288	5.233.604
Jumlah	Volume (kg)	1.168.206	1.259.539	1.109.618.412	1.424.134.300	742.324.122
	Nilai (US\$)	2.007.516.930	2.008.078.061	2.460.786.291	3.856.462.086	1.209.745.254

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2019, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Andil ekspor Provinsi Papua terhadap nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 1,41% setiap tahunnya. Sedangkan andil nilai impor Papua terhadap Indonesia dalam lima tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 0,36% per tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.46.
Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US\$) Tahun
2013-2019 (US\$/%)

Tahun	Ekspor			Impor		
	Papua	Indonesia	Andil	Papua	Indonesia	Andil
2015	2.007,50	150.283,70	1,34	746,70	142.694,80	0,52
2016	2.008,10	145.186,20	1,38	721,30	135.652,90	0,53
2017	2.460,79	168.828,20	1,46	446,61	156.985,50	0,28
2018	3.856,46	180.012,70	2,14	520,42	188.711,30	0,28
2019	1.209,75	167.683,00	0,72	355,35	170.727,40	0,21

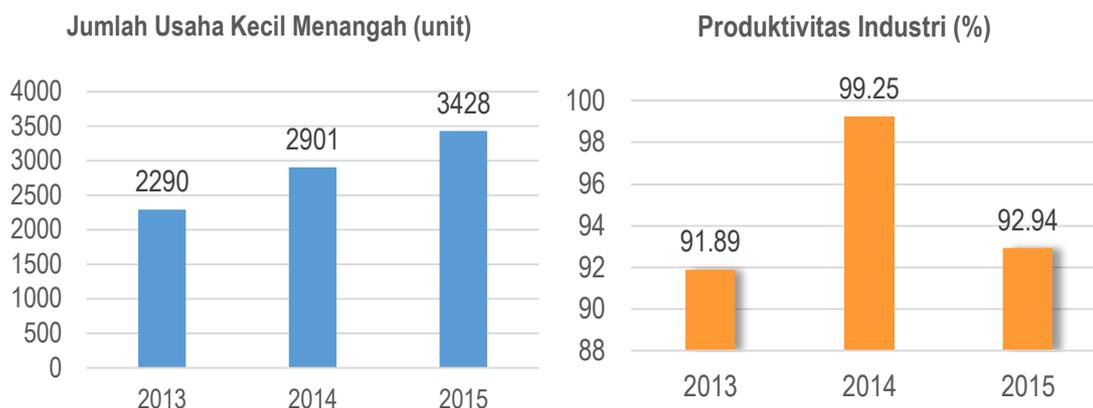
Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

3.4.29. Perindustrian

Jumlah unit usaha industri kecil menengah Provinsi Papua mencapai 2.290 unit pada tahun 2013 dan meningkat hingga 3.428 unit pada tahun 2015. Peningkatan jumlah industri kecil dan

menengah tersebut diiringi dengan peningkatan produktivitas industri pada tahun 2013 sebesar 91,89%, kemudian meningkat hingga 99,25% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 persentase peningkatan produktivitas industri mencapai 92,94%.

Gambar 3.87.
Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

3.4.30. Kelautan dan Perikanan

Perahu/Kapal tangkap ikan terbagi 3 yaitu, kapal motor, perahu tak bermotor dan perahu motor tempel. Pada tahun 2013 jumlah perahu/kapal tangkap ikan sebanyak 6.953, pada tahun 2015 meningkat hingga 10.997 dan pada tahun 2011 sebanyak 11.356, namun pada tahun 2016 jumlah perahu/kapal tangkap ikan menurun menjadi 4.595.

Tabel 3.47.
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan

Kabupaten /Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Merauke	747		83	171		417	574	-	462	661	114	132	1.209	1.078	771	303
Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	7		3	-		515	408		483	9	156	44	490	524	567	44
Nabire	5	813	-	-		811	425	425		6	200	200	5	1.630	625	625
Kepulauan Yapen	15		-	-		875	1.965		872	19	764	764	887	894	2.729	764
Biak Numfor	201		1	-			2.981	-		206	32	60	201	206	3.014	60
Paniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mimika	84	863	-	-		650	-	517	648	83	62	98	732	1.596	62	615
Boven Digoel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mappi	135	898	-	-			125	376		160	27	52	135	1.058	152	428
Asmat	32		-	-		625	499	499	620	42	-	-	652	667	499	499
Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	26	495	-	-	482	175	195	216	168	30	25	25	676	700	220	241
Keerom	-		-	-	-	620	-	-	-	32	-	-	-	652	-	-
Waropen	-		-	-		180	363		175	-	48	53	175	180	411	53
Supiori	-		-	-		425	622	222	421	-	20	39	421	425	642	261
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kabupaten /Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	63	803	-	-	798	515	1.563	644	509	69	101	58	1.370	1.387	1.664	702
Provinsi Papua	1.315	3.872	87	171	1.280	5.808	9.720	2.899	4.358	1.317	1.549	1.525	6.953	10.997	11.356	4.595

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Papua sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 232.157 rumah tangga perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan perairan umum, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 233.563 rumah tangga perikanan.

Tabel 3.48.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	55.664	50.425	2.028	2.059	57.691	52.484
Jayawijaya	-	-	707	721	707	721
Jayapura	15.364	18.025	1.411	1.439	16.775	19.463
Nabire	10.678	13.248	61	63	10.738	13.310
Kepulauan Yapen	5.508	8.370	-	-	5.508	8.370
Biak Numfor	38.569	31.266	-	-	38.569	31.266
Paniai	-	-	205	211	205	211
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-
Mimika	21.561	20.661	75	96	21.636	20.757
Boven Digoel	-	-	62	63	62	63
Mappi	20.641	21.431	4.946	5.095	25.587	26.526
Asmat	5.818	6.443	99	104	5.917	6.547
Yahukimo	-	-	148	157	148	157
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-
Sarmi	1.156	1.216	-	-	1.156	1.216
Keerom	-	-	-	-	-	-
Waropen	13.141	18.052	941	955	14.082	19.007
Supiori	10.544	13.571	-	-	10.544	13.571
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	22.760	19.820	72	76	22.832	19.895
Provinsi Papua	221.403	222.527	10.754	11.037	232.157	233.563

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 11.091 ton menurun menjadi 7.403 ton.

Tabel 3.49.
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Kab/Kota	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	1	-	21	21	77	19	-	-	1	-	-	-	100	40
Jayawijaya	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-
Jayapura	-	-	7	7	39	-	-	-	1.361	1.361	-	-	1.408	1.369
Nabire	-	-	600	600	342	356	-	-	-	-	-	-	942	956
Kepulauan Yapen	96	85	-	-	26	26	-	-	12	13	-	-	134	124
Biak Numfor	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10
Paniai	-	-	-	-	250	260	-	-	-	-	-	-	250	260
Puncak Jaya	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Mimika	-	-	-	-	61	40	-	-	-	-	-	-	61	40
Boven Digoel	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
Mappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asmat	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
Yahukimo	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keerom	-	-	-	-	253	203	-	-	-	-	-	-	253	203
Waropen	-	-	-	-	122	123	-	-	-	-	-	-	122	123
Supiori	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	-	13	918	918	6.568	3.052	-	-	186	157	-	-	7.672	4.139
Provinsi Papua	125	113	1.546	1.546	7.859	4.213	-	-	1.561	1.531	-	-	11.091	7.403

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

BAB IV KERANGKA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

4.1. Kerangka Pembangunan Sosial Ekonomi Makro Daerah

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Kinerja ekonomi Provinsi Papua sepanjang tahun 2015-2018 terlihat meningkat signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,11% per tahun. Kemudian di tahun 2019, karena ada permasalahan pada produksi pertambangan tembaga, sehingga mengurangi total ekspor regional, akhirnya PDRB Papua menurun cukup tajam di tahun 2019 sebesar -14,44% bila dibandingkan tahun 2018. Perhatikan Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.
PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010
Triwulan I 2015 – Triwulan IV 2019
(Rp. Juta)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
2015	29.991.372.83	33.700.982.57	32.139.029.36	34.480.220.11	130.311.604.86
2016	29.720.415.48	31.922.774.98	38.707.078.43	41.870.822.72	142.221.091.62
2017	30.825.169.22	33.919.159.16	40.206.817.27	43.872.483.41	148.823.629.06
2018	38.990.011.00	41.919.237.00	42.758.440.00	36.061.237.57	159.728.925.61
2019	31.141.517.53	31.867.390.00	36.296.034:91	37.366.359:40*	136.670.281:35*

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

* Proyeksi, data diolah (2019)

Jika diperhatikan perkembangan per triwulan cenderung fluktuatif menurun. Kinerja perekonomian tahun 2015 triwulan III sebesar Rp32.139 milyar terlihat menurun jika dibandingkan triwulan II sebesar Rp33.700 milyar (qoq), demikian juga kinerja perekonomian tahun 2018, kinerja perekonomian triwulan IV sebesar Rp36.061 milyar terlihat menurun jika dibandingkan triwulan III sebesar Rp42.758 milyar (qoq). Adapun untuk triwulan I – III tahun 2019 diperkirakan terus mengalami peningkatan,

sehingga diharapkan pada triwulan IV 2019 PDRB Papua bisa mencetak nilai sebesar Rp37.366 milyar.

Tabel 4.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Papua YoY
Triwulan I 2015 – Triwulan IV 2019
(dalam %)

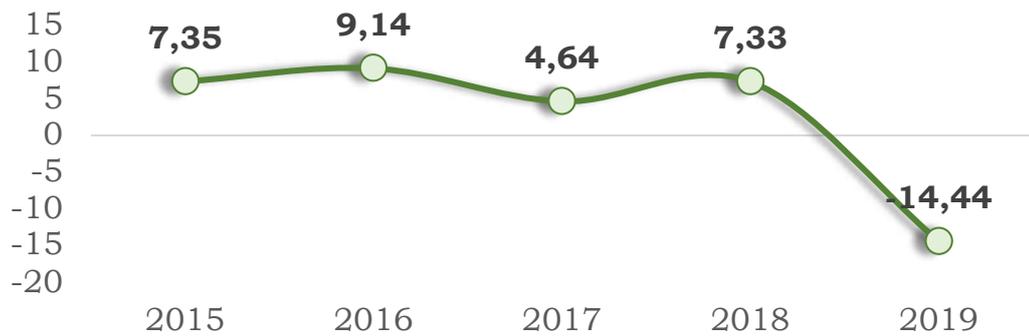
Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
2015	1.78	13.16	1.63	12.96	7.35
2016	-0.90	-5.28	20.44	21.43	9.14
2017	3.72	6.25	3.87	4.78	4.64
2018	26.49	23.59	6.35	-17.80	7.33
2019	-20.13	-23.98	-15.11	3.62	-14.44
Rata-rata	5.00	3.72	4.16	4.22	3.75

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Jika diamati dari pertumbuhannya (yoy), seperti yang tersaji pada Tabel 4.2 di atas, terlihat ekonomi Papua selama triwulan III-2019 bila dibandingkan dengan triwulan III-2018 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -15,11 persen. Hal ini sudah berlangsung sebenarnya pada triwulan I dan triwulan II 2019. Besarnya kontraksi ini terutama disebabkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan produksi yang cukup dalam hingga mencapai - 38,31 persen. Penurunan ini disebabkan karena turunnya produksi bijih logam P.T Freeport di Papua. Berkurangnya produksi tersebut sudah terjadi sejak triwulan I 2019 hingga triwulan III-2019 ini. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya masa transisi penambangan dari tambang terbuka (open pit) ke lokasi penambangan bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC). Selama tahun 2019 diperkirakan produksi bijih logam P.T. Freeport akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, meskipun diperkirakan di triwulan IV bisa mulai memulih, namun secara keseluruhan tidak mampu mengangkat nilai total PDRB di tahun 2019.

Meskipun terjadi penurunan yang cukup dalam di tahun 2019, lihat Gambar 4.1, namun karena penurunan tersebut akibat turunnya produksi secara sektoral, bukannya fundamental dan multisektoral, akhirnya tidak ada indikasi Papua mengalami krisis ekonomi di tahun 2019.

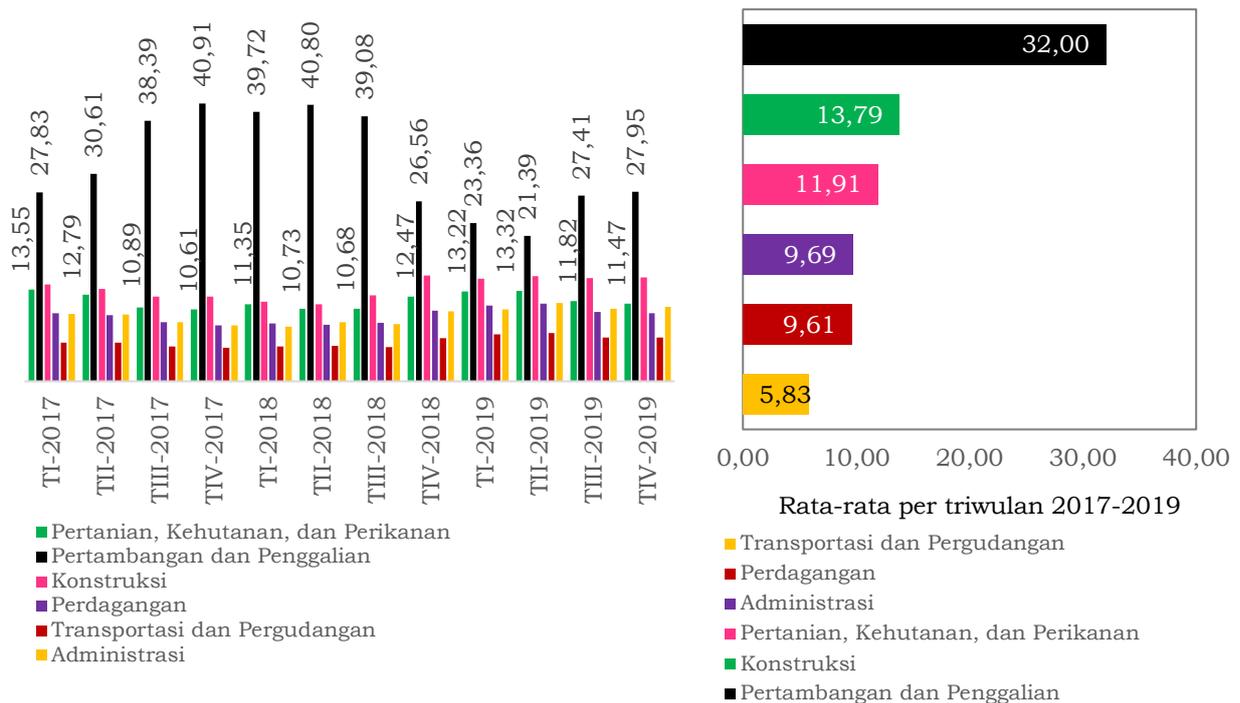
Gambar 4.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
Tahun 2015-2019
(dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Struktur ekonomi Provinsi Papua menurut lapangan usaha sejak triwulan I 2017 sampai dengan triwulan IV 2019 masih dominan pada lapangan usaha pertambangan, namun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB terlihat mengalami kontraksi menurun tajam terutama sejak triwulan II tahun 2018, meskipun demikian rata-rata kontribusi per triwulan masih terlampaui tinggi mencapai 32% per tahun selama periode tersebut. Lihat Gambar 4.2.

Gambar 4.2.
Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha
Triwulan I 2017 – Triwulan IV 2019
(dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian secara umum, terlihat kontribusinya cenderung mengalami penurunan, walaupun tidak sedrastis sektor pertambangan, akan tetapi fluktuasinya mengarah pada penurunan. Dimana selama periode 2017-2019 rata-rata per triwulan kontribusi sektor pertanian bisa mencapai 13,79%, menempati posisi kedua dalam struktur ekonomi Papua selama ini.

Sektor berikutnya yang cukup berperan dalam perekonomian Papua adalah konstruksi, yang menempati urutan ketiga terbesar dalam komposisi PDRB Provinsi Papua selama tahun 2017-2019. Gencarnya pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, serta persiapan infrastruktur PON XX yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota membuat pergerakan sektor konstruksi semakin membesar di tahun 2019, sehingga secara rata-rata kontribusinya bisa mencapai 11,91% per triwulan sepanjang tahun 2017-2019.

Adapun sektor lainnya yang cukup berperan adalah administrasi (9,69% per triwulan), perdagangan (9,61% per triwulan), dan transportasi/perdagangan (5,83% per triwulan). Seandainya ketiga sektor tersebut ditambah pangsa dengan sektor pertambangan, pertanian dan konstruksi, maka ke-6 sektor ini menjadi yang dominan menguasai komposisi struktur PDRB Papua selama ini yaitu rata-rata 82,83% per triwulan, atau 83% per tahun. Namun penyebaran pangsa nilai tambah diantara ke-6 sektor produktif tersebut belum berimbang, akibat penguasaan sektor pertambangan yang masih sangat besar.

Selanjutnya bila dilihat dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Provinsi Papua triwulan I 2017 sampai triwulan IV 2019 dari konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi sumber kontributor terbesar ditengah penurunan ekspor luar negeri Papua yang berkontraksi cukup tajam, disisi lain pengeluaran konsumsi pemerintah terlihat meningkat.

Tabel 4.3.
Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran
Triwulan I 2017 – Triwulan IV 2019
(dalam %)

Tahun		1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5. Perubahan Inventori	6. Ekspor Luar Negeri	7. Impor Luar Negeri	8. Net Ekspor Antar Daerah	Total
2017	Triwulan I	46.54	1.89	19.49	31.25	1.19	10.65	4.45	-6.55	100.00
	Triwulan II	43.26	1.75	18.45	28.81	-2.89	19.17	4.83	-3.73	100.00
	Triwulan III	37.74	1.54	16.66	24.78	8.01	10.89	3.61	3.99	100.00
	Triwulan IV	35.57	1.55	17.93	23.94	-5.85	22.30	3.40	7.97	100.00
2018	Triwulan I	38.85	1.62	15.10	24.93	-1.37	22.80	3.98	2.05	100.00
	Triwulan II	37.65	1.54	15.42	24.59	4.02	24.91	4.31	-3.82	100.00
	Triwulan III	37.15	1.51	15.41	25.31	-1.19	21.10	4.01	4.73	100.00
	Triwulan IV	45.54	1.92	21.95	32.89	3.31	14.34	3.84	-16.09	100.00
2019	Triwulan I	45.51	2.45	17.11	28.73	16.61	9.87	3.17	-17.12	100.00
	Triwulan II	46.75	2.23	18.83	29.69	18.01	4.60	2.45	-17.67	100.00
	Triwulan III	52.68	2.18	22.58	34.81	1.93	6.23	3.39	-17.01	100.00
	Triwulan IV	55.76	1.99	25.22	37.40	-2.88	2.90	3.20	-17.18	100.00
Rata-rata		43.58	1.85	18.68	28.93	3.24	14.15	3.72	-6.70	100.00

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pangasanya mencapai 55,76% pada triwulan IV tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan tertinggi dibandingkan triwulan pada tahun sebelumnya dengan pangsa rata-rata sebesar 43,5% pertahun selama periode 2017-2019. Peningkatan konsumsi RT pada triwulan IV 2018 dan berlanjut pada triwulan IV 2019 didorong oleh adanya perayaan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan tahun baru.

Berikutnya, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 37,40% pada triwulan IV 2019 yang terlihat meningkat dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 (yoy), dan lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2019 (qoq). Dengan rata-rata sepanjang triwulan I 2017 sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar 28,93% pertahun. Peningkatan PMTB

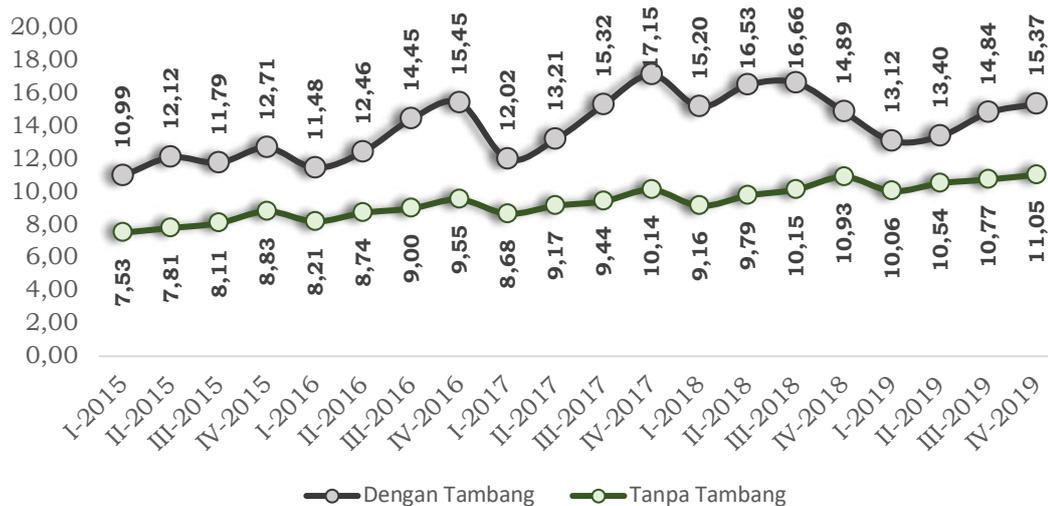
pada triwulan IV 2018 dan triwulan IV 2019 didorong oleh penanaman modal asing (PMA) di sektor pertambangan khususnya pertambangan bawah tanah Grasberg di Kabupaten Mimika. Dengan diselesaikannya pemindahan kepemilikan utama perusahaan tambang terbesar di Papua kepada pemerintah Indonesia, perusahaan pertambangan mendapatkan kepastian operasional jangka Panjang sehingga dapat melakukan investasi dengan lancar.

Sementara itu, kontribusi ekspor luar negeri mengalami kontraksi yang berfluktuatif selama tahun triwulan I 2017 hingga triwulan IV 2019. Titik terendahnya terjadi selama tahun 2019, dimana kontribusinya hanya mencapai 9,87% di triwulan I, kemudian semakin turun di triwulan II menjadi 4,60%, dan relatif naik di triwulan III menjadi 6,23%, namun di triwulan IV turun drastis kembali menjadi 2,90%. Sehingga secara keseluruhan rata-rata pangsa ekspor luar negeri provinsi Papua mencapai 14,15% . Penurunan ekspor luar negeri disebabkan oleh adanya penurunan produksi komoditas utama ekspor Papua yaitu bijih tembaga sehingga berpengaruh terhadap penjualannya. Pangsa impor luar negeri Papua sepanjang triwulan I 2013 sampai dengan triwulan II 2019 terlihat mengalami kontraksi meningkat tipis. Pangsa impor luar negeri sebesar 3,90% pada triwulan I 2019 meningkat tipis dibanding triwulan sebelumnya dan secara rata-rata pangasanya sebesar 5,41% pertahun.

Pendapatan per kapita provinsi Papua sepanjang triwulan I 2015–triwulan IV 2019 Dengan Tambang (DT) pergerakannya lebih fluktuatif dibandingkan Tanpa Tambang (TT) dengan capaian tertinggi pendapatan per kapita DT pada triwulan III tahun 2018 sebesar Rp16,66 juta sedangkan terendah pada triwulan I tahun 2015 sebesar Rp10,99 juta, selanjutnya setelah triwulan III 2018 pendapatan per kapita menurun tajam hingga pada triwulan I 2019 sebesar Rp12,95 juta. Kemudian untuk pendapatan perkapita provinsi Papua tanpa tambang (TT) capaian tertinggi pada triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp10,93 juta, sedangkan terendah pada triwulan I 2015 sebesar Rp7,53 juta, dan Pendapatan per kapta

pada triwulan IV 2019 sebesar Rp10,06 juta menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Gambar 4.3.
Pendapatan Per Kapita Provinsi Papua
Triwulan I 2015 – Triwulan IV 2019
(dalam juta rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

4.1.2. Tingkat Inflasi Dan Kemahalan Kontruksi

Perkembangan inflasi bulanan provinsi Papua sepanjang Januari 2015 sampai dengan Desember 2019 terlihat sangat fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat, lihat Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Tingkat Inflasi Bulanan Provinsi Papua
Januari 2015 – Juli 2019
(dalam %)

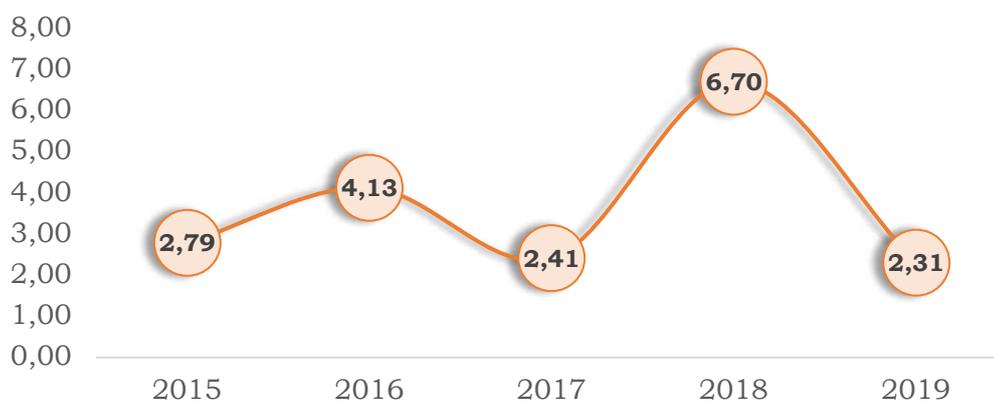
Bulan	Inflasi Umum Bulanan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	-0.42	0.76	0.12	-1.12	0.26
Februari	-0.04	0.17	-0.77	1.05	-0.03
Maret	0.71	0.30	0.95	2.10	0.26
April	-0.09	-0.32	0.73	-0.05	-0.26
Mei	0.07	0.70	-0.17	0.79	1.13
Juni	0.80	1.78	1.02	1.07	-0.08
Juli	0.51	-1.10	-1.13	0.04	-0.41
Agustus	-0.61	-0.18	0.22	-0.90	-0.14
September	0.35	0.55	-0.64	0.45	-1.26
Oktober	-0.05	-0.09	-0.09	0.36	-0.35
November	0.11	-0.23	-0.09	1.13	0.85
Desember	1.45	1.76	2.28	1.62	2.34

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Pada tahun 2015, inflasi tertinggi pada bulan Desember sebesar 1,45% sedangkan terendah terjadi deflasi pada bulan Agustus sebesar -0,61%. Tahun 2016, inflasi tertinggi pada bulan Juni sebesar 1,78% dan terendah terjadi deflasi pada bulan Juli sebesar -1,10%. Tahun 2017, inflasi tertinggi pada bulan Desember sebesar 2,28% dan terendah terjadi deflasi pada bulan Juli sebesar -1,13%. Tahun 2018, inflasi tertinggi pada bulan Maret sebesar 2,10% sedangkan terendah terjadi deflasi pada bulan Januari sebesar -1,12%. Kemudian pada tahun 2019, inflasi tertinggi di bulan Mei sebesar 1,13% dan terendah terjadi deflasi di bulan Juni sebesar -0,08%. Inflasi bulanan provinsi Papua dominan terjadi pada bulan dimana terjadi perayaan hari besar keagamaan nasional dan tahun baru.

Secara keseluruhan tingkat inflasi tahunan provinsi Papua mengalami perkembangan yang fluktuatif mengecil dengan capaian inflasi pada tahun 2015 sebesar 2,79%, kemudian semakin meningkat di tahun 2018 menjadi 6,70% sebagai puncak tertinggi tingkat inflasi dan di tahun 2019, tekanan inflasi kembali menurun, hanya mencapai 2,31%.

Gambar 4.4.
Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi Papua 2015-2019
(dalam %)

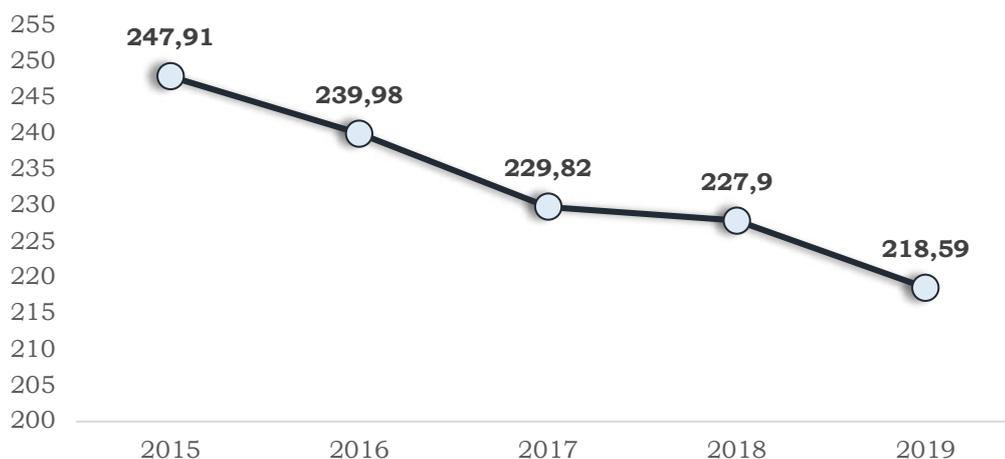


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selain tingkat inflasi, permasalahan harga yang juga selalu jadi perhatian pemerintah provinsi selama ini adalah tingkat kemahalan harga barang-barang konstruksi yang direpresentasikan dengan angka IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi). IKK ini sangat mempengaruhi penyusunan APBD Pemerintah Provinsi, karena menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan rancangan

belanja fisik, dan selain itu juga sebagai acuan penetapan SSH (Standar Satuan Harga) barang dan jasa. Adapun perkembangan IKK Provinsi Papua selama ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.

Gambar 4.5.
Indeks Kemahalan Kontruksi Provinsi Papua 2015-2019
(dalam %)



Sumber : BPS RI, 2019 (data diolah)

Perkembangan IKK Provinsi Papua sepanjang tahun 2015-2019 terlihat mengalami penurunan. Secara umum, di tahun 2015, Provinsi Papua mencapai 247,91 poin. Kemudian di tahun 2016 terjadi penurunan IKK dengan angka yang tipis hanya sebesar 7,93 point, sehingga IKK di tahun 2016 menjadi 239,98 poin, yang menandakan harga-harga bahan kontruksi di Provinsi Papua secara rata-rata lebih tinggi 139,88% dibandingkan daerah acuan (Kota Surabaya). Penurunan ini terus terjadi hingga di tahun 2018 IKK Papua sudah mencapai 227,90 poin, dengan kata lain jika dibandingkan dengan wilayah acuan rata-rata harga bahan kontruksi di Papua lebih tinggi 127,90%.

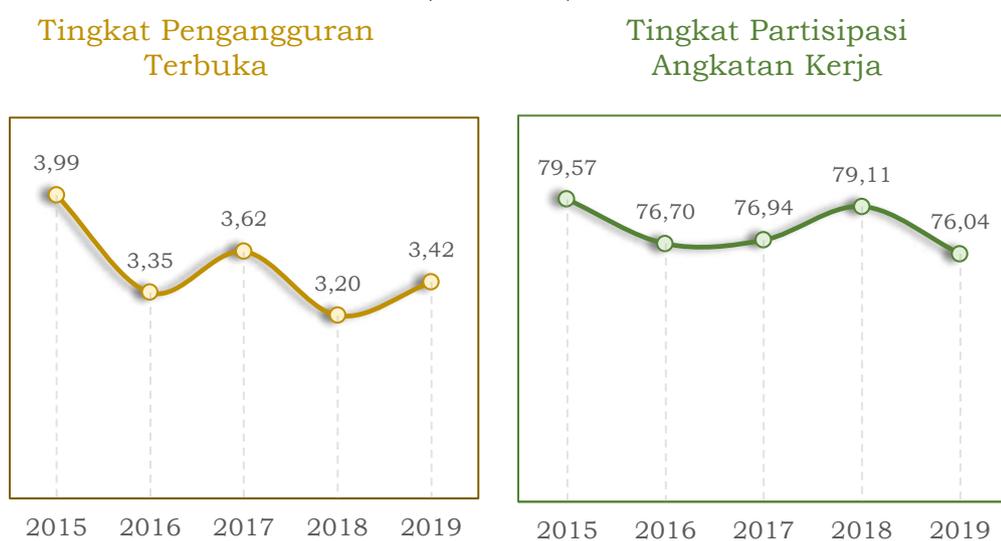
4.1.3. Nilai Kurs Rupiah Terhadap US Dolar

Nilai tukar rupiah cenderung melemah sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp15.227 per USD atau melemah sebesar 12,37% dibanding nilai tukar rupiah bulan Januari 2017 sebesar Rp13.343 per USD. Selanjutnya pergerakan rupiah terlihat cenderung menguat sampai dengan bulan juli 2019 dibanding kondisi tahun 2018. Nilai tukar rupiah bulan Desember 2018 sebesar Rp14.481 per USD menguat sebesar 5,15% dibanding nilai tukar rupiah bulan Oktober 2018.

Jumlah penduduk usia kerja yang bersekolah perkembangannya terlihat fluktuatif meningkat yaitu 174.949 jiwa pada tahun 2015 meningkat menjadi 220.158 jiwa pada tahun 2019 atau bertambah sebanyak 45.209 jiwa. Penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga perkembangannya fluktuatif meningkat yaitu dari 23.029 jiwa pada tahun 2015 menjadi 277.906 jiwa pada tahun 2019 atau bertambah sebanyak 254.877 jiwa. Demikian juga penduduk yang bekerja perkembangannya fluktuatif meningkat pada tahun 2015 sebesar 1.672.480 jiwa bertambah menjadi 1.746.963 jiwa atau bertambah sebesar 74.483 jiwa di tahun 2019 dengan penambahan terbesar pada tahun 2018 sebanyak 30.244 jiwa dan penurunan terbesar pada tahun 2016 sebanyak 7.995 jiwa. Jumlah pengangguran di provinsi Papua terlihat fluktuatif sepanjang tahun 2015-2019 dengan kecenderungan menurun yaitu dari 69.465 jiwa tahun 2015 menurun menjadi 61.885 jiwa pada tahun 2019 atau berkurang sebanyak 7.580 jiwa.

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Papua fluktuatif menurun. Tahun 2015 TPT Provinsi Papua sebesar 3,99% yang merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 2015-2019. Selanjutnya perkembangan TPT Provinsi Papua terlihat fluktuatif menurun hingga mencapai 3,42% pada tahun 2019.

Gambar 4.7.
Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Papua 2015-2019
(dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

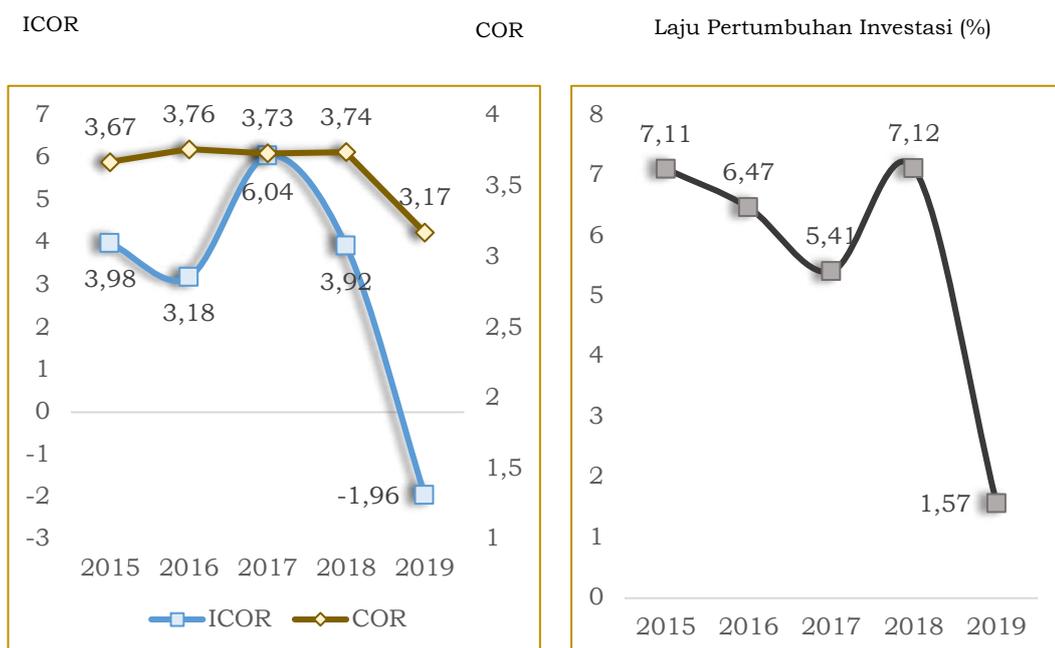
* Kondisi Sampai Bulan Maret 2019

Besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Papua cenderung menurun sepanjang tahun 2015-2019. Tahun 2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 79,57% namun selanjutnya cenderung menurun hingga menjadi 76.04% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendah pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Papua.

4.1.5. Pertumbuhan Dan Produktifitas Investasi Regional

Peningkatan investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua dan menurunkan angka pengangguran di Provinsi Papua. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi untuk mencapai sasaran pertumbuhan output tersebut yang dilazim diukur dengan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Namun perlu disadari bahwa besar kecilnya ICOR tersebut, sangat dipengaruhi juga oleh teknologi yang digunakan, efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, pengelolaan sumber daya alam, persebaran penduduk, kemampuan manajerial, laju dan komposisi investasi dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia.

Gambar 4.8.
Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR
Provinsi Papua Tahun 2015-2019



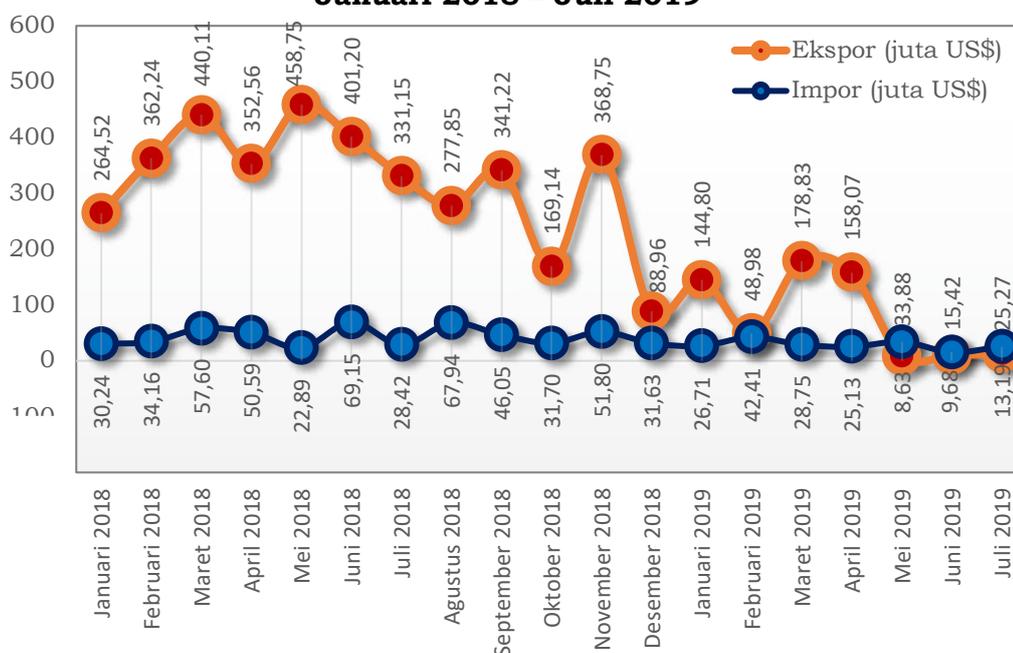
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Dalam perkembangannya, pertumbuhan investasi di provinsi Papua tahun 2015-2019 terlihat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu 7,12%, dengan ICOR mencapai angka 3,92 poin dan COR sebesar 3,74 poin. Ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi mengalami pertumbuhan sebesar, namun daya saingnya masih rendah, karena berdasarkan angka ICOR terlihat bahwa kebutuhan untuk menaikkan 1 unit output PDRB pada tahun 2018 dibutuhkan 7,12 unit modal jauh diatas angka moderat yang semestinya maksimal 4 unit modal, sehingga jika dilihat secara rata-rata selama 2015-2018 (ICOR positif) maka dapat dikategorikan Papua masih mengalami ekonomi biaya tinggi dengan ICOR sebesar 4,28 poin, dan produktifitas investasi yang rendah sebesar 3,61 poin.

4.1.6. Ekspor Impor Nonmigas Dan Migas

Perkembangan ekspor Provinsi Papua terlihat fluktuatif menurun sepanjang periode Januari 2018-Juli 2019. Ekspor Provinsi Papua mengalami kontraksi yang cukup tajam terutama pada April, Oktober, Desember 2018, Februari 2019 dan Mei 2019 dibandingkan bulan sebelumnya. Januari 2018, ekspor Papua tercatat sebesar US\$264,52 juta meningkat signifikan menjadi US\$ 440,11 juta pada Maret 2018 kemudian menurun menjadi US\$352,56 juta selanjutnya meningkat lagi pada April 2018 menjadi US\$458,75 juta dan ini merupakan capaian tertinggi dalam periode Januari 2018-Juli 2019. Ekspor Papua Mei sampai dengan Agustus 2018 menurun cukup tajam hingga Agustus 2018 menjadi US\$227,85 juta selanjutnya periode September 2018-Mei 2019 juga terlihat fluktuatif hingga Mei 2019 menjadi US\$8,63 juta namun kemudian sampai dengan juli 2019 terlihat meningkat lagi menjadi US\$13,19 juta. Penurunan ekspor Papua terutama disebabkan turunnya ekspor golongan bijih tembaga dan konsetrat dan golongan kayu dan barang dari kayu. Sementara itu impor Provinsi Papua juga fluktuatif menurun sepanjang periode Januari 2018-Juli 2019 dengan impor tertinggi pada Juni 2018 sebesar US\$69,15 juta dan terendah pada Juni 2019 sebesar US\$15,42 juta. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut ini.

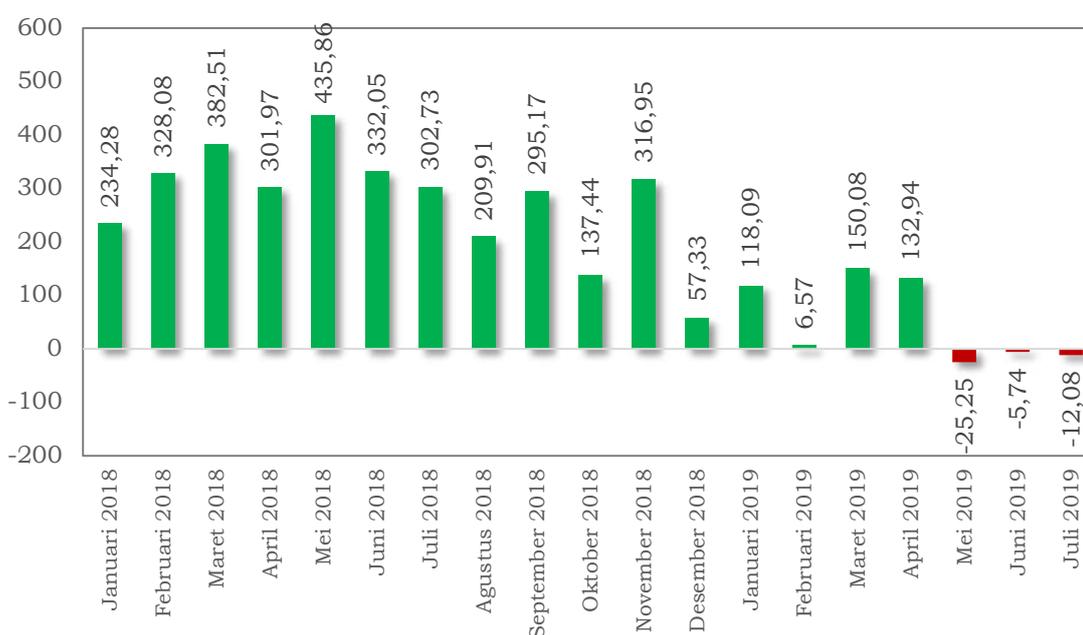
Gambar 4.9.
Ekspor Dan Impor Provinsi Papua
Januari 2018 – Juli 2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Neraca perdagangan Provinsi Papua selama periode Januari 2018-April 2019 terlihat positif artinya terjadi surplus perdagangan yang mana nilai ekspor lebih tinggi dari impor, sedangkan Mei 2019-Juli 2019 terlihat sebaliknya yaitu terjadi defisit perdagangan yang mana nilai impor lebih tinggi dari ekspor. Untuk jelasnya perhatikan Gambar 4.10.

Gambar 4.10.
Neraca Perdagangan Provinsi Papua
Januari 2018 – Juli 2019
(dalam juta US\$)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Dalam periode Januari 2018-Juni 2019, surplus perdagangan provinsi Papua terjadi pada bulan Mei 2018 sebesar US\$435,86 juta sedangkan surplus perdagangan terendah pada Februari 2019 sebesar US\$6,57 juta. Sementara itu defisit terbesar terjadi pada Mei 2019 sebesar -US\$25,25 juta sedangkan defisit terendah pada Juni 2019 sebesar -US\$5,75 juta.

4.1.7. Kemiskinan Dan Ketimpangan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 4.6.
Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi Papua
Maret 2015 – Maret 2019

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (Rupiah/ Kapita / Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persentase Penduduk Miskin
2015	Maret	402.031	8.82		28.17
	September	406.385	9.25		28.40
2016	Maret	427.176	9.37	4.19	28.54
	September	440.021	7.43	2.65	28.40
2017	Maret	457.541	7.49	2.82	27.62
	September	464.056	6.24	1.93	27.76
2018	Maret	499.463	6.73	2.28	27.74
	September	518.811	5.91	1.82	27.43
2019	Maret	540.099	7.17	2.60	27.53

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Perkembangan garis kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2015 sebesar Rp402.031 per bulan per kapita terus meningkat

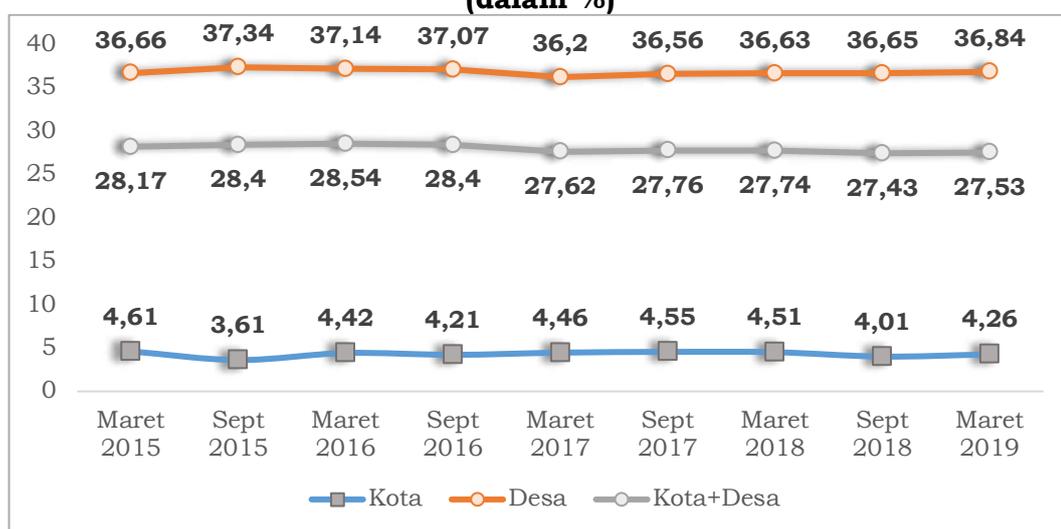
sampai dengan Maret 2019 menjadi sebesar Rp540,099 atau bertambah sebesar Rp138.068 (lihat Tabel 4.6). Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Papua pada Maret-September 2015, Maret-september 2016, terlihat meningkat, sedangkan untuk Maret-september 2017, Maret-september 2018 dan Maret 2019 terlihat menurun. secara keseluruhan persentase penduduk miskin menurun dari 28,17% pada Maret 2015 menjadi 27,53% pada Maret 2019.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua perkembangannya mengikuti pola tingkat kemiskinan di provinsi Papua yang mana pada Maret-september 2016 dan Maret-september 2018 terlihat menurun dan hingga bulan Maret 2019 kembali terlihat meningkat. secara keseluruhan Indeks kedalaman Kemiskinan Provinsi Papua cenderung menurun yaitu dari 8,82 poin pada Maret 2015 menjadi 7,17 poin pada Maret 2019 artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi terdapat pada Maret 2016 sebesar 9,37 poin sedangkan terendah pada September 2018 sebesar 5,91 poin. Selanjutnya untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) yang menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di provinsi Papua terlihat semakin mengecil angkanya. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua pada Maret 2016 sebesar 4,19 poin menurun menjadi sebesar 2,60 poin pada Maret 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin rendah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Papua. Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi terdapat pada Maret 2016 sebesar 9,37 poin sedangkan terendah pada September 2018 sebesar 1.82 poin.

Sementara itu tingkat kemiskinan jika dipilah menurut wilayah desa-kota di Provinsi Papua, maka tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di kota. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.9 di atas tingkat kemiskinan di desa perkembangannya cenderung tidak banyak mengalami perubahan

yaitu pada Maret 2015 sebesar 36,66% menjadi 36,84% pada Maret 2019. Hal yang sama terjadi di wilayah kota dengan tingkat kemiskinan fluktuatif menurun yaitu pada Maret 2015 sebesar 4,61% menjadi 4,26% pada Maret 2019. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada bulan September 2017 mencapai 4,55% dan terendah pada September 2015 sebesar 3,61%.

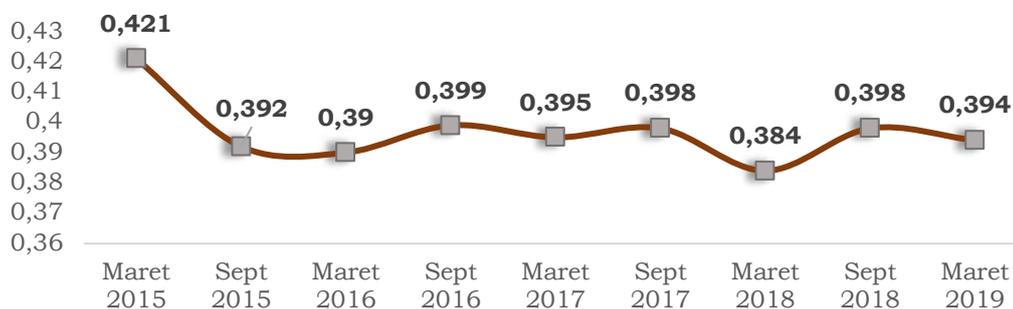
Gambar 4.11.
Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua
Maret 2015 – Maret 2019
(dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua fluktuatif menurun yaitu dari 0,421 poin pada Maret 2015 menurun menjadi 0,394 poin pada Maret 2019 atau bergeser dari ketimpangan sedang ke ketimpangan rendah. Selama periode Maret 2015 sampai dengan Maret 2019, tingkat ketimpangan tertinggi terdapat pada September 2015 sebesar 0,421 poin dan terendah pada Maret 2018 sebesar 0,384 poin.

Gambar 4.12.
Tingkat Ketimpangan Menurut Angka Gini Ratio Di Provinsi Papua
Maret 2015 – Maret 2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk berdasarkan wilayah kota dan desa di Provinsi Papua cenderung meningkat persentasenya sepanjang periode Maret 2016-Maret 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin membaik distribusi pendapatan kota, desa dan kota+desa di Provinsi Papua. Distribusi pendapatan di kota pada maret 2016 mencapai 20,32% meningkat menjadi 21,63% pada maret 2019 dengan distribusi pendapatan tertinggi terdapat pada September 2018 sebesar 21,95% dan terendah pada Maret 2017 sebesar 20,30% atau masuk ketimpangan rendah.

Tabel 4.7.
Distribusi Pendapatan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua
Maret 2016 – Maret 2019

Tahun/Bulan		20% berpendapatan tinggi			40% berpendapatan sedang			40% berpendapatan rendah		
		Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2016	Maret	38.64	42.24	43.26	41.05	42.83	42.38	20.32	14.93	14.36
	Sept	39.52	44.84	44.84	40.11	39.14	40.01	20.36	16.03	15.15
2017	Maret	40.24	44.19	44.16	39.47	40.81	41.13	20.30	15.00	14.71
	Sept	37.77	46.67	44.85	41.25	37.69	39.97	20.98	15.64	15.18
2018	Maret	39.47	43.90	43.42	39.79	40.10	41.03	20.74	16.00	15.55
	Sept	38.17	47.25	44.57	39.88	37.75	40.67	21.95	15.00	14.77
2019	Maret	38.36	46.89	44.55	40.01	37.74	40.10	21.63	15.37	15.35

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selanjutnya distribusi pendapatan di desa pada maret 2016 mencapai 14,93% meningkat menjadi 15,37% pada maret 2019 dengan distribusi pendapatan tertinggi terdapat pada September 2016 sebesar 6,03% dan terendah pada Maret 2016 sebesar 14,93% atau masuk ketimpangan sedang. Demikian juga jika distribusi pendapatan wilayah kota+desa menunjukkan perkembangan yang semakin besar persentasenya yaitu pada maret 2016 mencapai 14,36% meningkat menjadi 15,35% pada maret 2019 dengan

distribusi pendapatan tertinggi terdapat pada Maret 2018 sebesar 15,55% dan terendah pada Maret 2016 sebesar 14,36% atau masuk ketimpangan sedang. Fakta yang menarik dari perkembangan 20% pendapatan tinggi di desa persentasenya meningkat yaitu dari Maret 2016 sebesar 42,34% meningkat menjadi 46,89% pada maret 2019 sebaliknya di kota semakin menurun yaitu dari 38,64% pada Maret 2016 menjadi 38,36% pada Maret 2019 sehingga jika digabung desa+kota maka semakin meningkat persentase penduduk yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya untuk 40% berpendapatan sedang baik desa, kota dan desa+kota terlihat menurun persentasenya.

4.1.8. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan data strategis karena dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja Pemerintah.

Tabel 4.8.
Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua
2015 – 2019

IPM dan Komponen Pembentuknya	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,1	65,1	65,1	65,4	65,7
Harapan Lama Sekolah (tahun)	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	5,9	6,1	6,2	6,5	6,7
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	6469	6637	6996	7159	7336
Indeks Pembangunan Manusia	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84
Pertumbuhan IPM (%)	-	1,40	1,79	1,64	1,30

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Pembangunan manusia di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua mencapai 60,84 poin atau meningkat sebesar 0,78 poin atau tumbuh sebesar 1,30 persen dibandingkan tahun 2018 dan masuk kategori sedang. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua selama kurun waktu 2015-

2019 meningkat 3,59 poin yaitu dari 57,25 poin tahun 2015 menjadi 60,84 poin tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 1,53% pertahun dan sudah bergeser dari IPM kategori rendah ke kategori sedang.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua tahun 2015-2017 terlihat tetap yaitu sebesar 65,1 tahun kemudian meningkat 0,3 tahun menjadi 65,4 tahun di tahun 2015-2018, selanjutnya tahun 2019 meningkat lagi 0,3 tahun hingga menjadi 65,7 tahun artinya bayi yang baru lahir tahun 2019 akan bertahan hidup lebih lama 0,3 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hingga usia 65,7 tahun.

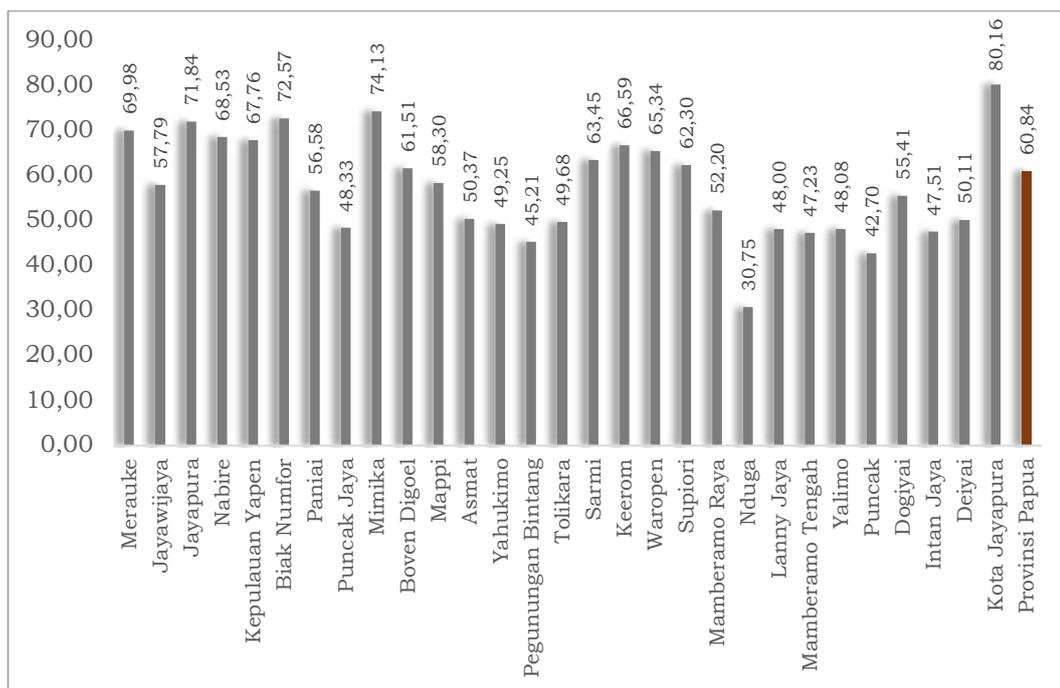
Untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2015 tercatat sebesar 9,9 tahun (kelas X), sedangkan HLS pada tahun 2019 sebesar 11,1 tahun artinya anak-anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2019 memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 11,1 tahun (SMA kelas XI) lebih lama 1,15 tahun dibandingkan dengan yang berumur 7 tahun pada tahun 2015 atau lebih lama 0,3 tahun dibandingkan tahun 2018. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tahun 2015 sebesar 5,9 tahun meningkat 0,8 tahun hingga menjadi 6,7 Tahun pada tahun 2019, artinya Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan

selama 6,7 tahun (kelas 7), lebih lama 0,8 tahun dibandingkan tahun 2015 atau lebih lama 0,2 tahun dibandingkan tahun 2018.

Pada dimensi ekonomi digunakan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada tahun 2019, masyarakat Papua memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp7,336 juta per tahun, meningkat Rp867 ribu dibandingkan pengeluaran tahun 2015 atau meningkat sebesar Rp 177 ribu dibandingkan pengeluaran tahun 2018.

Sementara itu, persebaran IPM Kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2019 terdapat 12 kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata IPM Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura dengan capaian IPM tertinggi yakni 80,16 poin, selanjutnya Mimika, Biak Numfor, Jayapura, Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Keerom, Waropen, Sarmi, Supiori, dan Boven Digoel.

Gambar 4.13.
IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Sedangkan Kabupaten dengan capaian IPM yang lebih rendah dari rata-rata provinsi 17 kabupaten yaitu Mappi, Jayawijaya,

Paniai, Dogiyai, Mamberamo Raya, Deiyai, Asmat, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Yalimo, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Puncak dan Nduga dengan capaian IPM terendah yaitu 30,75 poin.

4.1.9. Tantangan Dan Prospek Pembangunan Sosial Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021 dan 2022

4.1.9.1. Faktor-Faktor Eksternal

(a) Tantangan Eksternal Tahun 2021

Dari sisi permintaan, perekonomian Papua diperkirakan masih akan ditopang oleh komoditas non migas yaitu dari sektor pertambangan dan penggalan. Tahun 2020, kinerja sector pertambangan dan penggalan relative tidak terpengaruh oleh pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia, disaat sector lainnya mengalami kontraksi. Diperkirakan dengan adanya pemulihan ekonomi di negara tujuan ekspor Papua, maka ekspor Papua masih akan mengalami pertumbuhan positif walau melambat. Kinerja perekonomian Papua tahun 2021 akan berpotensi positif dikarenakan meningkatnya kinerja pertambangan dengan dibukanya pertambangan bawah tanah sehingga meningkatkan produktifitas tambang dengan produksi tembaga dan emas yang berkualitas dibanding dengan tambang terbuka. Produksi tambang yang berasal dari bawah tanah memiliki konsentrat tembaga dan emas yang lebih tinggi sehingga diperkirakan produksi dan penjualan akan terus meningkat di tahun 2021. Namun demikian untuk komoditas non pertambangan diperkirakan masih melambat karena masih diterapkannya pembatasan aktifitas sampai pertengahan tahun 2021. Saat ini penyebaran covid-19 belum menunjukkan penurunan bahkan cenderung meningkat sehingga pembatasan aktifitas dan lockdown kembali diterapkan di beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Papua, sehingga jika hal ini berlanjut tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua di tahun 2021.

Sampai dengan pertengahan 2020, ekspor Papua didominasi oleh komoditas biji tembaga dengan negara tujuan terbesar yaitu India, Jepang, dan Spanyol, kemudian disusul RRT dan Bulgaria

dan Jerman. Sedangkan untuk komoditas kayu olahan tujuan ekspor terbesar ke Korea Selatan, kemudian AS, RRT dan Arab Saudi. Naik turunnya perekonomian nasional di negara-negara tersebut dipastikan secara simultan akan berpengaruh terhadap permintaan ekspor dari Provinsi Papua, yang akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan kondisi ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mendatang sebagai dampak terkait lambat dan panjangnya proses pemulihan. IMF memproyeksi ekonomi dunia akan mengalami kontraksi 4,4% pada 2020 dan memangkas proyeksi pada 2021 dari 5,4% menjadi 5,2%. IMF juga memprediksi bahwa covid-19 akan membebani sejumlah negara selama bertahun-tahun. Dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan ekonomi global hanya akan turun sebesar 4,5% tahun ini, sebelum tumbuh sebesar 5% pada tahun 2021. Perkiraan tersebut terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan Outlook Ekonomi OECD bulan Juni yakni minus 6%. Perkembangan yang positif tersebut karena akan adanya harapan perkembangan lebih baik untuk kasus perang dagang antara RRT dan Amerika Serikat. Perkembangan output di banyak negara juga diprediksi sampai pada akhir tahun 2021 masih akan berada di bawah level pada akhir 2019, dan tentunya ini jauh di bawah proyeksi sebelum pandemi Covid-19.

Sampai dengan akhir Oktober 2020, perbaikan kinerja di beberapa negara setelah dilonggarkan kebijakan isolasi (*lockdown*) mendorong terjadinya pemulihan kinerja perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa dan juga RRT yang perekonomiannya kembali tumbuh. Namun di awal November ini, beberapa negara yang sudah mengalami penurunan kasus positif covid-19 kembali melakukan pembatasan aktifitas dikarenakan kembali meningkat jumlah kasus Covid-19. Adanya pembatasan aktifitas dan pemberlakuan *lockdown* di beberapa negara terutama tujuan ekspor, berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia demikian juga kinerja

ekonomi Papua yang diprediksi masih akan menghadapi tekanan eksternal perekonomian global di tahun 2021 dan 2022 mendatang.

Tantangan perekonomian global yang perlu diwaspadai terutama untuk Papua yang mengandalkan ekspor tembaga dan kayu olahan yaitu Pertama, adanya pandemi covid-19 yang diperkirakan masih akan bertahan selama 2 tahun berdasarkan rilis WHO akan berdampak kepada perekonomian negara-negara di Dunia termasuk negara tujuan ekspor Papua seperti India, Jepang, Spanyol, Filipina dan RRT, AS, Arab Saudi, Spanyol yang jika kondisi ini terus berlanjut akan berdampak pada penyusutan perdagangan secara global. Sepanjang tahun 2019 dengan adanya pandemi Covid-19, negara tujuan ekspor utama Papua berupa tembaga dan kayu olahan terlihat mengalami penurunan permintaan terutama untuk tujuan ekspor ke Jepang dan Arab Saudi, sedangkan untuk negara RRT, Korea Selatan dan India terlihat meningkat. Jepang merupakan negara maju dengan perekonomian terbesar setelah Amerika Serikat dan RRT dan sebagai negara tujuan ekspor yang penting bagi Papua, selama pandemic covid-19 tidak melakukan lockdown namun juga mengalami kontraksi ekonomi. Perekonomian Jepang sebelumnya telah melemah akibat kenaikan pajak dan kian dibebani oleh perlambatan permintaan dari RRT serta serangkaian bencana alam yang dialami. Jepang pun menjadi salah satu negara maju yang mengalami resesi untuk pertama kali setelah pandemi Covid-19 melanda. Pandemi covid-19 juga mengakibatkan penurunan ekspor serta merosotnya sektor pariwisata di Jepang.

Untuk Kawasan Asia Pasifik, International Monetary Fund (IMF) memprediksi perekonomian memiliki secercah harapan untuk pulih dari resesi terburuknya. IMF memperkirakan pemulihan hampir 7% pada 2021. RRT yang akan memainkan peran besar untuk bertumbuhnya ekonomi di kawasan Asia Pasifik tahun 2021. RRT yang merupakan negara ekonomi terbesar pertama dikatakan berhasil pulih terhadap kasus pandemi Covid-19 yang ada di negaranya. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi RRT mencapai 6,1% tertinggi dibanding negara-negara lainnya. Di tahun 2020 ini di mana negara-negara di dunia banyak yang mengalami resesi

dengan pertumbuhan negatif, namun di RRT terjadi pemulihan ekonomi dengan cepat dan diperkirakan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 1,9%. Dalam proyeksi tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi RRT melesit hingga 6% pada 2021, namun turun menjadi 2,6% di tahun 2022. Sedangkan dalam proyeksi OECD pertumbuhan ekonomi RRT akan mencapai 8,0%. Kondisi ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang Papua untuk dapat mengekspor kembali produksi tambang dan kayu olahannya ke RRT yang selama tahun 2019 merupakan konsumen terbesar ekspor tambang Papua namun kemudian sampai kuartal kedua 2020 terlihat merosot tajam permintaannya. Selain itu juga, dengan adanya komitmen negara RRT, Jepang serta Korea selatan yang melalui Menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara, telah sepakat untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi wilayah mereka dari dampak pandemi Covid-19 dan juga berjanji untuk mempertahankan perdagangan multilateral dan kerja sama investasi. “Cina, Jepang, dan Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi, termasuk dengan negara-negara ASEAN, untuk memulihkan ekonomi wilayah masing-masing dengan cepat,” demikian dalam pernyataan bersama mereka setelah telekonferensi, yang dikutip dari Reuters, Jumat, 18 September 2020.

Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jepang tumbuh tumbuh 0,7% atau lebih rendah 0,1 poin % persen dibandingkan proyeksi sebelumnya yang disampaikan oleh IMF dalam World Economic Outlook. Jepang tercatat beberapa kali membuat kejutan di tengah ketidakpastian global sepanjang tahun 2019 yang sedikit banyak menunjukkan ketahanan ekonomi Jepang dalam menghadapi tantangan domestik dan eksternal. Tahun 2020, Pertumbuhan Jepang diproyeksikan moderat menjadi 0,5% (lebih tinggi 0,2 poin persentase dibandingkan WEO Oktober 2018). Menurut IMF, Revisi prediksi pertumbuhan Jepang ini utamanya “menggambarkan dukungan fiskal tambahan terhadap perekonomian tahun 2019, termasuk upaya memitigasi dampak rencana kenaikan pajak konsumsi di Oktober 2019”. kemudian untuk tahun 2021, IMF

meprediksi perekonomian negara-negara tidak akan ada yang berada di wilayah negatif. Sedangkan para ekonom dalam survei Reuters memperkirakan ekonomi Jepang hanya tumbuh melambat menjadi 0,6% di tahun 2020. Penyebabnya karena adanya potensi meruncingnya ketegangan perdagangan Jepang dan AS dalam bidang otomotif (AS) juga masih menjadi risiko besar bagi ekonomi Jepang yang sangat mengandalkan ekspor, penurunan tajam ekspor Jepang ke RRT khususnya terkait dengan pelemahan permintaan teknologi tinggi atau industri teknologi dan informasi juga dapat mempengaruhi perekonomian Jepang. Namun dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia, menyebabkan perekonomian global mengalami pertumbuhan negatif, termasuk Jepang yang di prediksi tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,8% (*OECD economic Outlook*). Untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jepang diprediksi akan meningkat menjadi 1,5%.

Bank of Japan (BOJ) menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk tahun fiskal saat ini. Dalam isi laporan kuartalan yang disampaikan BOJ seperti dilansir oleh AFP, “Ekonomi Jepang kemungkinan mengikuti tren yang membaik, seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi dan dampak dari virus corona yang terus berkurang secara bertahap. Namun kecepatannya diperkirakan masih lamban, sementara tingkat kewaspadaan terhadap Covid-19 terus berlanjut,” Dikatakan juga dalam laporan, bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi saat ini lebih rendah dibandingkan Juli tetapi agak lebih tinggi untuk tahun fiskal 2021, dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan untuk tahun fiskal 2022. Hal ini, terutama disebabkan oleh tertundanya pemulihan di sektor permintan jasa. Sementara itu perubahan harga year-on-year (yoy) –kecuali makanan segar– sekarang ini kemungkinan masih negatif. Menurut para pejabat, itu dikarenakan oleh faktor-faktor seperti pandemi Covid-19, penurunan harga minyak sebelumnya, dan program subsidi perjalanan domestik. Untuk tahun 2020 hingga Maret 2021, BOJ memprediksi tingkat ekonomi kontraksi 5,5% dibandingkan 4,7% pada perkiraan Juli. Sedangkan harga menunjukkan penurunan 0,6% dibandingkan

perkiraan penurunan sebelumnya 0,5%. Sedangkan untuk tahun fiskal hingga Maret 2022, BOJ melakukan revisi pada laju pertumbuhan dan perkiraan inflasi yakni masing-masing dari 3,3% menjadi 3,6%; dan dari 0,3% menjadi 0,4%.

India yang dipercaya akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) melalui IMF Economic Outlook, pertumbuhan ekonomi India diprediksi mencapai 7,8 persen, ternyata hanya mencapai 4,2% di tahun 2019, atau lebih rendah 3,6% dibanding prediksi sebelumnya. Namun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi India mengalami kontraksi cukup besar dan terburuk dibanding negara-negara lainnya di dunia akibat pandemi Covid-19. India yang telah menerapkan *lockdown* untuk menekan angka persebaran Covid-19, mengalami pertumbuhan ekonomi minus 23,9% (year on year) pada tiga bulan yang berakhir di bulan Juni. Ekonom *Capital Economics* Shilan Shah mengatakan, kuartal kedua kali ini merupakan titik terendah perekonomian India. Dia menilai, meski ada tanda-tanda perbaikan dalam waktu-waktu ke depan dengan pelonggaran *lockdown*, prosesnya akan sangat lambat. Hal tersebut terlihat dari aktivitas manufaktur yang justru kembali melemah di bulan Juli, dan hasil dari infrastruktur yang masih tertekan. "Persebaran virus corona yang terus berlanjut akan kian menekan permintaan domestik, terlebih lagi, antisipasi fiskal yang di bawah ekspektasi dalam merespons krisis akan menghasikan pengangguran yang lebih besar, banyak perusahaan gagal, serta sektor perbankan yang melemah kian membebani investasi dan konsumsi". OECD memprediksi ekonomi India tumbuh negatif di tahun 2020 yaitu sebesar -10,2%. Walaupun pertumbuhan ekonomi India di prediksi negatif di tahun 2020, namun jika dilihat dari ekspor Papua ke India sampai dengan kuartal ke II menunjukkan perkembangan yang positif artinya tidak berpengaruh signifikan merosotnya pertumbuhan ekonomi India terhadap permintaan ekspor komoditas tembaga dari Papua bahkan terlihat paling tinggi dibanding ekspor ke RRT yang walaupun pertumbuhannya positif namun permintaan komoditas dari Papua

terlihat berpengaruh cukup signifikan yang mana untuk kuartal yang sama (*yoy*) dapat dikatakan sangat rendah.

Dalam Prospek Ekonomi Dunia tahunannya, IMF telah menurunkan pertumbuhan India untuk tahun fiskal 2020 menjadi minus 10,3%. IMF menyebut, ekonomi India kemungkinan akan bangkit kembali dengan tingkat pertumbuhan 8,8% di tahun 2021. Jika ekonomi negara itu mencapai tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan, maka India akan mendapatkan kembali posisinya sebagai negara ekonomi berkembang yang tumbuh paling cepat, melampaui tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan RRT sebesar 8,2%. Menurut kepala Divisi Studi Ekonomi Dunia Departemen Riset Dana, Malhar Shyam Nabar, banyak yang harus dilakukan India untuk memberikan dukungan kepada rumah tangga dan perusahaan yang terkena dampak pandemic Covid-19, termasuk memberikan keringanan pajak dan jaminan kredit. Sedangkan OECD memprediksi di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi India sebesar 10,7% yang mana angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan RRT yang sebesar 8%, ini artinya pertumbuhan ekonomi India masih yang tertinggi.

Negara Filipina yang menjadi tujuan ekspor potensial Papua, juga terlihat mengalami resesi akibat dampak covid-19. Pemerintah Filipina sendiri memprediksi pertumbuhannya akan merosot hingga -5,5% sepanjang tahun 2020, yang mana angka ini lebih rendah dari yang diprediksi sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar 2,0% sampai 3,4%. Tahun 2021 perekonomian Filipina diprediksi akan bisa mencapai 7,6% di tahun 2021 dan 6,4% di tahun 2022. Kondisi ini tentunya peluang sekaligus tantangan bagi ekspor Papua ke Filipina untuk bisa mengembalikan kinerja ekspor Papua ke Filipina. Sebelum pandemi covid catatan ekspor Papua ke Filipina terlihat menurun di tahun 2018-2019, saat pandemic Covid-19 melanda semakin terjadi penurunan ekspor Papua ke Filipina yang signifikan jika dibanding negara tujuan ekspor Papua lainnya.

Penyebaran Covid-19 yang masih menghantui Korea Selatan membuat Bank of Korea (BoK) merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Sebelumnya, BoK memproyeksi

pertumbuhan ekonomi Korea Selatan kontraksi 0,2% sepanjang tahun 2020. Gubernur BoK Lee Ju-yeol dalam pernyataannya di depan parlemen Korea Selatan menjelaskan, prospek ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut cenderung suram. "Ini kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap perekonomian secara signifikan. Hal ini diperlukan untuk menurunkan tajam tampilan pertumbuhan ekonomi," katanya. Disamping itu juga, Lee mengatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi selain karena lonjakan infeksi covid-19 juga karena penurunan ekspor ginseng Korea. Walau sejumlah data terbaru menunjukkan adanya potensi perbaikan, tetapi Lee tetap mengingatkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 bakal menekan ekonomi Korea Selatan secara keseluruhan. OECD dalam laporannya memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di tahun 2020 terkontraksi menjadi -1,0% sedangkan di tahun 2021 akan meningkat kinerja perekonomian Korea Selatan menjadi 3,0%.

Sedangkan Institut Pengembangan Nasional Korea (Korea Development Institute, KDI) merevisi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun 2020 menjadi 0,2%. Angka tersebut anjlok tajam dengan pertimbangan dampak besar dari pandemi Covid-19. KDI telah menurunkan proyeksi pertumbuhan Korea Selatan sebesar 2,1% poin menjadi hanya 0,2%, dari yang dikeluarkan pada bulan November tahun lalu sebesar 2,3%. KDI memperjelas bahwa akibat pandemi Covid-19, konsumen pribadi mengalami penurunan dan volume ekspor juga terpukul karena kebanyakan negara menutup perbatasan dengan negara lain. Meskipun demikian, angka itu masih lebih tinggi daripada proyeksi lembaga-lembaga utama lain, seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF) yang memperkirakan pertumbuhan minus. KDI juga memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun 2021 sebesar 3,9%. Lembaga itu mengutip pentingnya pembahasan peningkatan penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan fiskal, sembari menegaskan pula peran keuangan demi meminimalkan dampak Covid-19 (KBS World, 8 Agustus 2020).

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi global pada keempat negara tujuan ekspor terbesar di atas maka cukuplah relevan jika

diprediksi akan ada peningkatan ekspor Provinsi Papua di tahun 2021 ini, dan tahun 2022 mendatang, namun permintaan ekspor tidak optimal seperti sebelum pandemi covid-19 melanda dunia. Perkembangan ekspor yang meningkat di tahun 2021 datang dari negara tujuan ekspor Papua yaitu RRT, India, Jepang, Filipina dan juga beberapa negara Uni Eropa yang terlihat di tahun 2020 melakukan impor komoditas tembaga Papua yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% berdasarkan prediksi OECD seperti Bulgaria, Spanyol dan Jerman.

Dengan demikian, dari sisi ekspor, kondisi perekonomian Provinsi Papua di tahun 2021 dan 2022 akan menghadapi tantangan sekaligus peluang walaupun tidak seperti kondisi di tahun 2019-2020, namun akibat pelambatan ekonomi di negara tujuan ekspor Papua maka pengaruh negara tersebut terhadap perekonomian wilayah Papua tidak dapat diabaikan.

Bank Dunia memproyeksi ekonomi global pada tahun 2020 minus 5,2% akibat pandemi virus corona. Resesi ekonomi ini merupakan yang terdalam sejak Perang Dunia II. Bank Dunia, juga memprediksi perekonomian global mulai positif pada 2021. Resesi akibat Covid-19 tersebut merupakan yang pertama sejak 1870 yang dipicu oleh pandemi. Proyeksi ekonomi global tahun ini bahkan jauh lebih rendah dari laporan Bank Dunia Januari 2020, yang memproyeksi ekonomi global tumbuh 2,5%. “Perkiraan dasar kami resesi global ini terdalam sejak Perang Dunia II. Laporan ini juga mencakup analisis mendalam tentang prospek negara berkembang, yang banyak di antaranya saat ini berjuang untuk dua sektor, wabah pandemi sekaligus resesi ekonomi,” ujar Presiden Bank Dunia David Malpass dalam Laporan Global Economic Prospects Juni 2020, Selasa (9/6/2020). Penurunan ekonomi tahun ini diperkirakan tak hanya terjadi di negara maju, namun juga sebagian besar terjadi pada negara berkembang. Adapun ekonomi di negara maju diperkirakan mencapai negatif 7% di tahun 2020. Kontraksi terdalam terjadi di Jepang, yang mencapai minus 9,1%. Selanjutnya ekonomi AS diperkirakan minus 7% dan Uni Eropa minus 6,1%. Pada 2021, ekonomi negara maju diperkirakan

tumbuh 3,9%. Perekonomian Jepang diperkirakan pulih dan tumbuh 2,5%, AS tumbuh 4%, dan Uni Eropa tumbuh 4,5%.

Sementara perekonomian di negara berkembang diprediksi akan minus 2,5% tahun 2020. Ekonomi RRT diproyeksi hanya tumbuh 1%, sementara India dan Brasil diprediksi masing-masing minus 3,2% dan 8%. Untuk ekonomi di negara berkembang, Bank Dunia memproyeksi pulih di 2021, tumbuh menjadi 4,6%. Ekonomi RRT diproyeksi tumbuh 6,6%, India 3,1%, dan Brasil tumbuh 2,2%. Malpass melanjutkan, pandemi Covid-19 telah menekan konsumsi dan investasi di hampir seluruh negara. Bahkan pandemi telah menekan sektor keuangan, komoditas, perdagangan global, rantai pasokan, perjalanan, dan pariwisata. “Pasar keuangan sangat fluktuatif, mencerminkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan prospek yang memburuk,” katanya. Tingkat utang yang tinggi juga akan menyebabkan krisis keuangan di banyak negara. Dalam skenario terburuk, ekonomi global akan mencapai minus 8 persen di 2020. Sementara di 2021, pertumbuhan global hampir tidak akan mulai pulih, meningkat menjadi hanya 1%. Dalam skenario optimistis, pertumbuhan ekonomi tetap positif karena langkah pengendalian pandemi cepat dilakukan. Respons kebijakan fiskal dan moneter juga berhasil mendorong kepercayaan konsumen dan investor.

(b) Tantangan Eksternal Tahun 2022

Dari sisi global, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China memang jadi salah satu dinamika hubungan internasional yang paling menarik untuk diikuti dalam beberapa tahun belakangan ini bahkan diprediksi akan berlanjut sampai tahun 2022. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan kondisi mereda, maka permasalahan global bukan saja resesi ekonomi akibat konflik perdagangan tetapi juga dampak dari pandemi covid-19 yang masih menghantui dan tidak dapat dipastikan kapan akan mereda. AS maupun RRT sama-sama memiliki ambisi untuk memperluas pengaruhnya di bidang ekonomi, maupun politik. Juga sama-sama memiliki pengaruh yang luas secara global. Investasi ke dua negara ini tersebar di berbagai

belahan dunia, produk-produk buatan negara mereka juga berhasil jadi unggulan di bidangnya masing-masing.

Upaya banyak negara di dunia untuk menciptakan vaksin Covid-19 paling cepat diprediksi baru akan tersedia di pertengahan tahun 2021. Data Worldometer menunjukkan hingga 9 November 2020, pukul 11.24 WIB jumlah kasus Covid-19 sudah tembus 50,73 juta orang. berdasarkan data Worldometer, per tanggal 9 November 2020 terdapat 13,67 juta kasus infeksi aktif di dunia. Sebanyak 35,79 juta orang sudah sembuh dan 1,26 juta orang meninggal karena Covid-19. Harapannya kini ada pada vaksin Covid-19. Sebelum tersedianya obat atau vaksin covid-19 diprediksi perekonomian masih akan terpengaruh karena dengan adanya ketidak pastian dan pembatasan aktifitas akan mempengaruhi kinerja ekspor negara-negara yang perekonomiannya tergantung pada ekspor komoditas mengalami tekanan dan terdampak akibat menurunnya permintaan dan penurunan harga beberapa komoditas andalan akibat pandemi ini.

Berdasarkan kondisi tersebut maka, walaupun perekonomian global dan negara-negara tujuan ekspor mengalami perkembangan positif di tahun 2021, akibatnya banyak stimulus yang dilakukan berbagai negara dalam upaya menghindari resesi yang kian parah namun perekonomian beberapa negara masih akan menunjukkan gejala resesi sampai dengan tahun 2022 walaupun tidak separah tahun 2020. Jika obat ataupun vaksin covid-19 sudah dapat dipasarkan di pertengahan atau akhir 2021, maka pertumbuhan ekonomi global masih akan belum pulih seperti kondisi sebelum pandemic melanda. Negara yang diprediksi akan tetap positif di tahun 2022 yaitu India, RRT. Output di negara maju, serta pasar negara berkembang -kecuali RRT- diproyeksikan tetap di bawah saat 2019. IMF juga menjabarkan pesimisme tentang bagaimana kinerja ekonomi global dalam jangka menengah. Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat menjadi sekitar 3,5% antara tahun 2022 dan 2025, meninggalkan output sebagian besar ekonomi di bawah tingkat yang diperkirakan sebelum pandemic.

4.1.9.2. Faktor-Faktor Domestik

(a) Tantangan Domestik Tahun 2021

Komitmen Pemerintah untuk menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur semakin mendapatkan tantangan di masa Pandemi Covid-19 ini. Upaya pencapaian tujuan pembangunan tampaknya tidak mudah dan akan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak. Tantangan tersebut diantaranya adalah ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan. Pandemi covid dan masalah perang dagang yang tidak pasti kapan akan berakhir menyebabkan banyak negara melakukan koreksi atas pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia.

Seperti yang dikutip dari *bigalpha.id*, bahwa *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% pada 2021 atau melonjak dari perkiraan minus 3,3% pada 2020. Indonesia adalah salah satu di antara beberapa negara lain seperti Perancis dan Rusia yang pertumbuhan ekonominya diperkirakan tumbuh di level 5%. Dalam Laporan Interim September 2020, jumlah barang dan jasa yang diproduksi (*the level of output*) diperkirakan tetap lebih rendah dibandingkan dengan 2019 dan sebelum pandemi. Proyeksi yang dibuat OECD ini mengasumsikan penyebaran virus dalam skala lokal masih akan berlanjut dan ditangani dengan intervensi lokal. Di samping itu, laporan ini menggunakan asumsi bahwa vaksin belum tersedia secara luas sampai akhir 2021. Jika ancaman dari virus corona memudar lebih cepat daripada yang diperkirakan, peningkatan kepercayaan diri dapat meningkatkan aktivitas global secara signifikan pada 2021.

Sementara itu ICAEW (*The Institute of Chartered Accountants in England and Wales*) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6,2% pada 2021 atau meningkat dibandingkan dengan perkiraan penyusutan sebesar 2,7% pada 2020. Karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat di Indonesia, laju pemulihan ekonomi diperkirakan akan melambat. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, proses pemulihan

Indonesia akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan. Untuk memastikan kebangkitan ekonomi di seluruh kawasan, sangat penting bagi negara-negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, seperti Indonesia, Singapura, Filipina, dan Malaysia, untuk melakukan pemulihan yang stabil. Dalam laporan bertajuk *Global Economic Outlook Report* dari Oxford Economics yang diterbitkan oleh ICAEW, pandemi Covid-19 telah membuat kawasan Asia Tenggara mengalami perlambatan pertumbuhan terbesar sejak Krisis Moneter Asia pada 1997. Laju pertumbuhan di kawasan ini diperkirakan akan menyusut sebesar 4,2% di tahun 2020.

Menurut Presiden Joko Widodo, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 4,5% hingga 5,5% pada 2021 yang ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Perkiraan itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang telah disampaikan kepada DPR. Seperti dikutip dari *Kompas.com*, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan target pertumbuhan ekonomi tersebut cukup moderat mengingat hingga saat ini kondisi perekonomian masih diliputi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor utama yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 seperti keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 serta kondisi pemulihan kinerja perekonomian global. Faktor lainnya adalah upaya reformasi struktural untuk meningkatkan kemudahan usaha dan menarik investasi dan dukungan kebijakan fiskal yang bercorak counter cyclical, termasuk melalui lanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 4,8-5,8% di tahun 2021. Proyeksi ini dinilai sejalan dengan prediksi pemerintah di kisaran 4,5-5,5% dalam RUU APBN tahun anggaran 2021. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2020) mengatakan bahwa "Secara keseluruhan kami berpandangan bahwa kisaran asumsi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan APBN

2021 antara 4,5-5,5% kami melihat itu cukup realistis, dan juga sejalan dengan perkiraan BI kami memperkirakan tahun depan di kisaran 4,8-5,8%," Gubernur BI juga mengatakan bahwa sejumlah lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan Asian Development Bank (ADB) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 pada kisaran tersebut. "Proyeksi-proyeksi dari berbagai lembaga dunia, sehingga secara keseluruhan kami juga melihat kalau tahun ini diperkirakan kontraksi 4,9%, di tahun depan dapat tumbuh positif,"

Pemulihan ekonomi akan terjadi karena perbaikan ekonomi global serta stimulus fiskal oleh pemerintah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan beberapa indikator yang menurutnya menunjukkan perbaikan adalah mobilitas manusia di sejumlah daerah yang meningkat serta angka penjualan eceran yang juga naik dan menunjukkan keyakinan konsumsi. Selain itu juga indikator manufaktur Purchasing Managers' Index (PMI) berada di level 50,8 pada Agustus 2020 atau meningkat dibandingkan dengan posisi di 46,9 pada Juli 2020.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga hadir secara virtual dalam Raker tersebut menyebutkan proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 mencapai 6,1%, World Bank 4,8%, dan ADB 5,3%. Proyeksi BI itu juga dilatarbelakangi dengan proyeksi perbaikan ekonomi global, dan berbagai stimulus yang sudah direalisasikan pemerintah, serta target implementasi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tahun depan disamping adanya pemulihan ekonomi yang akan semakin baik. Tidak hanya oleh perbaikan ekonomi global, stimulus fiskal dan moneter yang terus dilakukan, pemulihan produksi dan Investasi.

Pada bulan Juli 2020, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8 % pada 2021 atau perlahan-lahan pulih setelah diperkirakan tumbuh hanya 0% pada 2020. Seperti dikutip dari **kontan.co.id** Lead Economist World Bank di Indonesia Frederico Gill Sander menyatakan beberapa strategi yang dapat mendukung Indonesia bangkit dari krisis. Strategi itu antara lain memperluas cakupan program perlindungan

sosial, mengatasi kesenjangan yang baru teridentifikasi pada sistem, serta mempercepat penerapan perawatan kesehatan universal untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keputusan pemerintah untuk mengubah prioritas belanja negara dan meningkatkan defisit anggaran sangat dibutuhkan untuk dapat meredam dampak pandemi ini. Menurutnya, alokasi belanja dalam jumlah lebih besar pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur akan tetap dibutuhkan pemerintah. Di bulan September 2020, Bank Dunia (World Bank) sudah memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan minus di 2020 dan masuk jurang resesi. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia di 2020 minus 1,6% hingga minus 2%. Meski begitu, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia bisa pulih pada 2021 dengan kisaran pertumbuhan di level 3-4,4%. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN lain. "Indonesia dan Filipina memiliki prospek yang tidak pasti. Kedua negara dengan populasi terbesar setelah China tersebut hingga saat ini belum sukses dalam mengontrol pandemi," ujar Chief Economist for East Asia and Pacific Bank Dunia Aaditya Mattoo. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung jauh lebih rendah. Tahun depan, Malaysia diproyeksi tumbuh 6,3% dengan batas skenario bawah sebesar 4,4%. Filipina tahun depan diproyeksi masih bisa tumbuh 5,3%, dengan batas bawah 2,9%.

Adapun Vietnam yang dinilai sukses dalam mengontrol pandemi diperkirakan bakal tumbuh 6,8% tahun depan dengan batas bawah 4% dan Kamboja diperkirakan masih mampu mengerek perekonomian hingga 4,3% dengan batas bawah 3%. Mattoo pun mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik selain Filipina yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi dalam waktu dekat. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia dinilai belum sukses dalam menangani pandemi. Dia menilai adanya RUU Omnibus Law bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan reformasi. "Tapi kabar baiknya adalah pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan

Omnibus Law untuk melakukan reformasi. Tapi di satu sisi, Indonesia juga membutuhkan reformasi trade regime," kata Mattoo dalam Laporan Ekonomi Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober, Selasa (29/8/2020). Mattoo menilai pada dasarnya ekonomi Indonesia memiliki momentum yang sangat baik untuk tumbuh tahun ini, jika tak ada Covid-19. Namun kinerja industri manufaktur Indonesia tidak sekencang negara-negara lain untuk menopang ekonominya karena tidak terhubungnya rantai perdagangan Indonesia dengan perdagangan Internasional. Indonesia memiliki momentum yang luar biasa, salah satu negara yang memiliki beragam industri manufaktur setelah masa krisis keuangan. Namun banyak terjadi kelesuan dan Indonesia belum benar-benar terintegrasi dengan global power chain," sebutnya.

Selanjutnya Chief Economist East Asia and Pacific dari World Bank tersebut menyarankan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan pasar domestik semata. Percepatan pemulihan ekonomi dinilai bisa terjadi jika pemerintah melakukan reformasi struktural di sektor perdagangannya. Selain di atas, berikut usulan lain untuk keluar dari resesi:

1. Meningkatkan kapasitas pencegahan penyebaran COVID-19

Hal itu dapat membantu menahan penularan Covid-19 dan tidak terlalu menyebabkan gangguan bagi perekonomian. Pada saat yang sama, harus dilakukan kerja sama Internasional untuk dikembangkannya vaksin dan mempersiapkan pendistribusiannya secara efisien dan adil.

2. Memulai reformasi fiskal

Hal ini memungkinkan belanja lebih besar untuk memberikan bantuan tanpa perlu mengorbankan investasi publik. Defisit keuangan yang besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan akan meningkatkan hutang pemerintah rata-rata sebesar 7 poin persentase dari nilai PDB pada tahun 2020. Hutang sektor swasta yang besar dan terus bertambah menjadi tambahan risiko tidak langsung terhadap keuangan pemerintah. Dengan memperluas basis pajak melalui pemungutan pajak penghasilan dan keuntungan yang lebih progresif, serta pengurangan

pemborosan dengan mengurangi subsidi energi, dalam beberapa kasus lebih dari 2% dari nilai PDB memungkinkan proses pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Perluasan perlindungan sosial

Kebijakan ini meliputi pemberian bantuan kepada seluruh masyarakat miskin yang sudah ada maupun yang baru.

4. Dukungan kepada perusahaan

Hal ini dibutuhkan untuk mencegah kepailitan dan pengangguran. Dukungan harus didasarkan sedapat mungkin pada kriteria tujuan yang tidak hanya terkait dengan kinerja di masa lampau maupun kesulitan di saat ini, tetapi juga potensi untuk berkembang di masa depan.

5. Perkuat reformasi di bidang perdagangan

Terutama pada sektor-sektor layanan yang masih diberikan perlindungan seperti keuangan, transportasi, dan komunikasi untuk memperkuat produktifitas perusahaan, menghindari tekanan untuk melindungi sektor-sektor lainnya, dan memperlengkapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari peluang digital yang proses kebangkitannya dipercepat oleh pandemi.

Untuk Papua direncanakan pada Oktober tahun 2021, direncanakan akan menjadi tuan rumah penyelenggara PON XX yang tertunda akibat pandemic Covid-19. Moment PON XX dapat semakin mendorong aktivitas ekonomi di Papua yang telah melambat sebelum dan ditambah lagi di masa pendemi untuk kembali bergerak, khususnya di sector non pertambangan seperti transportasi, akomodasi dan penyediaan makan minum, pariwisata, dan pertanian. Kondisi ini diperkirakan akan berjaan sampai akhir tahun 2021, karena adanya perayaan hati besar agama sehingga mendorong juga peningkatan konsumsi RT. Dari sisi pengeluaran juga diharapkan dengan terjadinya pemulihan aktivitas ekonomi di akhir tahun 2020 akan semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan konsumsi RT dan semakin membaiknya iklim usaha di Papua di

tahun 2021. Dengan membaiknya perekonomian Papua akan mendorong pula iklim usaha yang kondusif dan akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di sector formal dan informal yang dapat menyerap tenaga kerja baik yang bersifat permanen maupun musiman. Dari sisi inflasi, dengan perkiraan sudah kembali terjadi pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, semakin membaiknya daya beli masyarakat dan semakin lancarnya jalur transportasi barang dan jasa maka permintaan dan penawaran barang dan jasa semakin lancar dan membaik sehingga tekanan terhadap laju inflasi akan semakin dapat terkendali dengan baik.

(b) Tantangan Domestik Tahun 2022

Dampak penularan Covid-19 bagi kesehatan dan ekonomi yang sangat cepat serta adanya pembatasan sosial berskala besar, mengakibatkan penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 ke sektor riil dan sektor keuangan telah menurunkan secara tajam *outlook* perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terjadi peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia akibat adanya pemutusan hubungan kerja dan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dampak dari rambatan pandemi covid-19 ini, diperkirakan masih akan berlangsung sampai akhir tahun 2021. Ada harapan vaksin covid-19 yang saat ini sudah memasuki tahap uji klinis, diprediksi sudah dapat digunakan paling cepat pertengahan atau lebih relevan di akhir 2021, sehingga di tahun 2022 peluang bagi sektor riil dan sektor keuangan dapat kembali bergeliat menjadi lebih besar.

Selama hampir tiga tahun terakhir ekonomi dan daya saing Indonesia di pasar global menghadapi berbagai tantangan, mulai dari terjadinya penurunan harga komoditas, perang dagang, hingga *currency shock* ditambah lagi pandemic Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia membawa tantangan yang jauh lebih besar dan lebih permanen terhadap ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia. Terjadi penyusutan pertumbuhan ekonomi, pelebaran defisit, penyusutan aktifitas perdagangan dan investasi yang menyebabkan Indonesia masuk ke *technical recession*.

Bank Dunia, (World Bank/WB) kembali mengkoreksi proyeksinya terhadap kondisi perekonomian negara-negara di kawasan Asia bagian Timur dan Pasifik, termasuk ekonomi Indonesia. Ekonomi RI baru bisa tumbuh positif mulai tahun 2021 dan balik ke level 5% pada tahun 2022 mendatang. "Di tahun 2021-2022, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan melalui proses pemulihan meskipun masih dibayangi risiko dan tantangan terkait keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diprediksi berada dalam rentang 3-4,4% dan di tahun 2022 sebesar 5,1%," demikian yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Sementara itu Menteri Keuangan di era **SBY**, Chatib Basri memproyeksikan ekonomi RI baru akan kembali normal pada 2022 mendatang. Dia menyebut ekonomi dalam negeri saat ini belum pulih dari tekanan corona. Ekonomi masih bertahan dari krisis (*surviving*). Ia menambahkan pemulihan ekonomi pun bisa terjadi dengan catatan; pandemi corona telah mampu diatasi. Selama vaksin belum didistribusikan, maka otomatis protokol kesehatan masih akan diterapkan sehingga ekonomi masih sulit dipacu. Kalau itu terjadi, ia mengatakan 2021 masih akan menjadi tahun pemulihan. Selama kegiatan usaha masih harus menerapkan protokol kesehatan, ia tak melihat akan ada investasi dan ekspansi usaha. Dengan kondisi itu, pertumbuhan ekonomi normal di kisaran 5 persen baru akan terjadi pada 2022. Chatib Basri, mengatakan dalam diskusi daring Katadata, Investasi Saat Pandemi dan Khasiat UU Cipta Kerja, Rabu (21/10) "Dugaan saya kalau saya bikin hitungan sederhana soal vaksin dan lainnya, ekonomi kita baru akan normal pada 2022. Saat itu, kita baru kita bisa bicara ekspansi, investasi swasta dan macam-macam," Meski investasi disebutkan belum akan masuk dalam jangka pendek, namun ia menyebut itu bukan alasan bagi pemerintah untuk tak bersiap-siap. Menurutnya, sebetulnya pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut. Ini tercermin dari keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani memperlebar defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dari 5,5 menjadi 5,7 persen dari Produk

Domestik Bruto (PDB). Pada tahun depan, menurutnya, belanja negara masih akan menjadi tulang punggung perekonomian negara karena swasta masih berusaha bangkit dari keterpurukan. Namun proyeksi Chatib berbeda dengan pemerintah yang optimis pada tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu mencapai level normal di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen. Perekonomian Indonesia tahun depan belum kembali normal meski perlahan sudah mulai bergerak kembali namun hanya beroperasi 70-80% dikarenakan ekspor masih lemah, investasi swasta masih terbatas, dan masih tingginya ketergantungan kepada fiskal stimulus.

Pemerintah, memiliki peran penting di dalam memberikan insentif kepada pelaku usaha ketika investor mulai masuk saat ekonomi mulai pulih. Insentif diberikan khususnya kepada pelaku usaha yang memiliki proyek hijau atau pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. “Di sini peran intervensi pemerintah contohnya BBM fosil tidak bisa lagi disubsidi. Jika itu terus disubsidi, orang akan terus konsumsi BBM fosil. Ketika harga minyak relatif rendah, saatnya melepas subsidi, uangnya bisa untuk kesehatan, bisa dialokasikan mendukung sektor *renewable*,” kata Chatib Basri.

Ekonom dari Indef, menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia akan membaik pada periode 2022-2023. Hal ini karena Indef melihat bahwa program penanganan Covid-19 dan pemberian stimulus yang digagas pemerintah belum terserap maksimal. Menurutnya stimulus yang paling efektif dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia adalah dengan mendorong UMKM untuk pindah ke ekosistem digital. saat ini, baru 13 persen UMKM yang masuk ke platform, artinya sisanya atau 87 persen masih berjualan secara konvensional. stimulus kepada UMKM dilakukan melalui pemberian subsidi internet gratis, insentif dan pendampingan bagi UMKM yang masuk ekosistem digital. Selanjutnya strategi lainnya yaitu dengan mengucurkan belanja pemerintah yang ekstrem di karenakan pada kuartal II ini secara *yoy*, belanja pemerintah turun sebesar 6,9 persen.

Sementara itu, Lembaga pemeringkat asal AS, Fitch Ratings, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan berkontraksi hingga -2% (yoy). Kontraksi ini sepenuhnya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas perekonomian karena adanya pembatasan sosial yang menekan konsumsi dan investasi serta perdagangan internasional dan terhentinya kunjungan wisatawan mancanegara ke negara Indonesia. Pada tahun 2021, Fitch Ratings memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh hingga 6,6% dan berlanjut ke level 5,5% pada 2022.

Pembangunan infrastruktur dinilai akan menjadi penyokong prospek pertumbuhan ini. Pemerintah juga dinilai telah mengeluarkan respon cepat dengan menggelontorkan dana penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695 triliun atau 4,4% dari PDB. Langkah darurat seperti melebarkan defisit hingga di atas 3% dari PDB juga disambut positif. Menurut Fitch Ratings, hal ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB. "Hal ini menandakan pengelolaan fiskal yang pruden mendapatkan dukungan dari seluruh spektrum politik," tulis Fitch Ratings.

Sejalan dengan hal itu, Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang terhadap PDB Indonesia akan mencapai 36,7% pada 2020 dan meningkat menjadi 39,1% pada 2022. Adapun defisit anggaran tahun ini mencapai 6% dan turun ke 3,5% pada 2022. Meski ada kenaikan defisit dan rasio utang, Fitch Ratings mencatat rasio utang terhadap PDB Indonesia terbilang kecil ketimbang median rasio utang terhadap PDB negara-negara dengan peringkat utang BBB lainnya yang mencapai 51,7%. Namun Fitch Ratings memberikan catatan atas rasio utang terhadap pendapatan negara. Fitch Ratings menilai rasio utang Indonesia terhadap pendapatan tergolong tinggi karena mencapai 308% tahun 2020. Rasio itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan median rasio utang terhadap pendapatan dari negara-negara dengan peringkat utang BBB lainnya yang hanya 138,3%. Dari sisi rasio pendapatan terhadap PDB, Indonesia termasuk negara dengan rasio pendapatan terhadap PDB paling rendah sebesar atau 11,9% tahun 2020. Pos

pendapatan ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19.

Untuk Papua dari sisi permintaan luar negeri, secara umum di tahun 2022 diperkirakan masih akan bergantung pada ekspor pertambangan yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif seperti kondisi di akhir tahun 2020 dan tahun 2021. Namun pertumbuhan ekspor yang positif ini belum seperti kondisi sebelum pandemi karena masih adanya negara tujuan ekspor yang juga sedang mengalami pemulihan akibat pandemi. Demikian juga dari sisi impor akan kembali meningkat dibanding kondisi tahun 2020 dan 2021 pada masa diberlakukannya PSBB dan new normal, namun belum seperti kondisi tahun 2018-2019 dikarenakan masih dalam proses pemulihan. WHO sendiri memprediksikan dampak dari pandemi Covid-19 akan berakhir dalam waktu dua tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap negara di dunia membutuhkan waktu untuk pemulihan kondisi ekonomi maupun social masyarakat yang diharapkan dalam tahun 2022 sudah masuk ke era normal seperti sebelum pandemi.

4.1.9.3. Target 2021 Dan Proyeksi 2022

Dalam konsep ekonomi makro pendapatan regional tersebut merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X-M), atau dalam bentuk persamaan pengeluaran agregate : $Y = C + I + G + X - M$. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika faktor-faktor stimulus ekonomi (C, I, G, X) meningkat, baik itu secara keseluruhan atau salah satu diantaranya, sedangkan faktor *leakage* ekonomi yaitu impor (M) tidak berubah, maka dipastikan pendapatan regional akan naik yang menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan pada variabel-variabel C, I, G dan X, serta dengan menekan M.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dapat ditentukan, menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut.

1. Dari sisi aggregate demand, perekonomian Papua masih akan ditopang oleh ekspor komoditas non migas yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian. Di tahun 2020, kinerja sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Papua relatif tidak

terpengaruh oleh Pandemi Covid-19, disaat sektor lainnya mengalami kontraksi. Diperkirakan dengan adanya pemulihan ekonomi di negara tujuan ekspor Papua (RRT, India, Filipina, Jepang dan Korea Selatan) maka ekspor Papua masih akan mengalami pertumbuhan positif walau melambat. Kinerja perekonomian Papua tahun 2021 dan 2020 akan berpotensi positif dikarenakan meningkatnya kinerja pertambangan dengan dibukanya pertambangan bawah tanah sehingga meningkatkan produktifitas tambang dengan produksi tembaga dan emas yang berkualitas dibanding dengan tambang terbuka.

2. Selain ekspor, peranan konsumsi rumahtangga juga sangat dominan pada pertumbuhan ekonomi Papua. Sehingga dengan terjadinya pemulihan aktivitas ekonomi di akhir tahun 2020 akan semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumahtangga dan semakin membaiknya iklim usaha di Papua di tahun 2021, yang berlanjut ke tahun 2022 lebih normal. Faktor perdagangan antardaerah yang semakin membaik dan bertambah pulih setelah diterpa Pandemi Covid-19 di Indonesia turut mengakselerasi peningkatan konsumsi rumahtangga di Papua pada tahun 2021 dan 2022.
3. Pelaksanaan PON XX Papua akan memberi efek multiplier yang sangat besar bagi perekonomian domestik baik itu peningkatan pada aggregate demand maupun supply. Moment PON XX tahun 2021 tersebut dapat mendorong aktivitas produksi di Papua yang telah melambat di tahun sebelumnya, khususnya pada sektor transportasi, akomodasi dan penyediaan makan minum, pariwisata, pertanian, industri, kontruksi, dan beberapa sektor utilitas lainnya seperti produksi air dan listrik. Kondisi ini diperkirakan akan berjaan sampai akhir tahun 2021. Selain itu, dari sisi aggregate demand juga dapat mendorong kenaikan pengeluaran pemerintah yang akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Papua baik itu di tahun 2021 maupun 2022 melalui belanja barang dan jasa, serta modal.

Berdasarkan asumsi-asumsi makroekonomi di atas, serta mengacu pada kerangka logis adanya dampak simultan antar

variabel ekonomi, maka berikut ini dapat disampaikan hasil proyeksi perekonomian Papua di tahun 2021 dan 2022, terutama untuk variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB dengan tambang dan tanpa tambang), inflasi, tingkat pengangguran, rasio penduduk bekerja dan ketimpangan pendapatan.

Tabel 4.9.
Target Dan Proyeksi Makroekonomi Provinsi Papua
2020 – 2022

Indikator Ekonomi	2019	Target 2020	Proyeksi		RPJMD Papua 2019-2023	
			2021	2022	2021	2022
Pertumbuhan PDRB DT	-15.72	4.40	4.74	5.64	5.91	6.26
Pertumbuhan PDRB TT	5.03	-0.65	3.12	4.05	6.53	6.96
Laju Inflasi	2.34	3.28	3.64	2.86	2.34	2.3
Gini Ratio	0.36	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39
Rasio penduduk bekerja	96.35	95.72	96.15	96.40	97.68	97.84
TPT	3.65	4.28	3.85	3.60	2.32	2.16

Dalam rangkaian perencanaan dan penganggaran tahun 2020-2021, secara ekonomi ada empat hal penting yang perlu diantisipasi menghadapi tantangan domestik, nasional dan global. **Pertama**, konsumsi rumah tangga harus dijaga bertahan dan terus tumbuh, sebab sekitar 43,68% (periode 2017-2019) ekonomi Papua masih digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga. **Kedua**, investasi yang menjadi penggerak kedua ekonomi yang menyumbang sebesar 28,93% harus ditingkatkan. Melalui investasi diharapkan menambah penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. *Transaction cost* atau biaya transaksi dalam berinvestasi perlu ditekan agar tidak selalu terjadi *high cost economy*, dimana penurunan biaya transaksi ini lebih diprioritaskan dengan menekan biaya transportasi, biaya administrasi dan biaya lobi (khususnya terkait pelepasan tanah hak ulayat). **Ketiga** adalah netto antara perdagangan keluar dan ke dalam daerah. Ini penting untuk menciptakan surplus perdagangan. Untuk itu selama tahun 2020-2021 mendatang, pemerintah provinsi perlu lebih serius untuk meningkatkan agribisnis pertanian dan perikanan guna memperlambat tekanan dari luar. **Keempat**, yang berkaitan dengan yang pembahasan Musrenbang yaitu belanja pemerintah daerah. efektivitas dan

efisiensi belanja pemerintah daerah perlu dioptimalkan, sehingga kontribusi APBD Provinsi Papua tahun 2020-2021 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, sebagai provinsi yang memiliki SAKIP dengan nilai baik, Setiap aparatur harus mengubah *mindset* dari bermental membagi-bagi dan menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan berdasarkan program-program prioritas.

4.2. Kerangka Keuangan Daerah

4.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Papua yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perhatikan Tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Ringkasan Pendapatan Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018
 (dalam milyar rupiah)

No	URAIAN	TA 2016				TA 2017				TA 2018			
		APBD-Induk 2016	APBD-Perubahan 2016	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2017	APBD-Perubahan 2017	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2018	APBD-Perubahan 2018	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan
1	PENDAPATAN	12.438,14	13.065,98	627,84	5,05	13.968,88	14.116,82	147,95	1,06	13.548,51	13.767,81	219,30	1,62
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.097,66	1.161,42	63,76	5,81	1.308,28	1.367,16	58,88	4,50	1.008,76	1.096,06	87,30	8,65
1.1.1	Pendapat Pajak Daerah	789,79	879,02	89,23	11,30	1.030,42	1.045,48	15,05	1,46	760,90	819,44	58,54	7,69
1.1.2	Retribusi Daerah	101,16	83,19	-17,97	-17,76	82,93	82,93	0,00	0,00	118,80	116,25	-2,55	-2,15
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,25	52,81	22,56	74,58	52,81	52,81	0,00	0,00	53,58	73,96	20,38	38,03
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	176,47	146,40	-30,07	-17,04	142,12	185,94	43,83	30,84	75,48	86,41	10,93	14,48
1.2	Dana Perimbangan	4.305,36	3.949,27	-356,09	-8,27	4.419,28	4.543,83	124,56	2,82	4.553,50	4.688,45	134,95	2,96
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.299,47	921,39	-378,07	-29,09	606,16	606,16	0,00	0,00	761,26	761,26	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.502,45	2.502,45	0,00	0,00	2.570,12	2.570,12	0,00	0,00	2.570,12	2.570,12	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	503,45	514,75	11,30	2,25	1.243,00	1.367,55	124,56	10,02	1.222,13	1.357,08	134,95	11,04
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	0,00	10,68	10,68	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.035,12	7.955,29	920,17	13,08	8.241,32	8.205,83	-35,49	-0,43	7.986,25	7.983,30	-2,95	-0,04
1.3.1	Dana Hibah	7,50	7,50	0,00	0,00	0,50	0,68	0,18	35,00	6,10	3,15	-2,95	-48,35
1.3.4	Dana Penyesuaian/Dana BOS	427,57	560,23	132,67	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Dana Otonomi Khusus	5.395,05	5.395,05	0,00	0,00	5.615,82	5.580,15	-35,66	-0,64	5.580,15	5.580,15	0,00	0,00
1.3.7	Dana Tambahan Infrastruktur	1.200,00	1.987,50	787,50	65,63	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selama tahun 2016-2018 cenderung pendapatan daerah Provinsi Papua jika mengacu pada APBD Induk mengalami peningkatan sekitar 4,65% per tahun, dengan kenaikan tertinggi pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 7,03% per tahun, kemudian Dana Perimbangan (DAPER) sebesar 6,32% per tahun. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat mengalami penurunan kurang lebih sebesar -1,85% per tahun.

Peranan terbesar yang menginjeksi DAPER hingga tumbuh paling tinggi diantara semua komponen pendapatan adalah Dana Alokasi Khusus yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 72,61% per tahun selama periode 2016-2018. Adapun untuk Dana Otonomi Khusus, untuk waktu yang sama hanya mengalami peningkatan 1,73% per tahun, dimana sampai pada APBD Induk 2018 tercatat Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 5.580,15 milyar.

Hal lainnya yang terlihat pada Tabel 4.10 adalah nilai perubahan pendapatan daerah pada APBD Provinsi Papua selama tahun 2016-2018 selalu mengalami penambahan, rata-rata sebesar 2,58% bila dibandingkan dengan APBD Induk. Paling tinggi pada PAD mencapai 6,32% per tahun atau sekitar Rp. 69,98 milyar per tahunnya. Dimana koreksi perubahannya paling banyak terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni sebesar 37,54% per tahun atau Rp. 14,31 milyar. Sedangkan untuk Pajak Daerah rata-rata bertambah sebesar Rp. 54,28 milyar atau 6,82% selama periode 2016-2018.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), diproyeksikan dengan proporsi bisa mencapai 10% dari total pendapatan daerah, atau sekitar Rp. 1.504,81 milyar, yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah kurang lebih Rp. 1.236,69 milyar, yang diestimasi naik sebesar Rp. 566,75 milyar dari APBD Induk 2019 sebelum

perubahan (lihat Tabel 4.10). Untuk mewujudkan kenaikan sebesar ini maka diperlukan adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
 - b. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah penghasil;

- c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (dividen);
- e. Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- f. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- g. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;
- h. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- i. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- j. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- k. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
- l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antar lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
- n. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- o. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan

POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak

memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Penyusunan anggaran belanja tahun 2021 harus berpedoman prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip pengelolaan belanja daerah dari *money follow function* diubah menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2020-2021.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti yang tergambar dalam perkembangan APBD Induk periode 2016-2018 (Lihat Tabel 4.12) tingkat pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua bisa mencapai 5,19% per tahun, yang

lebih banyak dipacu oleh kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar 11,12% per tahun. Dimana tercatat disini Belanja Hibah dan Bantuan Sosial keduanya memiliki pertumbuhan paling tinggi diantara semua komponen belanja daerah, masing-masing sebesar 55,58% per tahun dan 25,29% per tahun untuk periode 2016-2018.

Sementara pada Belanja Langsung cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sekitar -1,44% per tahun. Penurunan ini terjadi pada semua komponen belanja langsung selama tahun 2016-2018 yakni belanja pegawai mengalami penurunan rata-rata sebesar -9,02% per tahun, belanja barang dan jasa sebesar -0,56% per tahun, serta belanja modal sebesar -1,38% per tahun.

Tabel 4.11.
Ringkasan Belanja Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018
 (dalam milyar rupiah)

No	URAIAN	TA 2016				TA 2017				TA 2018			
		APBD-Induk 2016	APBD-Perubahan 2016	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2017	APBD-Perubahan 2017	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2018	APBD-Perubahan 2018	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan
2	BELANJA	12.908,14	13.601,16	693,02	5,37	15.083,88	15.654,66	570,79	3,78	14.091,77	14.832,72	740,95	5,26
2.1	Belanja Tidak Langsung	7.223,49	7.563,70	340,20	4,71	8.072,07	8.102,81	30,74	0,38	8.919,64	9.283,54	363,90	4,08
2.1.1	Belanja Pegawai	1.097,03	1.082,74	-14,29	-1,30	1.358,39	1.319,85	-38,54	-2,84	1.509,66	1.378,41	-131,25	-8,69
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00		40,00	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	994,14	1.167,66	173,53	17,45	1.089,14	1.038,39	-50,76	-4,66	2.195,80	2.436,27	240,47	10,95
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	188,95	153,75	-35,20	-18,63	91,51	101,03	9,52	10,40	184,98	167,37	-17,61	-9,52
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kpd Kab/Kota	367,47	362,83	-4,64	-1,26	383,67	390,16	6,50	1,69	387,43	398,27	10,84	2,80
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	4.555,91	4.791,21	235,29	5,16	5.094,36	5.203,38	109,03	2,14	4.627,78	4.896,80	269,02	5,81
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20,00	5,52	-14,48	-72,42	15,00	10,00	-5,00	-33,33	14,00	6,43	-7,57	-54,09
2.2	Belanja Langsung	5.684,65	6.037,47	352,82	6,21	7.011,81	7.551,85	540,04	7,70	5.172,13	5.549,18	377,05	7,29
2.2.1	Belanja Pegawai	266,51	260,97	-5,54	-2,08	278,96	274,07	-4,90	-1,76	215,63	210,49	-5,14	-2,38
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.667,33	2.838,48	171,14	6,42	3.202,63	3.821,94	619,31	19,34	2.524,18	2.749,21	225,03	8,92
2.2.3	Belanja Modal	2.750,81	2.938,03	187,22	6,81	3.530,22	3.455,85	-74,37	-2,11	2.432,32	2.589,48	157,15	6,46

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Kondisi yang berbeda jika diperhatikan dari anggaran perubahan selama periode 2016-2018, cenderung seluruh komponen belanja daerah Provinsi Papua selalu mengalami peningkatan, terutama untuk Belanja Langsung. Terlihat tambahan belanja langsung pada anggaran perubahan rata-rata mencapai Rp. 423,31 milyar atau naik 7,07% per tahun jika dibandingkan dengan APBD Induk masing-masing tahun bersangkutan. Tambahan terbesar terlihat pada belanja barang dan jasa, dengan rata-rata sekitar Rp. 338,50 milyar atau naik sebesar 11,56% per tahun. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung cenderung ditargetkan perubahannya kurang begitu banyak yakni hanya Rp. 244,95 milyar per tahun atau bertambah 3,06% per tahun sepanjang periode 2016-2018.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Papua untuk pembangunan tahap III (2017 – 2022), dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Tahun I). Untuk itu kebijakan belanja daerah Tahun 2020-2021 secara umum diupayakan dengan pengaturan pola dan prinsip-prinsip yaitu :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Tolok ukur dan target kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

4. Optimalisasi belanja langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Adapun arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2020-2021 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, RKP 2020 dan RKP 2021;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020;
9. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
10. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
11. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.

Untuk pengelolaan belanja Dana Otsus yang merupakan pembagian 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, dan 20% untuk pemerintah provinsi telah diarahkan alokasi belanjanya sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan

kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan

7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah diarahkan di atas akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dimana penundaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

4.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Tabel 4.12.
Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah Dan Perubahannya Di Provinsi Papua Tahun 2016-2018
 (dalam milyar rupiah)

No	URAIAN	TA 2016				TA 2017				TA 2018			
		APBD-Induk 2016	APBD-Perubahan 2016	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2017	APBD-Perubahan 2017	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2018	APBD-Perubahan 2018	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan
	PENDAPATAN	12.438,14	13.065,98	627,84	5,05	13.968,88	14.116,82	147,95	1,06	13.548,51	13.767,81	798,24	5,89
	BELANJA	12.908,14	13.601,16	693,02	5,37	15.083,88	15.654,66	570,79	3,78	14.091,77	14.832,72	642,12	4,56
	SURPLUS/DEFISIT	-470,00	-535,18	-65,18	13,87	-1.115,00	-1.537,84	-422,84	37,92	-543,26	-1.064,91	-521,65	-28,22
3	PEMBIAYAAN DAERAH												
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	500,00	565,18	65,18	13,04	1.190,00	1.612,84	422,84	35,53	593,76	1.115,41	521,65	87,86
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500,00	565,18	65,18	13,04	650,00	1.072,84	422,84	65,05	593,76	1.115,41	521,65	87,86
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30,00	30,00	-	-	75,00	75,00	-	-	50,50	50,50	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30,00	30,00	-	-	75,00	75,00	-	-	50,50	50,50	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	470,00	535,18	65,18	13,87	1.115,00	1.537,84	422,84	37,92	543,26	1.064,91	521,65	48,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua selama tahun 2016-2018 selalu tanpa perencanaan SiLPA (Lihat Tabel 4.12). Dalam hal ini kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Papua diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Ketika APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

BAB V

TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan yang dijelaskan dalam Bab V ini merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Provinsi Papua 2019-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Provinsi Papua, dan memperhatikan dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang hidup dalam masyarakat, isu strategis, serta capaian hasil pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun prioritas pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Penetapan prioritas adalah upaya sadar setiap tujuan program dan kegiatan secara terencana, dan terintegrasi, konsisten serta mengikat, untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah secara umum akan memuat komponen pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Papua, tentu saja tidak lepas dari arahan umum dan panduan utama,

sebagaimana tercantum dalam visi rencana pembangunan lima tahunan Provinsi Papua, dimana visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah:

***PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA
YANG BERKEADILAN***

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.

Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjaga pasokan pangannya terjamin dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua, penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM serta peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan memperkuat kelembagaan sosial politik dan peran masyarakat, melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung,

meningkatkan partisipasi dan transparansi, mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua akan tetap melanjutkan pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah dan kampung. Dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristik/kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta

peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah **La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri** dan **Anim Ha**, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 mengingat pelaksanaan pembangunan di masa lalu, belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh Masyarakat. Penyebabnya antara lain, proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menyasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk

memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu : 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pewilayahan komoditas unggulan daerah; 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

Untuk melaksanakan setiap misi pembangunan di atas, telah dirumuskan dan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka menengah kedepan sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

1) Misi Pertama : Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing yaitu :

- 1.1. Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasarannya :
 - a. Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Suksesnya pelaksanaan PON dan prestasi olahraga;
 - d. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
 - e. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
 - f. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

2) Misi Kedua : Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing yaitu :

- 2.1. Tujuan meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan sasarannya :
 - a. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum;
 - b. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat;
 - c. Meningkatnya penegakan HAM.

3) Misi Ketiga : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing yaitu :

- 3.1. Tujuan meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasarnya :
 - a. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - c. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah;
 - d. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

4) Misi Keempat : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing yaitu :

- 4.1. Tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasarnya :
 - a. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
 - b. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan;
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim;
 - d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan;
 - e. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;

- f. Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - g. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.
- 4.2. Tujuan mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar, dengan sasarannya :
- a. Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah;
 - b. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
 - c. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah;
 - d. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
 - e. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan;
 - f. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

5) Misi Kelima : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing yaitu :

- 5.1. Tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasarannya :
- a. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung;
 - b. Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP;
 - c. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan;
 - d. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS;

- e. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- f. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak.

5.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasikan dalam tataran sasaran strategik, program dan kegiatan yang mempunyai hubungan dengan tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Untuk menjamin sinergitas antara prioritas pembangunan nasional dan daerah maka prioritas pembangunan Provinsi Papua perlu disusun juga dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah pusat. Dalam hal ini sesuai Rancangan Awal RPJMN Tahun 2020-2024 telah dipaparkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional selama periode 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan

- perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
 5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Adapun untuk Provinsi Papua, agenda pembangunan daerah yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, sebagaimana yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, dirumuskan dalam *flagship* 10 TEKAD PAPUA yaitu untuk mewujudkan/membangun/meningkatkan: (1) Generasi Emas (Gemas) Papua; (2) Berdaya Ekomas Papua; (3) Infradas Papua; (4) Perlindungan dan Keberpihakan Adat Papua; (5) Kesetaraan Gender dan Kemitraan Papua; (6) Sukses PON XX Papua; (7) Pembangunan Berkelanjutan Papua; (8) Kampung Mandiri Papua; (9) Mandiri Pangan Papua; dan (10) Reformasi Birokrasi Papua. Satu per satu dapat dijelaskan singkat sebagai berikut.

(1) Generasi Emas

Generasi emas adalah generasi yang diharapkan menjadi perintis perubahan dalam membentuk kehidupan dan peradaban bangsa yang lebih baik. Generasi emas yang dicita-citakan ini adalah generasi yang bermodalkan kecerdasan komprehensif, yakni produktif, inovatif, interaksi sosial yang baik, dan berperadaban unggul.

(2) Berdaya Ekomas Papua

Berdaya Ekonomi Masyarakat (Ekomas) Papua adalah masyarakat Papua yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sumber daya alam di

sekitarnya secara tumbuh dinamis, berkelanjutan dan inklusif sebagai wahana untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat memberikan nilai tambah tinggi untuk pemenuhan kebutuhan sosia ekonomi. Dengan menjadi masyarakat yang berdaya diharapkan bisa menjadi penggerak bagi masyarakat lainnya. Sehingga ada timbal balik yang bisa diberikan kepada pihak lain yang memerlukan bantuan, terutama bagi elemen masyarakat yang paling terkecil yang masih terkungkung dalam ketidakberdayaan ekonomi.

(3) Infradas (Infrastruktur Dasar) Papua

Secara umum pengertian infrastruktur dasar Papua ialah semua struktur dan fasilitas dasar yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar dalam upaya memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Infrastruktur dasar dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Papua untuk pemerataan kampung/desa tertinggal dan terpencil. Infrastruktur tersebut terbagi dua, yakni (1) pelayanan dasar seperti listrik, air bersih dan sanitasi, serta (2) konektivitas. Diharapkan, pembangunan infrastruktur dasar ini dapat mengembangkan SDM agar semakin produktif dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pelayanan dasar membaik dan konektivitas terbuka, produktivitas pun akan meningkat.

(4) Perlindungan dan Keberpihakan Adat Papua

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada pasal 43 telah diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Perlindungan dan keberpihakan terhadap Adat Papua juga dilakukan melalui pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Papua. Pemberdayaan yang dimaksudkan ini adalah memperkuat fungsi dan peran Lembaga Adat sebagai wadah sekaligus fasilitator

pengelolaan pembangunan dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal. Sementara pelestarian dimaksudkan untuk menjaga agar nilai, adat-istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam praksis kultural, tetap lestari dan tidak hilang. Nilai, tradisi, adat istiadat, budaya yang tumbuh pada suatu masyarakat pada dasarnya juga menjadi asset atau modal sosial yang penting dalam rangka memberdayakan masyarakat demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Sedangkan pengembangan adat diarahkan guna merevitalisasi nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal agar sejalan dengan perubahan zaman sekaligus kepentingan praktis bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat adat.

(5) Kesetaraan Gender dan Kemitraan Papua

Kesetaraan gender atau keadilan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender ini juga terkait dengan pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak asasi manusia, ketersediaan kebutuhan dasar, isu marjinalisasi, pendidikan, kesehatan, persoalan tanah (ulayat), degradasi lingkungan hingga persoalan kesulitan penjangkauan wilayah.

Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah dapat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya. Salah satu konsep kemitraan pembangunan yaitu “*penta-helix*” menjadi model kemitraan yang dianggap tepat pada saat sekarang dan masa mendatang bagi pembangunan daerah Papua. Konsep pembangunan ‘*pentahelix*’, di mana (1) unsur pemerintah, (2) masyarakat atau komunitas, (3) akademisi, (4) pengusaha, dan (5) media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan

daerah Papua. Ke-5 unsur ini akan selalu bekerja sama dengan berpedoman pada prinsip-prinsip utama kemitraan yaitu (1) prinsip saling memperkuat; (2) prinsip saling memerlukan; dan (3) prinsip saling menguntungkan, namun bukan pada *profit oriented*. Unsur pemerintah daerah yang mempunyai *political power*, akan merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan. Sementara masyarakat atau komunitas (seperti Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya) disebut *social power*. Sedangkan akademisi mempunyai *knowledge power* yang dapat mengembangkan IPTEK untuk menghadirkan hidup ini lebih cepat, lebih murah, dan lebih bermanfaat. Para pebisnis yang mempunyai *entrepreneurship power* dapat bermanfaat memperkuat prinsip-prinsip kewirausahaan dalam pembangunan. Dan terakhir, media yang memiliki *information power* sangat berperan strategis dalam penyebaran informasi pembangunan secara baik, transparan dan objektif kepada masyarakat.

(6) Sukses PON XX Papua

Sukses PON XX Provinsi Papua, tidak lepas dari tiga sukses, yakni sukses tuan rumah, sukses prestasi dan sukses administrasi. Sukses tuan rumah PON XX adalah kesuksesan Papua dalam penyelenggaraan PON mulai dari pembukaan, pertandingan hingga penutupan. Termasuk juga sukses dalam menyediakan sarana dan prasarana pertandingan mulai dari wisma atlet, wasit, venue PON, penyebaran informasi, dan sebagainya. Adapun untuk sukses prestasi, maka selayaknya dari seluruh pertandingan dan perlombaan yang diselenggarakan Papua mampu meraih medali sebanyak-banyaknya. Terakhir untuk sukses administrasi, hal ini terkait dengan tata kelola PON yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan pemberdayaan. Sukses lainnya yang penting juga untuk diperhatikan adalah Pasca PON, khususnya upaya mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana PON setelah setelah event dilaksanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

(7) Pembangunan Berkelanjutan Papua

Desakan penduduk dan pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, lahan terbuka, lahan gambut dan ekologi lainnya serta mengancam kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pembangunan di Papua, baik itu di perkotaan maupun pedesaan, tidak lagi didasarkan pada pembangunan sosial ekonomi semata, akan tetapi harus berlandaskan pada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan Papua bukan saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Oleh karenanya pembangunan berkelanjutan Papua mengandung aspek-aspek keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial ekonomi; keberlanjutan komunitas, dan keberlanjutan kelembagaan.

(8) Kampung Mandiri Papua

Kampung atau Desa menurut pengertian universal, adalah sebuah aglomerasi (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area perdesaan (rural). Sementara untuk mandiri, pengertiannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan Kampung Mandiri Papua adalah kampung yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Suatu kampung di Papua dikatakan menuju mandiri harus memperhatikan beberapa aspek yaitu : (1) mempunyai potensi sumber daya alam; (2) mempunyai potensi sumber daya manusia; (3) mempunyai potensi prasarana dan sarana yang memadai; (4) mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa; (5) mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa; (6) terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa; (7) tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata; (8) besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi; (9) banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan, (10) adanya

tokoh penggerak /inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat, dan (11) tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

(9) Mandiri Pangan Papua

Kemandirian Pangan Papua adalah kemampuan Papua dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat individu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan sudah lama menjadi cita-cita bersama namun hingga saat ini belum bisa diwujudkan. Padahal, dengan sumber daya alam yang melimpah, pada dasarnya tidak ada alasan bagi Papua untuk tidak mandiri dalam pangan. Papua memiliki semua prasyarat untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh sumber daya manusia yang banyak menjadi salah satu syarat mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada pengelolaan yang baik, maka kemandirian pangan tidak akan dapat diwujudkan, dan Papua akan terus menerus menjadi daerah pengimpor bahan pangan. Oleh karena itu Kemandirian Pangan penting sekali diikuti juga dengan Kedaulatan pangan, Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan.

(10) Reformasi Birokrasi Papua

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik,

netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi Papua, yaitu: (1) *Mental aparatur*: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel; (2) *Organisasi*: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; (3) *Tata laksana*: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; (4) *Peraturan perundang-undangan*: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (5) *Sumber daya manusia aparatur*: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6) *Pengawasan*: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN; (7) *Akuntabilitas*: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (8) *Pelayanan publik*: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Daerah Papua periode 2019-2023 dengan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dapat divisualisasikan dalam Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Keselerasan Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023 Dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024		Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;	<ul style="list-style-type: none"> • BERDAYA EKOMAS PAPUA • MANDIRI PANGAN PAPUA
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;	<ul style="list-style-type: none"> • INFRADAS PAPUA • KAMPUNG MANDIRI PAPUA
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;	<ul style="list-style-type: none"> • GEMAS PAPUA • KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN PAPUA • SUKSES PON XX PAPUA

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024		Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;	<ul style="list-style-type: none"> • REFORMASI BIROKRASI PAPUA • PERLINDUNGAN DAN KEBERPIHAKAN ADAT PAPUA
5	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	<ul style="list-style-type: none"> • INFRADAS PAPUA
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;	<ul style="list-style-type: none"> • PEMBANGUNAN KEBERLanjutan PAPUA
7	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • REFORMASI BIROKRASI PAPUA

Merujuk pada Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 di atas, berikut disampaikan program-program prioritas yang menjadi acuan dalam penetapan program pembangunan di tahun 2020 dan 2021.

Tabel 5.2.
Program-Program Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Periode 2019-2023

No	Misi	Agenda Pembangunan	Program Prioritas
1.	Memantapkan Kualitas & Daya Saing SDM	GEMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan & pengembangan SMK, BLIC & Politeknik • Program peningkatan akses & kualitas pendidikan SD, SMP & SMA • Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul • Program pemantapan iaminan kesehatan • Program peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap wabah • Program peningkatan & pembenahan puskesmas, rumah sakit & sistem rujukan • Program pemantapan upaya kesehatan berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/ bergerak • Program pengurangan penyakit & kematian pada ibu, bayi, & balita • Program peningkatan kualitas SDM kesehatan • Program peningkatan prestasi kepemudaan
		INFRADAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan peningkatan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah

No	Misi	Agenda Pembangunan	Program Prioritas
		SUKSES PON XX PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan prestasi kepemudaan • Program penyelenggaraan sarana & prasarana PON • Program peningkatan ekonomi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan PON
		MANDIRI PANGAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan
2	Memantapkan Rasa Aman, Tenram & Damai Serta Kehidupan Demokrasi Memperkuat Bingkai NKRI	KESETARAAN GENDER DAN KEMITRAAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan kemitraan dalam perrbuatan/ pengambilan keputusan publik, pembangunan, dan ketertiban masyarakat
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	PERLINDUNGAN DAN KEBERPIHAKAN ADAT PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan Keberlanjutan Adat Papua
		INFRADAS PAPUA	Penguatan kebijakan pembagian dana Otsus untuk mengurangi kesenjangan, insentif jasa lingkungan, dan infrastruktur
		KAMPUNG MANDIRI PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan kelembagaan kampung
		REFORMASI BIROKRASI PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan sinergi antara pemerintah prov.& kab./kota • Program penataan struktur organisasi & teknologi birokrasi untuk pelayanan publik, pengawasan, & penegakan aturan yang lebih efektif & efisien

No	Misi	Agenda Pembangunan	Program Prioritas
			<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan sistem akuntabilitas & pengawasan dalam pengelolaan keuangan & kinerja daerah
		REFORMASI BIROKRASI- INFRADAS-SUKSES PON XX PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan
4	Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan	MANDIRI PANGAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan nilai tukar & daya beli petani, peternak, & nelayan • Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan • Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas
		BERDAYA EKOMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan & pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan • Program peningkatan & pemenuhan infrastruktur pertanian, perternakan, & perikanan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah • Program perbaikan tata kelola penzinan berbasis SDA dan lahan skala luas

No	Misi	Agenda Pembangunan	Program Prioritas
			<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas • Program peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mendorong kemandirian ekonomi
		GEMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan dan pengembangan SMK, BLK, dan Politeknik
		PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan • Program pengendalian pencemaran & kerusakan lingkungan hidup, serta revitalisasi pembangunan rendah karbon • Program pengendalian banjir & abrasi pantai
		INFRADAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, dengan lingkungan yang sehat & bersih • Program peningkatan akses transportasi antar moda • Program peningkatan pengelolaan air baku yang mendukung produktivitas wilayah • Program peningkatan ketersediaan energi murah dan energi terbarukan

No	Misi	Agenda Pembangunan	Program Prioritas
			<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan akses informasi dan komunikasi
5	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Tertentu	PERLINDUNGAN DAN KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan & infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, terluar & tertentu
		MANDIRI PANGAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan
		KAMPUNG MANDIRI PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan Kelembagaan Kampung
		GEMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul • Program perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, & difabel
		INFRADAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, & lingkungan sehat
		PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kapasitas SDM & sarana prasarana penanggulangan bencana
		KESETARAAN GENDER DAN KEMITRAAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan

5.3. Arah Pembangunan Dan Kerangka Pengembangan Wilayah

5.3.1. Arah Pembangunan Wilayah

Kebijakan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakanag. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

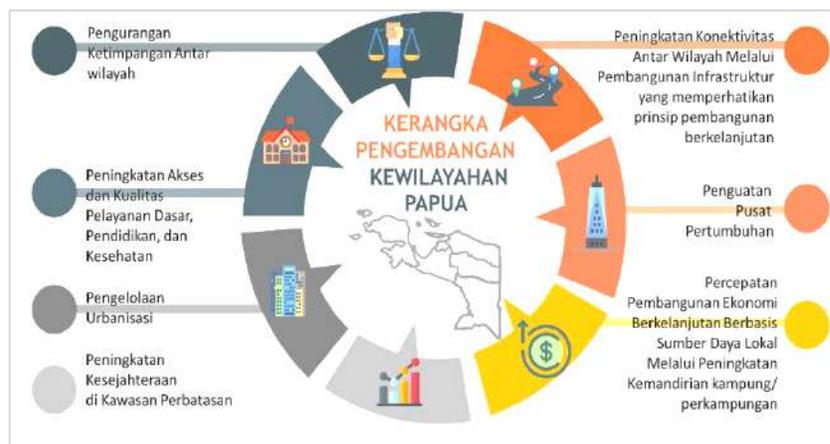
Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Untuk itu sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial. Lima KPE berbasis wilayah adat yang dimaksud adalah : (1) Wilayah adat Saireri yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen, (2) Wilayah adat Mamta yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai mamberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya, (3) Wilayah adat Me Pago yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai, (4) Wilayah adat La Pago yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang, dan terakhir (5) Wilayah adat Anim Ha yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul.

5.3.2. Kerangka Pengembangan Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua.

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Dan sebagai landasannya, berikut ini disampaikan kerangka pengembangan kewilayahan Papua.

Gambar 5.1 Kerangka Pengembangan Kewilayahan Papua



Penjelasan masing-masing kerangka pengembangan kewilayahan di atas dapat diurai sebagai berikut :

a. Penguatan Pusat Pertumbuhan

- Peningkatan skill OAP untuk mengisi sektor unggulan di pusat pertumbuhan;
- Keterkaitan antar kegiatan sektor ekonomi secara berkeadilan & berkelanjutan;
- Pengembangan industri pengolah produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- Penguatan pusat pertumbuhan tersebar setara.

b. Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan

- Pengintegrasian PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas
- Penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan di kawasan PKSN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur PLBN, PKSN, dan lokasi prioritas
- Pelintas batas tradisional

c. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian kampung/ perkampungan

- Budidaya dan nilai tambah lahan komunal untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
- Teknologi dan organisasi produksi pertanian berbasis sumber daya lokal
- Pengolahan hasil produksi pertanian agar bernilai tambah lebih tinggi
- Peningkatan akses produk lokal terhadap lokal, regional, dan nasional
- Keterampilan masyarakat lokal dalam kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan
- Efisiensi Perdagangan lokal

d. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan

- Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan terutama untuk daerah pinggiran
- Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah pinggiran dengan insentif dan disinsentif untuk memastikan mereka dapat bekerja di wilayah tersebut
- Memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama untuk memastikan siswa dapat mengakses
- Pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan masyarakat
- Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pengembangan obat-obatan tradisional

e. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah

- Pemerataan kesempatan ekonomi
- Pemerataan infrastruktur dasar
- Konsistensi penerapan penataan ruang

f. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan

- Menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal, khususnya dalam pengembangan ekonomi Orang Asli Papua
- Pemanfaatan Energi baru terbarukan

g. Pengelolaan Urbanisasi

- Memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan
- Penyediaan perumahan layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan
- Pencegahan konflik horizontal
- Pengendalian kerusakan lingkungan

BAB VI **P E N U T U P**

6.1. Kesimpulan

1. Kinerja pembangunan Papua tahun 2015-2019 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, namun demikian kinerja pembangunan yang dicapai tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Kinerja ekonomi Provinsi Papua sepanjang tahun 2015-2019 terlihat meningkat signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,78% per tahun. Di tahun 2019, karena ada permasalahan pada produksi pertambangan tembaga, sehingga mengurangi total ekspor regional, akhirnya PDRB Papua menurun cukup tajam menjadi sebesar -14,44%.
2. Selain itu, kinerja pembangunan manusia Papua menunjukkan kecenderungan yang meningkat, hal ini terlihat dari peningkatan IPM dengan status yang bergeser dari rendah ke status sedang. Namun disparitas IPM yang masih cukup besar antar sebagian besar Kabupaten/kota di Papua akan menjadi tantangan tersendiri pemerintah provinsi Papua
3. Secara keseluruhan tingkat inflasi tahunan provinsi Papua mengalami perkembangan yang fluktuatif mengecil dengan capaian inflasi pada tahun 2015 sebesar 2,79%, kemudian semakin meningkat di tahun 2018 menjadi 6,70% sebagai puncak tertinggi tingkat inflasi dan di tahun 2019, tekanan inflasi kembali menurun, hanya mencapai 2,31%.
4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Papua fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2015 TPT Provinsi Papua sebesar 3,99% yang merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 2015-2019. Selanjutnya perkembangan TPT Provinsi Papua terlihat fluktuatif menurun hingga mencapai 3,42% pada tahun 2019.
5. Besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Papua cenderung menurun sepanjang tahun 2015-2019. Tahun 2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 79,57% namun selanjutnya cenderung menurun hingga menjadi 76,04% pada tahun 2019. Kondisi ini

menunjukkan bahwa semakin rendah pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Papua.

6. pertumbuhan investasi di provinsi Papua tahun 2015-2019 terlihat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu 7,12%, dengan ICOR mencapai angka 3,92 poin dan COR sebesar 3,74 poin. Ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi mengalami pertumbuhan sebesar, namun daya saingnya masih rendah, karena berdasarkan angka ICOR terlihat bahwa kebutuhan untuk menaikkan 1 unit output PDRB pada tahun 2018 dibutuhkan 7,12 unit modal jauh diatas angka moderat yang semestinya maksimal 4 unit modal, sehingga jika dilihat secara rata-rata selama 2015-2018 (ICOR positif) maka dapat dikategorikan Papua masih mengalami ekonomi biaya tinggi dengan ICOR sebesar 4,28 poin, dan produktifitas investasi yang rendah sebesar 3,61 poin.
7. Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua fluktuatif menurun yaitu dari 0,421 poin pada Maret 2015 menurun menjadi 0,394 poin pada Maret 2019 atau bergeser dari ketimpangan sedang ke ketimpangan rendah. Selama periode Maret 2015 sampai dengan Maret 2019, tingkat ketimpangan tertinggi terdapat pada September 2015 sebesar 0,421 poin dan terendah pada Maret 2018 sebesar 0,384 poin.
8. Distribusi pendapatan di Provinsi Papua cenderung meningkat persentasenya sepanjang periode Maret 2016-Maret 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin membaik distribusi pendapatan kota, desa dan kota+desa di Provinsi Papua. Distribusi pendapatan di kota pada maret 2016 mencapai 20,32% meningkat menjadi 21,63% pada maret 2019 dengan distribusi pendapatan tertinggi terdapat pada September 2018 sebesar 21,95% dan terendah pada Maret 2017 sebesar 20,30% atau masuk ketimpangan rendah.
9. Dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2020-2021, secara ekonomi ada empat hal penting yang perlu diantisipasi menghadapi tantangan domestik, nasional dan global. Pertama, konsumsi rumah tangga harus dijaga agar terus tumbuh, sebab kedepan ekonomi Papua masih akan

digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi yang menjadi penggerak kedua ekonomi harus ditingkatkan. Ketiga, menciptakan surplus perdagangan. Keempat, efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah perlu dioptimalkan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi lagi.

10. Mengacu pada APBD Induk mengalami peningkatan sekitar 4,65% per tahun, dengan kenaikan tertinggi pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 7,03% per tahun, kemudian Dana Perimbangan (DAPER) sebesar 6,32% per tahun. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat mengalami penurunan kurang lebih sebesar -1,85% per tahun.
11. DAK memiliki peranan terbesar yang menginjeksi dana perimbangan hingga tumbuh paling tinggi diantara semua komponen pendapatan dengan rata-rata sebesar 72,61% per tahun selama periode 2016-2018. Adapun untuk Dana Otonomi Khusus, untuk waktu yang sama hanya mengalami peningkatan 1,73% per tahun, dimana sampai pada APBD Induk 2018 tercatat Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 5.580,15 milyar.
12. Tingkat pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua bisa mencapai 5,19% per tahun, yang lebih banyak dipacu oleh kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar 11,12% per tahun. Dimana tercatat disini Belanja Hibah dan Bantuan Sosial keduanya memiliki pertumbuhan paling tinggi diantara semua komponen belanja daerah, masing-masing sebesar 55,58% per tahun dan 25,29% per tahun untuk periode 2016-2018.
13. Belanja Langsung cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sekitar -1,44% per tahun. Penurunan ini terjadi pada semua komponen belanja langsung selama tahun 2016-2018 yakni belanja pegawai mengalami penurunan rata-rata sebesar -9,02% per tahun, belanja barang dan jasa sebesar -0,56% per tahun, serta belanja modal sebesar -1,38% per tahun.
14. Arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2020-2021 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD,

program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, yaitu 1) Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan; 2) Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, RKP 2020 dan RKP 2021; 3) Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja; 4) Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%; 5) Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi; 6) Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus; 7) Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah; 8) Dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020; 9) Pembinaan bagi atlet berprestasi; 10) Dukungan terhadap DPRP dan MRP; 11) Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.

6.2. Rekomendasi

1. Tantangan pembangunan Papua ke depan, khususnya di tahun 2020 dan 2021 tidaklah mudah, bahkan akan semakin berat. Dibutuhkan komitmen dan keseriusan semua pihak yakni, pemerintah, stakeholder, dan seluruh masyarakat Papua untuk bahu membahu mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Papua 2019-2023 dan prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam *flagship* 10 TEKAD PAPUA. Peluang di tahun 2020 harus diraih dengan menggunakan
2. Pemerintah di Papua perlu mengantisipasi dampak dari meningkatnya peluang hidup lebih lama yang dapat menimbulkan beban ganda penyakit. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten dan provinsi perlu memberikan edukasi kesehatan yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat, dan berusaha menjaga kesehatannya, sehingga dapat menekan biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah kedepannya.

3. Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah, maka upaya penggalan dan identifikasi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) perlu dioptimalkan, terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial antara lain melalui optimalisasi kelembagaan OPD penghasil; optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi yang memudahkan wajib pajak untuk membayar; meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kinerja BLU dan BUMD; dan meningkatkan pendayagunaan asset-aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 2006. Key Indicator. Statistics and Data Systems Division, Asian Development Bank, Hongkong, [www.adb.org/statistics].
- BPS Provinsi Papua. 2020. Papua Dalam Angka Tahun 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- _____. 2019. Papua Dalam Angka Tahun 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- _____. 2018. Papua Dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- Daryanto, A., dan Hafizrianda, Y. 2010. Metode Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan. IPB-Press, Bogor.
- Deputi BPRDOD RI. 2012. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas RI, Jakarta.
- Emzir. A. D. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hewitt, Eleanor & Michael Bamberger. 1986. Monitoring and Evaluating Urban Development Programs. World Bank, Washington.
- Jacobs, R., Smith, P., and Goddard, M. 2004. Measuring performance: An examination of composite performance indicators. Centre For Health Economics Technical Paper Series 29, New York.
- Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Pedoman Evaluasi Dan Indikator Kinerja Pembangunan. Bappenas RI, Jakarta.
- KEMENDAGRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Pemerintah Provinsi Papua. 2016. Penerimaan Dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002-2015. Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura.
- Miles, M. B dan Huberman A. M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Salle, A. 2011. Akuntabilitas Keuangan (Studi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- SEKDA Provinsi Papua. 2013(a). Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Seketaris Daerah Provinsi Papua, Jayapura.
- _____. 2013(b). Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2015-2019. Seketaris Daerah Provinsi Papua, Jayapura.
- SETNEG RI. 2001. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- _____. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Solihin, Dadang. 2008. Teknik Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan. BinteK Perencanaan Penganggaran dan Monev Pembangunan. Makalah disampaikan untuk Ikatan Widyaiswara Indonesia, Jakarta.
- Tarigan, R. 2004. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

